

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2017



KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2018



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 14 Februari 2018

Inspektur Jenderal,



Justan R. Siahaan, Ak. MAcc.CA,QIA
NIP. 19600220 198203 1 001

KATA PENGANTAR



Tahun 2017 adalah tahun ketiga pelaksanaan pembangunan pertanian sesuai Rencana Strategis Kementerian Pertanian Periode 2015-2019. Kementerian Pertanian pada periode 2015-2019 telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging, dan Gula; (2) Terjaminnya Distribusi Pangan; (3) Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Pangan dan Gizi; (4) Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal; (5) Stabilitasnya Produksi Cabai dan Bawang Merah; (6) Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing; (7) Tersedianya Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi; (8) Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani; (9) Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani; (10) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian; dan (11) Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Kesebelas sasaran tersebut pada Tahun 2017 diupayakan pencapaiannya melalui 12 (dua belas) Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (2) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura; (3) Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan; (7) Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian; (8) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (9) Peningkatan Kualitas Perkarantinaaan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (10) Pendidikan Pertanian; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2017 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017 ini disusun.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017 ini adalah bukti konkrit bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

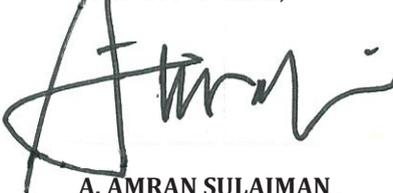
Pemerintah. Namun tentu saja buku ini tidak disusun secara asal dengan tujuan menggugurkan kewajiban semata, buku ini menjadi taruhan kredibilitas Kementerian Pertanian yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik dalam rangka pencapaian sasaran yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian pada tahun 2017.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2017 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Berbagai keberhasilan pembangunan pertanian yang dipaparkan pada buku ini bukan berarti dilalui tanpa aral. Masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat memberikan manfaat, terutama dapat menjadi *feedback* bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Februari 2018

Menteri Pertanian,



A. AMRAN SULAIMAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, diperlukan laporan tertulis yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian tahun 2017. Lakin Kementerian Pertanian tahun 2017 ini juga disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu ditingkatkan, dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2017.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Lakin ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan Lakin yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, khususnya terkait dengan kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran strategis sebagian besar indikator kinerja sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 15 indikator dan berhasil 8 indikator), sedangkan selebihnya terdiri dari 3 indikator cukup berhasil, 1 indikator kurang berhasil, dan 1 indikator belum memiliki capaian.

Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) Produksi padi mencapai 81,39 juta ton dari target 78,13 juta ton; (2) Produksi jagung mencapai 27,95 juta ton dari target 25,20 juta ton; (3) rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa mencapai 359 dari target 337; (4) Harga GKP di tingkat produsen lebih besar dari HPP; (5) Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras mencapai 7,48% dari target 5,87%; (6) Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar mencapai 12,64 dari target < 15; (7) Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah mencapai 16,14 dari target < 20; (8) Produksi manggis mencapai 168,5 ribu ton dari target 120 ribu ton; (9) Produksi Karet mencapai 3.629 ribu ton Karet Kering dari target 3.559 ribu ton Karet Kering; (10) Produksi Kopi mencapai 668.683 ton Kopi berasan dari target 637.539 ton Kopi Berasan; (11) Produksi Kelapa mencapai 2.870,74 ribu ton dari target 2.673 ribu ton; (12) Produksi daging kambing dan domba mencapai 124,84 ribu ton dari target 120 ribu ton; (13) Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya mencapai 25,54% dari target 25%; (14) PDB Pertanian Sempit/Jumlah TK Pertanian mencapai Rp. 27,59 juta dari target Rp. 27 juta; dan (15)

Nilai IKM Kementerian Pertanian mencapai 83,1 dari target 82. Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) Produksi tebu mencapai 2,12 juta ton dari target 2,4 juta ton; (2) Produksi daging sapi dan kerbau mencapai 564,02 ribu ton karkas dari target 640 ribu ton karkas; (3) Skor Pola Pangan harapan (PPH) mencapai 88 dari target 88,4; (4) Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit mencapai 20,96 dari target <17; (5) Produksi kentang mencapai 1.235 Ribu Ton dari target 1.437 Ribu Ton; (6) Produksi Kakao mencapai 659.776 ton biji kering dari target 688.345 ton biji kering; (7) Produksi teh mencapai 139.362 ribu ton dari target 146.168 ribu ton; (8) Produksi Kelapa Sawit mencapai 37.812.627 ton CPO dari target 40.936.330 ton CPO. Indikator kinerja yang cukup berhasil yaitu (1) Produksi mangga yang mencapai 1.869 ribu ton dari target 2.399 ribu ton; (2) Produksi Nanas mencapai 1.431 ribu ton dari target 1.902 ribu ton; dan (3) Produksi Salak mencapai 739 ribu ton dari target 1.152 ribu ton. Indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu produksi kedelai yang mencapai 0,542 juta ton dari target 1,20 juta ton. Indikator kinerja yang belum memiliki capaian yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian yang sampai dengan laporan ini dibuat belum diumumkan nilainya oleh Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2017, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp24.226.137.776.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 11 program. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2017 mencapai Rp21.909.385.622.358,- atau 90,44%.

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	5
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	7
D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN.....	11
A. RencanaStrategis 2015-2019	11
B. Perjanjian KinerjaTahun 2017.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJAKE MENTERIAN PERTANIAN	25
A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017	25
✚ Sasaran Strategis 1 (SS 1)	30
MeningkatnyaProduksiPadi, Jagung, Kedelai, Gula TebuDan Daging Sapi Dan Kerbau	
✚ Sasaran Strategis 2 (SS 2)	76
Terjaminnya Distribusi Pangan	
✚ Sasaran Strategis 3 (SS 3)	87
MeningkatnyaAkses Dan Pemanfaatan Pangan Dan Gizi	
✚ Sasaran Strategis 4 (SS 4)	93
MeningkatnyaKonsumsi Pangan Lokal	
✚ Sasaran Strategis 5 (SS 5)	95
Stabilnya Produksi Cabai Dan Bawang Merah	
✚ SasaranStrategis 6 (SS 6)	111
Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing	
✚ Sasaran Strategis 7 (SS 7)	147
Tersedianya Bahan Baku Bio Industri Dan Bio Energi	
✚ Sasaran Strategis 8 (SS 8)	149
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani	
✚ Sasaran Strategis 9 (SS 9)	154
Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani	
✚ Sasaran Strategis 10 (SS 10).....	159
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian	
✚ Sasaran Strategis 11 (SS 11).....	170
Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	
B. Capaian Kinerja Lainnya	185
C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian	192
PENUTUP	195
LAMPIRAN	199

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	13
Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target 2015-2019.....	16
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017	22
Tabel 4. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2017	26
Tabel 5. Peningkatan Luas Tambah Tanam Padi Tahun 2015-2017 (dalam Hektar)	32
Tabel 6. Kegiatan Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Padi Tahun 2017	43
Tabel 7. Kegiatan untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Jagung.....	51
Tabel 8. Kegiatan untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Kedelai	57
Tabel 9. Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan Produksi Kedelai	58
Tabel 10. Kegiatan untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Gula Tebu Tahun 2017	65
Tabel 11. Rekomendasi Solusi untuk Akar Permasalahan Produksi Gula Tebu	67
Tabel 12. Kegiatan Peningkatan Produksi Daging Sapi/Kerbau Kementerian Pertanian tahun 2017.....	74
Tabel 13. Rekomendasi Solusi untuk Akar Permasalahan Produksi Daging Sapi dan Kerbau	75
Tabel 14. Perkembangan Rasio Produksi Padi di Luar Pulau Jawa Tahun 2012-2017	78
Tabel 15. Data Produksi dan Konsumsi Beras di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2016-2017	78
Tabel 16. Kegiatan Pendukung Pencapaian Rasio Produksi Padi di Luar Jawa Tahun 2017.....	79
Tabel 17. Perkembangan Harga GKP, GKG dan Beras di Tingkat Petani Berdasarkan Pantauan BPS Tahun 2017.....	82
Tabel 18. Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian Tahun 2013-2017	83
Tabel 19. Realisasi Serap Gabah Petani Tahun 2015-2017.....	84
Tabel 20. Kegiatan Pendukung Pencapaian Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Produsen Tahun 2017	86
Tabel 21. Perkembangan Skor PPH Tahun 2012 – 2017.....	87
Tabel 22. Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk Indonesia Tahun 2013–2017	89
Tabel 23. Kegiatan Pendukung Pencapaian Skor PPH Tahun 2017	91
Tabel 24. Kegiatan Pendukung Pencapaian pencapaian Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras Tahun 2016	95
Tabel 25. Produksi Bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Besar 2012-2017	98
Tabel 26. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabe Besar Tahun 2017.....	100
Tabel 27. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Cabe Besar.....	102
Tabel 28. Produksi bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Rawit 2012-2017.....	103
Tabel 29. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabe Rawit 2017.....	104
Tabel 30. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Cabe Rawit.....	105
Tabel 31. Produksi Bulanan dan Koefisien Variasi Bawang Merah 2012-2017	106
Tabel 32. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Bawang Merah	110
Tabel 33. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Mangga	113
Tabel 34. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Nanas.....	116
Tabel 35. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Manggis.....	119
Tabel 36. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Salak	121

Tabel 37.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kentang.....	123
Tabel 38.	Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Perbaikan Pencapaian Produksi Kentang.....	124
Tabel 39.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Karet Tahun 2017.....	127
Tabel 40.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kopi Tahun 2017.....	131
Tabel 41.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kakao Tahun 2017.....	134
Tabel 42.	Rekomendasi akar permasalahan Kakao Tahun 2017.....	136
Tabel 43.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kelapa Tahun 2017.....	139
Tabel 44.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Teh Tahun 2017.....	142
Tabel 45.	Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Produksi The.....	143
Tabel 46.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Daging Kambing dan Domba Tahun 2017.....	146
Tabel 47.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kelapa Sawit Tahun 2017.....	149
Tabel 48.	Perkembangan Kelas Kemampuan Kelompok Kelompokkani Tahun 2014- 2017.....	152
Tabel 49.	Kegiatan Pendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani Tahun 2017.....	154
Tabel 50.	Jumlah PDB dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2012- 2017.....	159
Tabel 51.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2017.....	159
Tabel 52.	Hasil Pengukuran IKM Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017.....	162
Tabel 53.	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 dan Tahun 2015.....	169
Tabel 54.	Kegiatan Pendukung Pencapaian Nilai IKM Kementerian Pertanian Tahun 2017.....	170
Tabel 55.	Hasil Sementara Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2017.....	172
Tabel 56.	Detail Hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2016 -2017.....	174
Tabel 57.	Frekuensi Penerbitan Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2012-2017.....	179
Tabel 58.	Pengawasan dan Pendampingan di Sentra Produksi.....	181
Tabel 59.	Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2011-2017.....	192

DAFTAR GAMBAR

	HAL	
Gambar 1.	Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.....	12
Gambar 2.	Peta Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019.....	15
Gambar 3.	Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Kementerian Pertanian 2017 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011.....	28
Gambar 4.	Capaian Kinerja Produksi Padi Tahun 2012-2017.....	31
Gambar 5.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2012-2017.....	32
Gambar 6.	Sinergitas Kementerian Pertanian dengan Stakeholder Terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan.....	34
Gambar 7.	Presiden Jokowi meninjau pembangunan saluran irigasi tersier 130 Hektar yang terletak di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, 6 Des 2017.....	36
Gambar 8.	Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Dombeyoha Kecamatan Ladongi, Kolaka Sulawesi Tenggara.....	36

Gambar 9. Bantuan Alsintan berupa <i>Combine Harvester</i> Sedang.....	39
Gambar 10. Varietas Unggul Baru (VUB) Komoditas Padi Rindang Agritan 1 dan Tarabas	41
Gambar 11. Teknologi Inovasi dan Mekanisasi Tanaman Padi	42
Gambar 12. Capaian Kinerja Produksi Jagung Tahun 2012-2017.....	44
Gambar 13. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2012-2017	45
Gambar 14. Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Jagung di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.....	46
Gambar 15. Kegiatan Budidaya Jagung Tahun 2017 di Provinsi Bengkulu.....	48
Gambar 16. Inovasi Dan Teknologi Tanaman Jagung yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian	50
Gambar 17. Capaian Kinerja Produksi Kedelai Tahun 2012-2017	52
Gambar 18. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2012-2017	53
Gambar 19. Gerakan Tanam Perdana Kedelai di Provinsi Kalimantan Selatan.....	54
Gambar 20. Inovasi dan Teknologi Tanaman Kedelai.....	56
Gambar 21. Capaian Kinerja Produksi Gula Tebu Tahun 2012-2017	61
Gambar 22. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Areal Gula Tebu Tahun 2012-2017	62
Gambar 23. Kebun Benih Datar di Gorontalo	64
Gambar 24. Varietas Tebu yang Dilepas Tahun 2017.....	65
Gambar 25. Capaian Kinerja Produksi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2012-2017	69
Gambar 26. Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2012-2017	70
Gambar 27. Perkembangan Harga GKP di Tingkat Produsen 2013-2017 Berdasarkan Pantauan BPS	81
Gambar 28. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Head of Go-Mart, Menteri Pertanian dan Menteri melepas 50 Driver Go-Jek mengantar bahan pangan Toko Tani Indonesia (TTI).	86
Gambar 29. Pemanfaatan Pekarangan dalam konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).....	90
Gambar 30. Penanaman Cabai dalam Rangka Mendukung Pengaturan Pola Tanam Nasional	99
Gambar 31. Inovasi dan Teknologi Mendukung Peningkatan Produksi Cabai.....	101
Gambar 32. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cabai Tahun 2016 – 2019	104
Gambar 33. Menteri Pertanian Melakukan Pelepasan Ekspor Bawang Merah ke Thailand	108
Gambar 34. Grafik Produksi dan Luas Panen Bawang Merah Tahun 2012-2017.....	108
Gambar 35. VUB Bawang Merah Violetta 1 Agrihorti.....	109
Gambar 36. Produksi dan Luas Panen Mangga Tahun 2012-2017	112
Gambar 37. Produksi dan Luas Panen Nenas Tahun 2012-2017.....	115
Gambar 38. Produksi dan Luas Panen Manggis Tahun 2012-2017.....	118
Gambar 39. Produksi dan Luas Panen Salak Tahun 2012-2017	120
Gambar 40. Produksi dan Luas Panen KentangTahun 2012-2017.....	122
Gambar 41. Produksi dan Luas Areal Karet Tahun 2012-2017	125
Gambar 42. Teknologi Mitigasi Kekeringan pada Tanaman Karet	127
Gambar 43. Produksi dan Luas Areal Kopi Tahun 2012-2017.....	129
Gambar 44. Produksi dan Luas Areal Kakao Tahun 2012-2017	132
Gambar 45. Produksi dan Luas Areal Kelapa Tahun 2012-2017	137
Gambar 46. VUB Tanaman Kelapa	139
Gambar 47. Produksi dan Luas Areal Teh Tahun 2012-2017.....	141
Gambar 48. VUB Teh Tambi 1 dan 2.....	142

Gambar 49. Produksi dan Populasi Daging Kambing dan Domba Tahun 2012-2017.....	145
Gambar 50. Pemberian Pakan Berbasis Limbah Sawit.....	145
Gambar 51. Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit Tahun 2012-2017.....	148
Gambar 52. Perkembangan Pendapatan petani Tahun 2012-2017.	155
Gambar 53. Dampak Peningkatan Pendapatan Kelompok SOLID dan Bukan Pemanfaat SOLID Tahun 2017	158
Gambar 54. Target dan Realisasi IKM Kementerian Pertanian Tahun 2013-2017.....	161
Gambar 55. Proses Pelayanan Perizinan di Pusat PVTPP	163
Gambar 56. Pemusnahan Bibit Jamur asal Malaysia yang Tidak Memenuhi Syarat Karantina.....	168
Gambar 57. Komponen penilaian RB Kementerian/Lembaga	170
Gambar 58. Target dan realisasi Nilai reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian 2016-2017	173
Gambar 59. Suasana Rembug Tani di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.....	182
Gambar 60. Menteri Pertanian Menerima Penghargaan K/L Anti Gratifikasi Terbaik dari KPK	186
Gambar 61. Sekretaris Jenderal Kementan menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017.....	187
Gambar 62. Menteri Pertanian Menerima Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2016 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Di Kantor Pusat Kementan, 5 Juni 2017.....	188
Gambar 63. Kepala Badan Karantina Pertanian menerima Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017	190

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sudah melaksanakan pembangunan tahun ketiga dari tahap ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya telah dilakukan pada tahap ke-1 RPJMN (2005-2009) dan RPJMN ke-2 (2010-2014) dan memberikan hasil yang membawa perubahan.

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahapan sebelumnya, tahap ke-3 RPJMN (2015-2019) dicanangkan dengan tujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dimasa mendatang.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental. Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik apabila mampu

menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu bangsa (tidak terkecuali Indonesia) untuk dapat membangun sektor lainnya. Apabila kebutuhan masyarakat yang paling mendasar ini belum terpenuhi, maka akan sangat mudah terjadi kerawanan sosial dan negara mudah ditekan oleh kekuatan luar karena ketergantungannya terhadap pangan.

Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden yang telah tertuang dalam Visi, Misi dan Rencana Aksi, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di mana seluruh kebutuhan pangan pokok akan diupayakan secara optimal untuk dicukupi dari produksi dalam negeri. Amanah sasaran pembangunan pertanian tersebut telah ditindaklanjuti Kementerian Pertanian didalam menyusun Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Strategi pembangunan pertanian selama periode 2015-2019 akan dititikberatkan pada 7 (Tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy; (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain tujuh strategi utama, terdapat 9 strategi pendukung, yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantina; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7) Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian tidak sedikit dan tidak mudah untuk dihadapi. Tantangan dan sekaligus isu strategis yang dihadapi pembangunan pertanian antara lain:

keterbatasan luas baku lahan untuk setiap komoditas, terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul, perubahan iklim, bencana alam, serangan hama dan penyakit, masih kurangnya populasi ternak, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan petani, makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, terbatasnya modal petani, kondisi perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum bisa merata, serta panjangnya rantai tata niaga komoditas pertanian.

Kementerian Pertanian di tahun 2017 telah menetapkan arah pelaksanaan program dan kegiatan, maupun target yang ingin dicapai yaitu: (1) Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula; (2) Terjaminnya distribusi pangan; (3) Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi; dan (4) Meningkatnya konsumsi pangan lokal; (5) Stabilitasnya produksi cabai dan bawang merah; (6) Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing; (7) Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi; (8) Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani; (9) Meningkatnya pendapatan keluarga petani; (10) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian; dan (11) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian

Selanjutnya, untuk menghadapi isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya kegiatan prioritas, meliputi: (1) optimalisasi pemanfaatan lahan tadah hujan (*rainfed field*), pasang surut, dan rawa lebak sebagai upaya peningkatan indeks pertanaman (IP) 1 menjadi 2-3 didukung pengembangan infrastruktur sumber-sumber air, (2) pengembangan pertanian di wilayah perbatasan berorientasi ekspor, (3) pengembangan pertanian organik, (4) percepatan peningkatan populasi ternak sapi melalui upaya khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), (5) hilirisasi produk pertanian, dan (6) stabilisasi harga dan penguatan pasar.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: (1) produksi padi tahun 2017 sebesar 81,39 juta ton GKG atau naik 2,58% dari

tahun 2016 sebesar 79,34 juta ton, (2) produksi jagung tahun 2017 sebesar 27,95 juta ton atau naik 18,53% dari tahun 2016 sebesar 23,58 juta ton, (3) produksi bawang merah sebesar 1,51 juta ton atau naik 4,43% dari tahun 2016 sebesar 1,45 juta ton, (4) produksi aneka cabai sebesar 2,08 juta ton atau naik 6,06% dari tahun 2016 sebesar 1,96 juta ton, (5) Nilai Tukar Petani (NTP) naik 1,5 % (101,4 tahun 2016 menjadi 102,94 tahun 2017), (6) Nilai Tukar Usaha Pertanian naik 1,52% (110,72 tahun 2016 menjadi 112,40 tahun 2017), dan (7) jumlah penduduk miskin di desa turun 7,7% (17,67 juta jiwa tahun 2016 menjadi 16,31 juta jiwa tahun 2017).

Di samping capaian produksi dan capaian atas beberapa indikator makro, Kementerian Pertanian telah memperoleh beberapa penghargaan, seperti: (1) Hasil penilaian Global Food Security Index menyatakan bahwa peringkat Ketahanan Pangan Indonesia naik dari peringkat 71 menjadi peringkat 69; (2) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik; (3) Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik; (4) Apresiasi dari Presiden RI atas keberhasilan Kementan bersama Polri, Kemenkeu, dan Kemendag dalam mengawal stabilisasi harga pangan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri; (5) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian; (6) Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendapat penghargaan dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award sebagai pengelola kepegawaian terbaik sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola kepegawaian pusat dan daerah; (7) Penghargaan TOP IT; (8) TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017; (9) Menteri Pertanian masuk 5 menteri berprestasi (survei *Polmark*); dan (10) Juara harapan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Kategori Kementerian;

Meskipun, secara umum kinerja sektor pertanian sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan di tahun 2017, namun diakui masih ada target-target yang belum dapat dicapai. Untuk ini, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada lingkup Kementerian Pertanian

semata, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran juga untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, TNI-AD, Kepolisian Republik Indonesia, BULOG, Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten /kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Untuk itu, kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian sangat lah diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2017.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya, Kementerian Pertanian terdiri atas Wakil Menteri Pertanian, 6 Direktorat Jenderal, 4 Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 4 Staf Ahli Menteri.

Perpres No 45/2015 ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Gambar struktur organisasi

Kementerian Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- (4) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
- (5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- (6) Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
- (7) Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
- (8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- (9) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- (10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan

- (11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian, terdiri atas:

- (1) Sekretariat Jenderal;
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura;
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (7) Inspektorat Jenderal;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- (9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
- (10) Badan Ketahanan Pangan;
- (11) Badan Karantina Pertanian;
- (12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri
- (13) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
- (14) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
- (15) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
- (16) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
- (17) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;

- (18) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
- (19) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian;
- (20) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
- (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian.
- (9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan

- dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- (10) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.
 - (11) Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
 - (12) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang bio industri;
 - b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
 - c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang investasi pertanian;
 - d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang lingkungan pertanian; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang infrastruktur pertanian.
 - (13) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.
 - (14) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.

- (15) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2017 pada 11 Unit Kerja Eselon I termasuk 160 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 18.760 orang, terdiri dari Golongan I sebanyak 399 orang, golongan II sebanyak 4.493 orang, golongan III sebanyak 11.393 orang, dan golongan IV sebanyak 2.475 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 685 orang, S2 sebanyak 3.827 orang, S1/D4 sebanyak 5.654 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.824 orang, SMA sebanyak 5.794 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan jumlah pegawai 20.635 orang, maka jumlah pegawai tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1.029 orang atau 5,19 %. Penurunan jumlah pegawai pada tahun 2017 disebabkan karena adanya pegawai pensiun. Secara rinci jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 2**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Rencana Strategis 2015-2019

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Renstra Kementan) periode 2015-2019. Untuk melanjutkan kontribusinya dalam membangun sektor pertanian yang berperan strategis dalam perekonomian nasional, Kementerian Pertanian menyusun Renstra Kementan 2015-2019. Renstra yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3 (2015-2019) Bidang Pangan dan Pertanian dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian, kedepan Renstra Kementan masih akan fokus pada meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk penguatan ketahanan pangan menuju tercapainya kedaulatan pangan. Fokus lainnya adalah pada meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian melalui peningkatan agroindustri agar memiliki keunggulan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada 31 Desember 2015. Sementara itu, sejalan dengan SIPP 2015-2045, pembangunan pada sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*). Dengan perubahan paradigma tersebut, sektor pertanian tidak lagi hanya diposisikan sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, tetapi juga sebagai sektor yang memiliki fungsi strategis lainnya

dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan fokus kedua RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian, yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, yang dapat meningkatkan pangsa ekspor dan membendung masuknya komoditas dari negara-negara lain sehingga dapat berkontribusi memperkuat ekonomi nasional. Dalam Renstra, keselarasan dengan kedua hal tersebut secara eksplisit terurai dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pertanian.

Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun (2015-2019). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja di jajaran birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Pada Gambar 1 dan Tabel 1 disajikan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.



Gambar 1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

VISI & MISI			
TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1	Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula	1	Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula
2	Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan	2	Terjaminnya distribusi pangan
		3	Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi
3	Bergesernya budaya konsumsi pangan	4	Meningkatnya konsumsi pangan lokal
4	Meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilisasi harga	5	Stabilnya produksi cabai dan bawang merah
5	Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi	6	Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing
6	Mendorong majunya agrobioindustri	7	Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi
7	Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani	8	Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani
		9	Meningkatnya pendapatan keluarga petani
8	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	10	Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian
		11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

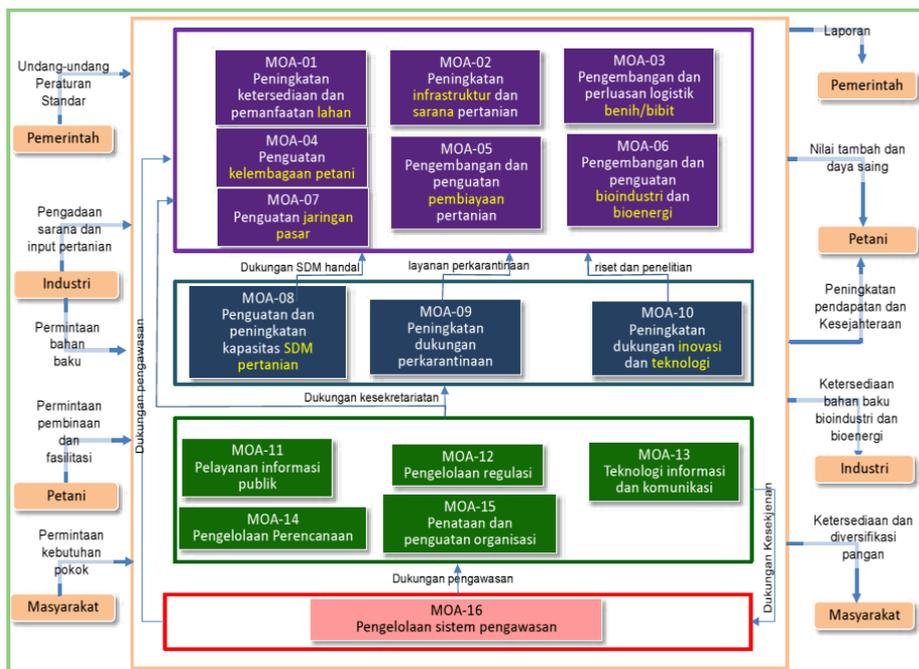
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yang meliputi:

- 1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan,
- 2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian,
- 3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit,
- 4) penguatan kelembagaan petani,
- 5) pengembangan dan penguatan pembiayaan,
- 6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta
- 7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Selain ketujuh strategi utama tersebut di atas, Kementerian Pertanian juga menyusun dan melaksanakan 9 (sembilan) strategi pendukungnya, yaitu:

- 1) penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian,
- 2) peningkatan dukungan perkarantinaan,
- 3) peningkatan dukungan inovasi dan teknologi,
- 4) pelayanan informasi publik,
- 5) pengelolaan regulasi,
- 6) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi,
- 7) pengelolaan perencanaan,
- 8) penataan dan penguatan organisasi, dan
- 9) pengelolaan sistem pengawasan.

Seluruh strategi, baik strategi utama maupun pendukungnya, dijalankan secara berkesinambungan selama periode 2015-2019. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas visi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan indikator kinerja beserta target kinerjanya sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019

Indikator kinerja dari dilaksanakannya strategi utama dan pendukung di bagi menjadi 2 (dua) kelompok, indikator makro dan indikator kinerja. Indikator makro didasarkan pada sasaran kinerja makro dari pembangunan pertanian, sementara indikator kinerja didasarkan atas sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian. Target indikator makro yang ingin dicapai selama periode 2015-2019 adalah:

- 1) Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tumbuh rata-rata per tahun di atas 7%, sedangkan PDB pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) tumbuh di atas 3,8%;
- 2) Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) turun dari 35.359 ribu orang (2015) menjadi 34.686 di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan -0,61%);
- 3) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor pertanian naik dari Rp10.023,1 Milyar (2015) menjadi Rp12.066,4 Milyar di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 3,2-6,2%), sementara Penanaman Modal Asing (PMA) naik dari US\$1.438,2 Juta (2015)

menjadi US\$1.710,1 Juta di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 2,9-5,9%);

- 4) Neraca perdagangan tumbuh rata-rata per tahun 12,7%, terdiri atas tanaman pangan 4,8%, hortikultura 2,5%, perkebunan 10,4%, peternakan 0,9%, dan pertanian 12,7%;
- 5) Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada kisaran 101,21 di tahun 2015 sampai 104,56 di tahun 2019;
- 6) Pertumbuhan PDB per kapita naik dari Rp36.491,22 ribu (2015) menjadi Rp46.133,56 ribu di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 6,29%) dan PDB pertanian sempit per tenaga kerja (TK) pertanian sempit naik dari Rp10.868,43 ribu (2015) menjadi Rp13.623,30 ribu di tahun 2019 (rata-rata pertumbuhan 5,77%).

Indikator kinerja beserta targetnya yang ingin dicapai selama periode 2015-2019 seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target 2015-2019

No.	INDIKATOR INDICATORS	SATUAN Unit	baseline 2014	baseline 2015	2016	2017	2018	2019	(%/thn) (%/year)
S.1.1 Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula									
1	produksi padi	juta ton	70,84	74,99	76,22	78,13	80,08	82,07	3,00
2	produksi jagung	juta ton	19,00	19,83	21,35	22,36	23,48	24,70	5,39
3	produksi kedelai	juta ton	0,95	0,98	1,50	1,88	2,34	2,76	25,01
4	produksi tebu	juta ton GKP	2,58	2,62	2,80	2,95	3,30	3,80	8,17
5	produksi Daging Sapi dan Kerbau	ribu ton karkas	533	556	589	640	695	755,2	7,23
S.2.2 Terjaminnya Distribusi Pangan									
6	Rasio produksi padi per kapita di Luar Jawa	Kg/Tahun	334	355	364	372	381	390	3,2
7	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen	Rp/kg	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	
S.2.3 Meningkatnya akses dan Pemanfaatan Pangan dan Gizi									
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH	81,8	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5	2,5
S.3.4 Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal									
9	Rasio konsumsi pangan lokal non-beras terhadap beras	%	5,38	5,54	5,70	5,87	6,05	6,23	
S.4.5. Stabilitasnya Produksi Cabai dan Bawang Merah									
10	Variasi produksi bulanan cabai besar	cv %	13	13	≤ 12	≤ 11	≤ 10	≤ 10	
11	variasi produksi bulanan cabai rawit	cv %	18	18	≤ 17	≤ 16	≤ 15	≤ 15	
12	variasi produksi bulanan bawang merah	cv %	26	22	≤ 18	≤ 17	≤ 16	≤ 15	

No.	INDIKATOR INDICATORS	SATUAN Unit	baseline 2014	baseline 2015	2016	2017	2018	2019	(%/thn) (%/year)
S.5.6. Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing									
13	produksi mangga	ribu ton	2.236	2.285	2.340	2.399	2.460	2.519	2,41
14	produksi nenas	ribu ton	1.851	1.888	1.926	1.964	2.003	2.042	1,98
15	produksi manggis	ribu ton	142	144	147	150	152	155	1,77
16	produksi salak	ribu ton	1.028	1.059	1.080	1.102	1.124	1.146	2,20
17	produksi kentang	ribu ton	1.296	1.322	1.348	1.375	1.403	1.431	2,00
18	Produksi karet	ribu ton	3.153	3.320	3.438	3.559	3.683	3.810	3,86
19	produksi kopi	ribu ton	685	725	738	751	765	778	2,59
20	produksi kakao	ribu ton	709	773	831	872	916	961	6,28
21	produksi kelapa	ribu ton	3.031	3.309	3.355	3.401	3.446	3.491	2,91
22	produksi teh	ribu ton	144	160	160	161	162	163	2,59
23	Produksi daging kambing dan domba	ribu ton	109	115	117	120	122	125	2,79
S.6.7. Tersedianya Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi									
24	produksi kelapa sawit	ribu ton	29.344	30.798	30.845	32.657	34.515	36.420	4,44
S.7.8. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani									
25	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	10	17	22	23	24	25	10,80
S.7.9. Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani									
26	PDB pertanian sempit/jumlah TK pertanian	Rp juta	24,1	25,3	26,0	27,0	28,0	29,0	3,77
S.8.10. Meningkatnya Kualitas layanan publik Kementerian Pertanian									
27	Nilai IKM Kementerian Pertanian	poin		80	81	82	83	84	
S.8.11. Meningkatnya Tata kelola dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian									
28	Nilai reformasi birokrasi	poin	65,02	70	73	74	75	76	

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 edisi revisi

Indikator sebagaimana tabel 2 merupakan indikator yang tertera di Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 (revisi), dengan target sebanyak 28 indikator. Sebagai tindak lanjut, maka telah ditetapkan permentan No. 68/2016, tentang IKU dengan indikator-indikator yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun kedua pelaksanaan Renstra Kementan 2015-2019 diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kementerian Pertanian. Hal ini sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No 29/2014 dan Permen PAN&RB No 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2016 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan standar kinerja Kementerian Pertanian. Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan pada bulan Januari Tahun 2017, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. Seiring dengan perjalanan waktu,

Kementerian Pertanian melakukan satu kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2017 pada bulan Desember Tahun 2017 dikarenakan terjadi perubahan anggaran (APBN-P) pada pertengahan tahun anggaran, yang mengakibatkan pagu Kementerian Pertanian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian mengalami penyesuaian.

Apabila dibandingkan dengan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami penyesuaian target, yaitu terkait produksi komoditas jagung, kedelai, tebu, Koefisien Variasi Cabe dan Bawang Merah, produksi nenas, manggis, kopi, kakao, kelapa, teh, dan kelapa sawit. Penyesuaian target IKU tersebut dilakukan atas dasar sebagai berikut:

- a) Terkait komoditas jagung, Menteri Pertanian menyampaikan kebijakan bahwa tahun 2017 merupakan tahun jagung. Untuk mempercepat peningkatan produksi jagung, banyak sumber daya (*resource*) yang difokuskan untuk komoditas jagung. Berdasarkan baseline capaian jagung 2016 sebesar 23,58 juta ton (110,44% dari target 2016), serta dukungan anggaran dan kegiatan yang dilakukan di tahun 2017, maka target tahun 2017 mengalami peningkatan dari 22,36 juta ton menjadi 25,20 juta ton.
- b) Terkait komoditas kedelai, berdasarkan baseline capaian produksi kedelai tahun 2016 sebesar 0,86 juta ton (57,33% dari target 2016), maka dilakukan penyesuaian target produksi kedelai tahun 2017 yang semula 1,88 juta ton menjadi 1,2 juta ton. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini, akan sulit untuk mencapai target produksi kedelai yang cukup tinggi.
- c) Terkait komoditas tebu, berdasarkan data prognosa produksi Gula Kristal Putih (GKP) MT 2016/2017 (Taksasi Tengah Giling) per perusahaan gula bulan September 2017 didapatkan jumlah produksi gula tahun 2017 sebesar 2,38 juta ton dan taksasi sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi mendekati produksi tersebut atau bahkan mengalami penurunan, sehingga target diturunkan dari 2,95 juta ton menjadi 2,4 juta ton. Penurunan

tersebut disebabkan dinamika iklim dan aspek teknis pada Pabrik Gula yang berkaitan dengan penurunan rendemen.

- d) Terkait Koefisien Variasi (Kv) Produksi Bulanan Cabai dan Bawang Merah, terdapat proyeksi iklim di tahun 2017 yaitu kemarau basah yang dapat mempengaruhi fluktuasi produksi bulanan produk hortikultura, terutama cabai dan bawang merah. Hal inilah yang mendasari penyesuaian target Kv cabai dan bawang merah.
- e) Terkait komoditas nenas dan manggis, proyeksi iklim kemarau basah di tahun 2017 yang dapat mempengaruhi fluktuasi produksi bulanan produk hortikultura menjadi dasar dilakukan penurunan target produksi nenas dan manggis.
- f) Terkait komoditas kopi, kakao, kelapa, dan teh, penyesuaian target dilakukan karena: banyaknya tanaman tua yang memerlukan peremajaan sedangkan anggaran Ditjen Perkebunan tidak mencukupi, adanya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dapat mempengaruhi produksi, dan anomali iklim yang mengganggu waktu tanam. Ketiga hal diatas sudah diketahui sejak Triwulan III/2017 dan diprediksi hingga akhir tahun 2017 beberapa komoditas tersebut akan mengalami penurunan produksi.
- g) Terkait komoditas kelapa sawit, berdasarkan kondisi real di lapangan, jumlah Tanaman Menghasilkan kelapa sawit mengalami peningkatan, terutama di Perkebunan Rakyat (PR) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS), salah satunya sebagai agregat produksi tahun sebelumnya dan intervensi kegiatan *replanting* sawit yang digalakkan pekebun rakyat dan PBS. Sehingga untuk kelapa sawit diprediksi akan mengalami peningkatan produksi di akhir tahun 2017.

Revisi PK di atas sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

khususnya Lampiran I mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Lampiran I Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat, 2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), serta 3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2017 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging, dan Gula	1. Produksi Padi	78,13 Juta Ton
	2. Produksi Jagung	25,20 Juta Ton
	3. Produksi Kedelai	1,20 Juta Ton
	4. Produksi Tebu	2,40 Juta Ton GKP
	5. Produksi Daging Sapi dan Kerbau	640 Ribu Ton Karkas
2. Terjaminnya Distribusi Pangan	1. Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa	337
	2. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen	≥ HPP
3. Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Pangan dan Gizi	1. Skor Pola Pangan Harapan	88.4
4. Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal	1. Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras	5.87%
5. Stabilitasnya Produksi Cabai dan Bawang Merah	1. Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar	≤ 15
	2. Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit	≤ 17
	3. Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah	≤ 20
6. Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	1. Produksi Mangga	2.399 Ribu Ton
	2. Produksi Nanas	1.902 Ribu Ton
	3. Produksi Manggis	120 Ribu Ton
	4. Produksi Salak	1.152 Ribu Ton
	5. Produksi Kentang	1.437 Ribu Ton
	6. Produksi Karet	3.559 Ribu Ton Karet Kering
	7. Produksi Kopi	637.539 Ton Kopi Berasan
	8. Produksi Kakao	688.345 Ton Biji Kering
	9. Produksi Kelapa	2.673 Ribu Ton
	10. Produksi Teh	146.168 Ribu Ton
	11. Produksi Daging Kambing dan Domba	120 Ribu Ton
7. Tersedianya Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi	Produksi Kelapa Sawit	40.936.330 Ton CPO
8. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	25%
9. Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani	PDB Pertanian Sempit/Jumlah TK Pertanian	Rp. 27,0 Juta
10. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian	Nilai IKM Kementerian Pertanian	82 IKM
11. Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi	74 Poin

Sumber : Kementerian Pertanian, 2017

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian tahun 2017 tersebut di atas dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Eselon I teknis yang ada di lingkup Kementerian Pertanian melalui 12 (dua belas) Program Pembangunan Pertanian, yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
- 4) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
- 5) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- 6) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- 8) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan
- 9) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian
- 10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 11) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
- 12) Program Pendidikan Pertanian

Masing-masing program sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, menjadi tanggung jawab dari tiap unit Eselon-I sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Ukuran kinerja Eselon-I dalam menjalankan program terkait adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) dari unit kerja di bawahnya, Eselon-II atau unit kerja mandiri. Kinerja Eselon-I bergantung pada hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, ukuran kinerja Eselon-II atau unit kerja mandiri diperbolehkan untuk sekurang-kurangnya dalam bentuk indikator keluaran (*output*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2017

Untuk mengukur capaian kinerja, Kementerian Pertanian menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2017 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Evaluasi kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja tahun 2017 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, namun evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2018. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud. Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2017 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1. Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging, dan Gula	1. Produksi Padi	78,13 Juta Ton	81,39 Juta Ton	104,17	Sangat Berhasil
	2. Produksi Jagung	25,20 Juta Ton	27,95 Juta Ton*	110,91	Sangat Berhasil
	3. Produksi Kedelai	1,20 Juta Ton	0,542 Juta Ton*	45,16	Kurang berhasil
	4. Produksi Tebu	2,4 Juta Ton GKP	2,12 Juta Ton**	88,33	Berhasil
	5. Produksi Daging Sapi dan Kerbau	640 Ribu Ton Karkas	564,02 Ribu Ton Karkas***	88,19	Berhasil
2. Terjaminnya Distribusi Pangan	1. Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa	337	359	106,53	Sangat Berhasil
	2. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen	≥ HPP	> HPP	120%	Sangat Berhasil
3. Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Pangan dan Gizi	1. Skor Pola Pangan Harapan	88,4%	88	99,50	Berhasil
4. Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal	1. Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras	5,87%	7,48%	127	Sangat Berhasil
5. Stabilitasnya Produksi Cabai dan Bawang Merah	1. Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar	≤ 15	12,64	118,67	Sangat Berhasil
	2. Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit	≤ 17	20,96	81,11	Berhasil
	3. Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah	≤ 20	16,14	123,91	Sangat Berhasil
6. Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	1. Produksi Mangga	2.399 Ribu Ton	1.869 Ribu Ton****	77,9	Cukup Berhasil
	2. Produksi Nanas	1.902 Ribu Ton	1.431 ribu ton****	75,2	Cukup Berhasil
	3. Produksi Manggis	120 Ribu Ton	168,5 Ribu Ton****	140,42	Sangat Berhasil
	4. Produksi Salak	1.152 Ribu Ton	739 Ribu Ton****	64,15	Cukup Berhasil
	5. Produksi Kentang	1.437 Ribu Ton	1.235 Ribu Ton****	85,9	Berhasil
	6. Produksi Karet	3.559 Ribu Ton Karet Kering	3.629 Ribu Ton Karet Kering**	101,97	Sangat Berhasil
	7. Produksi Kopi	637.539 Ton Kopi Berasan	668.683 Ton kopi berasan **	104,88	Sangat Berhasil
	8. Produksi Kakao	688.345 Ton Biji Kering	659.776 Ton Biji Kering **	95,85	Berhasil
	9. Produksi Kelapa	2.673 Ribu Ton	2.870,74 ribu Ton**	107,39	Sangat Berhasil
	10. Produksi Teh	146.168 Ribu Ton	139.362 Ton**	95,34	Berhasil
	11. Produksi Daging Kambing dan Domba	120 Ribu Ton	124,84 Ribu Ton***	104,47	Berhasil
7. Tersedianya Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi	1. Produksi Kelapa Sawit	40.936.330 Ton CPO	37.812.627 Ton CPO **	92,37	Berhasil
8. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani	1. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	25%	25,54%	102,14	Sangat Berhasil
9. Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani	1. PDB Pertanian Sempit/Jumlah TK Pertanian	Rp. 27,0 Juta	Rp 27,59 Juta	102,85	Sangat Berhasil
10. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kementerian Pertanian	1. Nilai IKM Kementerian Pertanian	82 IKM	83,1	101,34	Sangat Berhasil
11. Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	1. Nilai Reformasi Birokrasi	74 Poin	-	-	-

Sumber : PK dan hasil Pengukuran Kinerja

Keterangan:

- * Hasil rakor Pembahasan Angka Ramalan (Aram) II BPS dan Ditjen TP, 2017
- ** Angka sementara Ditjen Perkebunan, 2017
- *** Angka sementara Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2017
- **** Angka Prognosa Ditjen Hortikultura, 2017. Angka Prognosa merupakan angka realisasi produksi yang telah masuk berdasarkan laporan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian Hortikultura sd.bulan Oktober 2017 dan estimasi laporan yang belum masuk sd. Bulan Desember 2017
- ***** Nilai PMPRB. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan bulan Februari 2018 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Kementerian Pertanian dapat dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan oleh komitmen pimpinan serta segenap jajaran dan pegawai Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2017.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 11 (empat) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran strategis sebagian besar indikator kinerja sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 15 indikator dan berhasil 8 indikator). Dari hasil evaluasi hanya 3 indikator yang cukup berhasil, 1 indikator kurang berhasil, dan 1 indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang **sangat berhasil** yaitu: (1) Produksi padi;(2) Produksi jagung;(3) Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa; (4) Harga GKP di tingkat Produsen; (5) Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras; (6) Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar; (7) Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah; (8) Produksi manggis; (9) Produksi karet; (10) Produksi kopi; (11) Produksi kelapa; (12) Produksi daging kambing dan domba Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya; (13) PDB Pertanian Sempit/Jumlah TK Pertanian; dan (14) Nilai IKM Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang **berhasil** yaitu: (1) Produksi tebu; (2) Produksi daging sapi dan kerbau; (3) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ; (4) Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit; (5) Produksi kentang ; (6) Produksi kelapa sawit ; (7) Produksi kakao; (8) Produksi teh;

Indikator kinerja yang **cukup berhasil** adalah (1) Produksi mangga; (2) Produksi nenas ; dan (3) Produksi salak.

Indikator kinerja yang **kurang berhasil** pencapaiannya di tahun 2017 ini yaitu Produksi kedelai.

Sedangkan indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah Nilai RB Kementerian Pertanian karena sampai dengan bulan Februari 2018 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011), nilai kinerja Kementerian Pertanian sebesar 87,21% atau termasuk dalam kategori baik. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana Gambar 3



Gambar 3 . Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Kementerian Pertanian 2017 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011

Persentase capaian kinerja anggaran Kementerian Pertanian 2017 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 90,44%.
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal adalah 100,00%.
3. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Revisi adalah 100,00%.
4. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah 95,07%.
5. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 6,41%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 249/2011 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$ <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>* Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persentase capaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2017 dalam hal efisiensi adalah mencapai 6,41%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned}
 NE &= 50\% + (6,41\%/20 \times 50) \\
 &= 0,5 + (0,0032 \times 50) \\
 &= 0,5 + 0,16 \\
 &= 0,66 \text{ atau } 66,0\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2017 adalah 66,0%.

Selanjutnya Pengukuran Nilai Efisiensi juga dilakukan terhadap masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perhitungan secara lengkap disampaikan pada **Lampiran 3**.

Sasaran Strategis 1 (SS 1) MENINGKATNYA PRODUKSI PADI, JAGUNG, KEDELAI, GULA TEBU DAN DAGING SAPI DAN KERBAU

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional telah menetapkan 5 (lima) komoditas pangan pokok, yaitu padi, jagung, kedelai, gula tebu, dan daging sapi dan kerbau.

Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok, Kementerian Pertanian menetapkan peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula tebu, dan daging sapi dan kerbau sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Gula Tebu, dan Daging Sapi dan Kerbau.

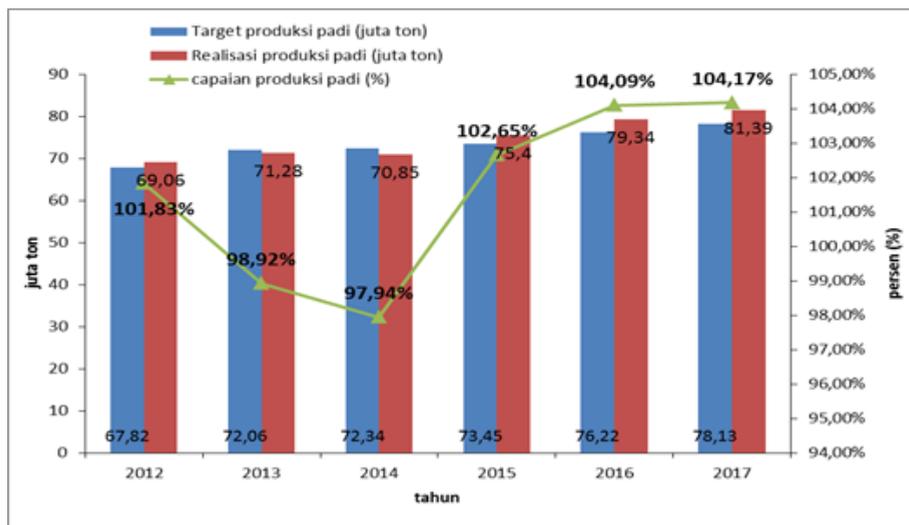
Sasaran strategis nomor pertama ini memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) produksi padi, (2) produksi jagung, (3) produksi kedelai, (4) produksi gula tebu, dan (5) produksi daging sapi dan kerbau.

SS 1. IKU 1 Produksi Padi	Target 78,13 juta ton GKG Realisasi 81,39 juta ton GKG	% Capaian 104,17 % Sangat Berhasil
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Keterangan: GKG = Gabah Kering Giling

Produksi padi pada tahun 2017 sebesar 81,39 juta ton GKG atau sebesar 104,17 % dari target sebesar 78,13 juta ton GKG, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Capaian kinerja ini merupakan capaian tertinggi selama 6 (enam) tahun terakhir. Pencapaian kinerja

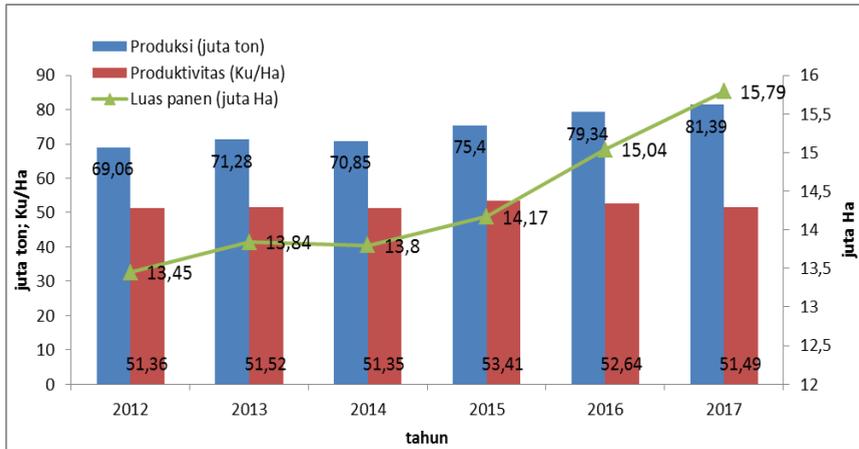
produksi padi tahun 2012 hingga tahun 2017 disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Capaian Kinerja Produksi Padi Tahun 2012-2017

Capaian kinerja produksi padi tahun 2016 dan 2017 sebesar 104% lebih baik bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tren peningkatan capaian kinerja produksi padi selama 6 tahun terakhir memperlihatkan bahwa Kementerian Pertanian secara konsisten terus merealisasikan target yang diamanatkan yaitu meningkatkan produksi padi dalam upaya menyediakan bahan pangan pokok beras bagi seluruh penduduk Indonesia.

Peningkatan produksi padi tidak terlepas dari peran produktivitas dan luas panen. Gambar 5 memperlihatkan bahwa luas panen dan produktivitas juga menunjukkan tren meningkat seiring dengan meningkatnya produksi padi.



Gambar 5. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2012-2017

Meningkatnya luas panen disebabkan terutama oleh meningkatnya luas tambah tanam padi. Membanding data tahun 2015-2017, Tabel 5 memperlihatkan terjadi penambahan luas tambah tanam padi sebesar 2,6 juta ha di tahun 2016-2017 dibanding di tahun 2015.

Tabel 5. Peningkatan Luas tambah Tanam Padi Tahun 2015-2017 (dalam Hektar)

No.	Bulan	2015	2016	2017
1	Januari	1.840.716	2.147.125	1.375.725
2	Februari	863.532	1.115.409	1.164.501
3	Maret	1.150.323	1.407.054	1.579.034
4	April	1.230.357	1.246.145	1.279.178
5	Mei	1.614.930	1.478.741	1.439.825
6	Juni	1.212.331	1.018.914	933.438
7	Juli	644.091	869.544	1.112.818
8	Agustus	566.782	918.863	1.260.374
9	September	799.195	1.221.258	1.267.129
10	Oktober	485.320	978.641	936.517
11	November	1.032.345	2.078.681	1.762.368
12	Desember	2.571.467	2.163.374	2.297.915
	Jumlah	14.011.389	16.644.749	16.408.822

Sumber: Pusdatin Kementan, 2017

Peningkatan luas tanam padi tersebut berdampak terhadap peningkatan luas panen pada tahun 2015, 2016 dan 2017 masing-masing 14,17 juta hektar, 15,04 juta hektar dan 15,79 juta hektar, dan masing-masing meningkat 2,31%, 9,86% dan 14,42% dibanding luas panen pada 2014. Peningkatan luas panen tersebut berdampak pada produksi padi yang cukup signifikan.

Selain kenaikan luas panen, kenaikan produksi padi disumbang oleh kenaikan produktivitas di sejumlah wilayah, terutama sentra produksi padi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Di samping mengandalkan sentra produksi padi di Pulau Jawa, Menteri Pertanian pun mendorong wilayah lain di luar Jawa untuk meningkatkan produktivitasnya, seperti Pulau Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan, serta mengembangkan daerah-daerah perbatasan.

Dibandingkan target produksi padi tahun 2019 sebesar 82,1 juta ton GKG, capaian produksi padi di tahun 2017 sudah mencapai 99%. Dengan capaian produksi padi tahun 2017 dapat melebihi target, maka optimis bahwa target produksi padi tahun 2019 akan dapat terlampaui. Untuk itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2017 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja produksi padi tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi padi, salah satunya sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Sinergitas Kementerian Pertanian dengan Stakeholder Terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan

Selama tiga tahun (2015-2017) Kabinet Kerja, Kementerian Pertanian telah melaksanakan Program Upaya Khusus (UPSUS) percepatan swasembada dan peningkatan produksi komoditas strategis padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai dan bawang merah. Pelaksanaan program tersebut memiliki tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks, termasuk iklim ekstrim El Nino dan La Nina yang berdampak pada kekeringan dan banjir. Untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan, beberapa terobosan

kebijakan telah dilaksanakan Kementerian Pertanian, diantaranya adalah: (1) revisi Perpres Pengadaan Barang/Jasa dari semula tender menjadi penunjukan langsung dan menggunakan *e-catalog*; (2) *refocusing* kegiatan dan anggaran untuk tujuh komoditas utama padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, bawang merah, dan cabai; (3) bersinergi dengan seluruh instansi terkait; (4) penerapan sistem *reward and punishment*; (5) mengawal dan mendampingi UPSUS secara masif; (6) pengendalian impor untuk memberikan insentif kepada petani; (7) antisipasi dini banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT); dan (8) IB untuk 3,0 juta sapi dan produksi *straw* tidak seluruhnya diekspor.

Disamping kebijakan tersebut memberikan hasil yang nyata, upaya khusus (UPSUS) percepatan swasembada pangan juga telah memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan produksi dan ekspor pangan. Dalam tiga tahun pelaksanaan kegiatan di lapangan memberikan dukungan dalam percepatan pencapaian swasembada pangan tersebut. Hasil lain dari dampak kebijakan tersebut adalah : (1) tenaga kerja dapat dihemat 70-80% dan biaya produksi dapat dihemat 30%; (2) semangat dan sinergi kerja meningkat, serta lebih kompak; (3) *losses* turun dari 10% menjadi 2%; dan (4) pendapatan petani meningkat. (Sumber: Pusdatin Kementan, 2017)

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi padi tahun 2017, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Air

Kegiatan Pengembangan infrastruktur air meliputi pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier, pembangunan embung, dam parit, long storage, irigasi perpipaan/perpompaan, dan irigasi rawa. Pada TA 2017 telah dialokasikan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi tersier seluas 100.000 Ha dan terealisasi seluas 99.925 Ha (99,99) (Gambar 6.); embung, dam parit, dan *long storage* sebanyak 500 unit dan terealisasi 487 unit (97,40%), Irigasi perpipaan/perpompaan sebanyak 500 unit dan terealisasi 496 unit; dan irigasi rawa seluas 10.000 yang terealisasi 100%.



Gambar 7. Presiden Jokowi meninjau pembangunan saluran irigasi tersier 130 Hektar yang terletak di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, 6 Des 2017

2. Perluasan Sawah

Perluasan areal sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Pada TA 2017 telah dialokasikan kegiatan perluasan sawah dengan target awal seluas 72.033 Ha (Gambar 8.) dan terealisasi seluas 60.243 Ha (83,63%).



Gambar 8. Kegiatan Perluasan Sawah di Desa Dombeyoha Kecamatan Ladongi, Kolaka Sulawesi Tenggara

3. Penerapan Budidaya Padi

Di tahun 2017, kegiatan penerapan budidaya padi dialokasikan pada areal seluas 879.514 Ha dengan anggaran sebesar Rp557.703.063.000,-. Fasilitasi bantuan kegiatan yang diberikan berupa sarana produksi paket lengkap meliputi sarana produksi benih, pupuk, dan pestisida. Sampai dengan akhir tahun, realisasi tanam mencapai 830.285 Ha (94,40 %) dan realisasi anggaran sebesar Rp493.915.721.000,- (88,56%).

4. Bantuan benih

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas, salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat. Untuk mendorong penggunaan benih varietas unggul bersertifikat, maka dilakukan perbanyak benih dari varietas unggul yang telah dilepas, baik benih sumber maupun Benih Sebar (BR), pemberian bantuan benih padi inbrida, pengembangan dan penguatan desa mandiri benih, serta penyediaan fasilitasi bantuan benih pemerintah (benih bersubsidi, CBN). Kegiatan mandiri Benih dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan penangkar benih di pedesaan, sehingga dapat mengatasi kebutuhan benih yang berkualitas dan tepat waktu di lokasi.

- a. Perbanyak benih sumber padi terealisasi 273 Ha atau 93,17% dari target 293 Ha.
- b. Realisasi penyaluran bantuan benih padi inbrida sebanyak 235.735 Ton atau 47,15% dari target 500.000 Ton, dan realisasi anggaran Rp55.774.545.000,- dari pagu sebesar Rp126.838.328.000,-.
- c. Kegiatan pengembangan desa mandiri benih telah dilaksanakan di lokasi baru sebanyak 200 unit/desa atau 100% tercapai dari target, dengan luas areal 2000 Ha (@ 10 Ha per unit). Selain itu, sebagai lanjutan kegiatan tahun 2015 dan 2016, juga dilakukan penguatan desa mandiri benih seluas 91.500 Ha atau 83,03% dari target seluas 110.200 Ha.
- d. Selain mengelola APBN Sektoral, pada tahun 2017 Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan juga mengelola anggaran subsidi benih (BA 999.07) dengan total pagu kontrak sebesar Rp1.162 Triliun, dengan pelaksana PT. Sang Hyang Seri. Realisasi penyaluran benih bersubsidi sebesar Rp764,69 Miliar atau 65,81% dari pagu kontrak. Rendahnya serapan anggaran subsidi benih disebabkan oleh rendahnya minat petani karena banyaknya bantuan benih gratis yang diberikan melalui paket kegiatan penerapan budidaya dan bantuan benih melalui DIPA Pusat, disamping itu kurangnya kemampuan BUMN pelaksana PSO subsidi benih dalam menyediakan dan menyalurkan benih tepat waktu dan varietas.

5. Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) ini adalah unit bangunan fasilitasi terpadu untuk pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik). Pada tahun 2017 telah dialokasikan pembangunan UPPO sebanyak 1500 unit yang terealisasi 1409 unit (99,93%). Kontribusi kegiatan ini untuk mendukung sub sector tanaman pangan khususnya kegiatan pengembangan desa pertanian organik untuk padi di lokasi setempat. Penggunaan pupuk organik dimaksudkan untuk memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian serta melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.

6. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Bantuan alat dan mesin pertanian terdiri dari pra panen dan pasca panen (Gambar 8). Total bantuan alsintan pra panen tahun 2017 adalah sejumlah 250.311 unit dan terealisasi sejumlah 193.619 unit (77,35%), meliputi: traktor roda 2 sejumlah 14.615 unit, traktor roda 4 sejumlah 1572 unit, pompa air sejumlah 13.598 unit, *cultivator* sejumlah 1608 unit, *Rice Tranplanter* sejumlah 1730 Unit, *cultivator* sejumlah 1604 unit, dan Hand sprayer sejumlah 10.500 unit. Untuk alsintan pasca panen sebanyak 4631 unit, mencakup: *power thresher*, *combine harvester kecil*, *combine harvester sedang*, *combine harvester besar*, *moisture tester*, dan *vertical dryer* beserta bangunan.



Gambar 9. Bantuan Alsintan berupa *Combine Harvester* Sedang

7. Pengendalian OPT dan DPI

- a. Dalam rangka pengamanan produksi padi dari gangguan serangan OPT, dilaksanakan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT). Penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) adalah pengendalian hama dan penyakit dengan pendekatan ekologi ramah lingkungan sesuai prinsip PHT (budidaya tanaman sehat, memanfaatkan musuh alami, pengamatan rutin dan petani sebagai ahli PHT) menggunakan agens pengendali hayati (APH), pestisida nabati dan benih refugia. Realisasi kegiatan mencapai 14.950 Ha atau 96,92% dari target 15.425 Ha di 33 propinsi, dan realisasi anggaran Rp19.151.517,- atau 95,98% dari pagu Rp19.952.625,-.
- b. Dalam rangka mengurangi risiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan), dilaksanakan kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) yang berupa lahan usahatannya dengan pembuatan biopori untuk daerah rawan banjir dan pembuatan sumur pantek untuk daerah yang rawan kekeringan dengan target seluas 360 ha dengan alokasi anggaran Rp1.390.275.000,-.

Realisasi kegiatan mencapai areal seluas 360 Ha (100%), dan realisasi anggaran Rp1.358.798.000,- (97,74%). Kegiatan PPDPI ini mampu mengamankan 75% produksi tanaman padi.

- c. Dalam upaya menekan populasi OPT sehingga serangan OPT tidak meluas, dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT padi. Gerakan ini dilakukan oleh Brigade Proteksi Tanaman dan TNI. Di tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT sebanyak 593 kali atau 100% dan realisasi anggaran Rp5.987.772.000 atau 99,40% dari pagu Rp6.047.585.000,-.
- d. Penguatan agroekosistem adalah gerakan pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan agens hayati, pestisida nabati, MOL, PGPR, dan benihrefugia yg didapat dr LPHP. Bantuan ini merupakan trigger untuk memotivasi petani agar mengembangkan lebih luas lagi dalam upaya pengamanan produksi
- e. Dalam rangka meningkatkan akurasi pengamatan dan peramalan OPT, pada tahun 2017 telah berhasil dikembangkan model teknologi Pengamatan Peramalan Pengendalian OPT sebanyak 9 model teknologi padi. Model peramalan tersebut merupakan pelengkap dari model yang selama ini telah dikembangkan dan diaplikasikan di lapangan.

8. Asuransi Usaha Tani Pertanian.

Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya. Pada tahun 2017 telah dialokasikan asuransi usaha tani untuk lahan seluas 1.000.000 Ha dengan pagu Rp144.000.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 997.960 Ha

(99,80) dan realisasi anggaran senilai Rp143.706.318,- (99,80%).

9. Inovasi dan Teknologi

Dalam pengembangan inovasi dan teknologi padi, Selama tahun 2017 telah dilepas sebanyak 5 VUB padi yang sesuai untuk padi sawah dan padi gogo. Varietas unggul baru yang dihasilkan oleh BB Padi pada 2017 adalah 2 (dua) VUB padi gogo toleran naungan yaitu Rindang 1 dan Rindang 2 Agritan, 1 (satu) VUB padi mutu tipe Japonica yaitu Tarabas, dan 2 (dua) VUB padi perbaikan padi Kewal lebih genjah yang bernama Mustaban Agritan dan Munawacita Agritan (Gambar 10).



Gambar 10. VUB Padi Rindang Agritan 1 dan Tarabas

Kementerian Pertanian melalui Balitbangtan juga menghasilkan teknologi dan inovasi peningkatan produksi padi yaitu Formulasi Biopestisida, Sistem Tanam Jajar Legowo Ganda, Sistem Tanam Larikan Gogo, Teknologi Beras Campuran, dan Teknologi peningkatan ketahanan varietas padi terhadap varian virus tungro spesifik. Selain itu Balitbangtan juga menghasilkan alat dan sarana dalam mendukung produksi padi diantaranya Pengembangan Paket Alsintan Pendukung Agribisnis Padi Sawah Beririgasi pada Luasan Lahan 100 Hektar, Mesin Tanam Padi Jajar Legowo Tipe Mini Untuk Lahan Sempit Dan Berbukit, Mesin Pengolah Tanah Tipe Ampibi (Rotavator), dan Rekayasa dan Pengembangan Teknologi Penggilingan Padi Mobile untuk Peningkatan rendemen dari 56%

menjadi 62% (Gambar 11).



Gambar 11. Teknologi Inovasi dan Mekanisasi Tanaman Padi

Disamping itu Balitbangtan melalui Unit Produksi Benih Sumber (UPBS) juga telah menghasilkan 858,88 ton benih sumber yang terdiri dari beberapa varietas dan kelas benih (NS, BS, BD, dan BP). Benih sumber beberapa varietas unggul padi tersebut telah disebar di beberapa daerah melalui BPTP.

Berbagai kegiatan pendukung pencapaian peningkatan produksi padi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di tahun 2017 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Padi Tahun 2017

No	Kegiatan Padi	Fisik			Anggaran (000 Rp)			Capaian Realisasi (%)
		Satuan	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	
Program Ditjen Tanaman Pangan								
1	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	Ha	879,514	830,285	94.40	557,703,063	493,915,721	88.56
2	Perbanyakan Benih Sumber Padi	Ha	293	273	93.17	16,109,356	15,197,314	94.34
3	Penguatan Desa Mandiri Benih	Ha	11,020	9,150	83.03	59,877,543	59,520,184	99.40
4	Pengembangan Desa Mandiri Benih	Ha	2,000	2,000	100.00			
5	Pemantapan Penerapan PHT	Ha	15,425	14,950	96.92	19,952,625	19,151,517	95.98
6	Pemantapan Penanganan DPI	Ha	360	360	100.00	1,390,275	1,358,798	97.74
7	Gerakan Pengendalian OPT (Reguler+TNI)	Kali	593	593	100.00	6,047,585	5,987,772	99.01
8	Sarana Pasca Panen Padi	Unit/Paket	4,643	4,631	99.74	1,313,459,908	1,237,247,646	94.20
9	UPPO	unit	1,500	1,499	99.93	262,500,000	262,269,924	99.91
10	Penguatan Agroekosistem Padi	Ha	7,175	7,025	97.91	2,491,125	2,414,760	96.93
11	Bantuan Benih Padi Inbrida DIPA Pusat	Ha	500,000	235,735	97.91	126,838,328	55,774,545	43.97
Program Ditjen PSP								
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	unit	100,000	99,995	99.99	117,215,000	117,209,000	99.99
2	Pengembangan Irigasi Perpipaan/Irigasi Perpompaan	unit	500	496	99.2	40,000,000	39,680,000	99.20
3	Pengembangan Irigasi Rawa	Ha	10,000	10,000	100	30,000,000	29,823,000	99.41
4	Pengembangan/Pelaksanaan Konservasi Air dan Lingkungan Hidup serta Antisipasi Perubahan Iklim	unit	500	487	97.40	50,000,000	49,000,000	98.00
5	Alat/Mesin Pertanian Pra Panen		250,311	193,619	77.35	2,236,223,870	1,079,180,612	
	-Traktor Roda 2	unit	15,405	14,615	94.87	431,340,000	355,939,090.5	82.52
	-Traktor Roda 4 Tanaman Pangan	unit	3,000	1,572	52.40	1,209,000,000	488,481,308.8	40.40
	-Pompa Air	unit	15,253	13,598	89.15	381,325,000	136,774,781	35.87
	-Rice Transplanter	unit	2,057	1,730	84.10	164,560,000	79,596,016	48.37
	- Seeding Tray	unit	200,000	150,000	75.00	9,000,000		
	-Cultivator	unit	1,618	1,604	99.13	29,124,000	15,999,716	54.94
	- Hand Sprayer	unit	12,978	10,500	80.91	11,874,870	2,389,700	20.12
6	Cetak Sawah	Ha	72,033	60,243	83.63	1,178,397,000	1,008,454,686	85.58
9	Asuransi Usaha Tani Padi	Ha	1,000,000	997,960	99.80	144,000,000	143,706,317.76	99.80
10	Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah	Ha	135,955	125,608	92.39	203,992,500	187,092,305.87	91.72
11	Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu	Ha	3,900	3,529	90.49	15,600,000	13,816,000	88.56
12	Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian	Ha	80,000	67,652	84.57	16,000,000	12,773,759	79.84
Program Badan Litbang								
1	Perakitan Varietas Unggul Padi gogo, ampbi, hibrida, inbrida potensi hasil tinggi dan fungsional	varietas	5	5	100	2,848,605	2,830,040	99.35
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Padi	teknologi	6	6	100	2,785,835	2,783,980	99.93
3	Penyelesaian Benih Sumber	ton	928	858.88	92.55	11,347,702	10,951,836	96.51
4	Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih	Provinsi	15	15	100	2,040,000	2,010,000	98.53
5	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Padi	Teknologi	2	3	150	695,000	690,391	99.34
Pengawasan dan Pendampingan UPSUS						544,268,602	450,174,372	82.71
TOTAL						6,961,783,922	4,852,840,109	69.71

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, dan Badan Litbang Pertanian, 2017
 Keterangan: Pagu dan realisasi perbanyakan benih sumber padi termasuk didalamnya anggaran untuk perbanyakan benih sumber jagung dan kedelai

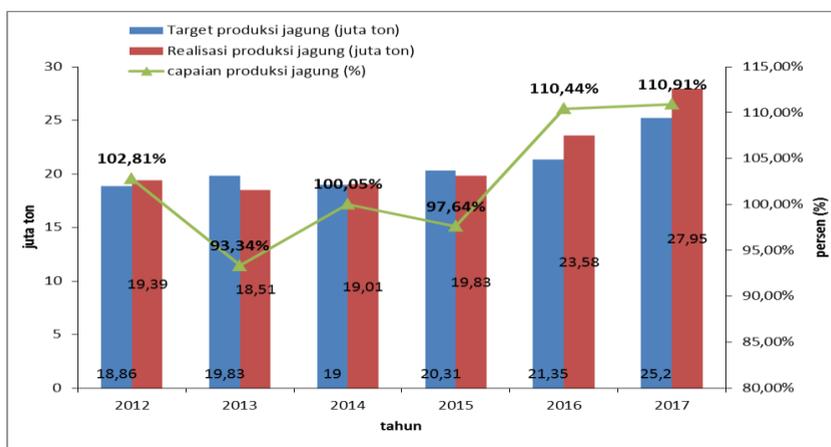
Untuk mendukung upaya pencapaian produksi padi nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp6.961.783.922.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp4.852.840.109.000,- atau secara persentase sebesar 69,71%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi padi, terdapat efisiensi sebesar 15,25%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi padi dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

SS 1. IKU 2 Produksi Jagung	Target 25,20 juta ton PK Realisasi 27,95 juta ton PK	% Capaian 110,91% Sangat Berhasil
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Keterangan: PK = Pipilan Kering

Produksi jagung pada tahun 2017 masuk kategori sangat berhasil karena mencapai 27,95 juta ton pipilan kering atau 110,91% dari target 25,20 juta ton pipilan kering. Capaian produksi jagung tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 23,58 juta ton pipilan kering atau 18,53%. Produksi jagung tahun 2017 juga merupakan pencapaian produksi tertinggi selama 5 tahun terakhir (Gambar 12).

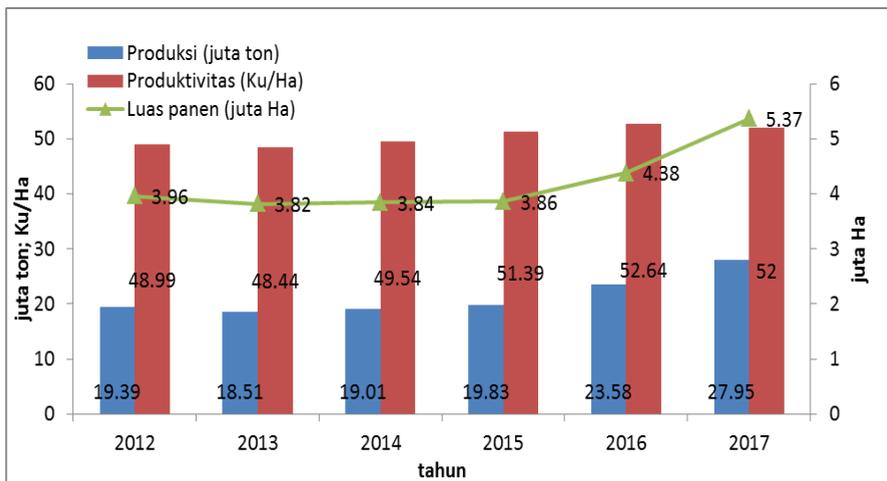


Gambar 12. Capaian Kinerja Produksi Jagung Tahun 2012-2017

Capaian produksi jagung dari tahun 2012 hingga tahun 2017 cenderung fluktuatif. Realisasi produksi jagung melebihi target di tahun 2012, 2014, 2016, dan 2017. Target tahun 2012 menurun dari

22 juta ton pipilan kering menjadi 18,86 juta ton pipilan kering diantaranya sebagai dampak dari *La Nina* yang terjadi tahun 2011 dan untukantisipasi atas Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2011 tentang pengamanan produksi pangan nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim. Secara umum, capaian target produksi jagung selama 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 19,39 juta ton pipilan kering pada tahun 2012 menjadi 27,95 juta ton pipilan kering pada tahun 2017.

Capaian produksi jagung tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh peningkatan luas panen jagung dan produktivitas. Gambar 13. memperlihatkan bahwa produktivitas dan luas panen jagung juga menunjukkan tren meningkat selama 2012-2017. Pada 2015, perluasan areal lahan jagung dilakukan melalui pemanfaatan lahan Perhutani, sementara di tahun 2016 dan 2017 melalui integrasi lahan jagung dan lahan sawit.



Gambar 13. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2012-2017

Integrasi perkebunan kelapa sawit dan jagung merupakan salah program unggulan Kementerian Pertanian dengan target terjadi tambahan luas tanam jagung sebesar 1 juta hektar hingga akhir tahun 2017. Di tahun 2016 telah dilaksanakan integrasi jagung dan sawit di lahan seluas 233.600 Ha dan mencapai 1.010.933 Ha pada

tahun 2017. Sejalan dengan isu moratorium sawit, beberapa daerah sentra telah melakukan penderasan program Replanting perkebunan sawit rakyat. Sawit yang di replanting adalah sawit yang berumur di atas 20 tahun. Selama periode sawit tersebut belum produktif, sampai dengan umur 3-4 tahun, petani sawit belum memiliki pendapatan dari sawitnya.

Selama menunggu sawit berbuah, petani dapat dibantu dengan menanam tanaman sela yaitu jagung yang dapat ditanam antara 10 sampai 12 kali musim tanam dengan provitas 4-5 ton/ha, yang pastinya akan mendongkrak produksi jagung nasional. Di Pasaman Barat misalnya, integrasi tanaman perkebunan – tanaman pangan tersebut hingga ini sudah berjalan sebanyak 1.600 ha (Gambar 14). Selain kelapa sawit, integrasi juga dilakukan dengan tanaman karet.



Gambar 14. Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Jagung di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

Selain dikarenakan peningkatan luas panen, peningkatan produksi jagung juga dikarenakan peningkatan produktivitas. Produksi jagung pada tahun 2012 sebesar 19,39 juta ton, naik secara signifikan sebesar 8,55 juta ton atau menjadi 27,95 juta ton di tahun 2017. Produktivitas jagung meningkat dari 48,99 Ku/Ha pada tahun 2012

menjadi 52 Ku/Ha pada tahun 2017.

Realisasi produksi jagung pada tahun 2017 sebesar 27,95 juta ton telah melampaui target produksi jagung pada tahun 2019 yaitu 27,8 juta ton (100,36%). Untuk itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2017 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Pada tahun 2017, sesuai data FAO bahwa produksi jagung Indonesia naik peringkat menjadi pada urutan ke-7 dunia, naik dua tingkat dari peringkat 9 pada tahun 2014. Peningkatan tersebut diukur dari keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi jagung yang diukur dengan satuan bushel (satu bushel sama dengan 25,40 kilogram) sebagai unit volume kering dalam perdagangan komoditas pertanian khususnya di Amerika Serikat dan Eropa. Data FAO menunjukkan bahwa pada tahun 2014 produksi jagung Indonesia hanya 748,32 ribu bushel, pada tahun 2017 sesuai Perkiraan ARAM II BPS, produksi jagung Indonesia mencapai 27,95 juta ton atau setara 1,1 miliar bushels. Peningkatan produksi yang sangat signifikan tersebut sebagai dampak dari program UPSUS melalui pengembangan jagung 3 juta hektar, integrasi sawit/kebun dan perhutani dengan jagung, kemitraan antara Gabungan Perusahaan Pakan Ternak (GPMT) dengan petani jagung dan kebijakan harga bawah di tingkat petani.

Berbagai kegiatan pendukung pencapaian produksi jagung di tahun 2017, antara lain:

1. Fasilitas Budidaya Jagung

Tujuan dari kegiatan pendukung ini adalah meningkatkan produksi jagung melalui penambahan luas areal tanam baru jagung (PAT) dan penambahan luas tanam jagung (PIP) pada lahan-lahan perkebunan, kehutanan, perhutani/inhutani, lahan milik BUMN, TNI, POLRI dan lain-lain yang sebelumnya tidak pernah ditanami jagung atau sebelumnya pernah ditanami jagung tetapi kemudian tidak ditanami lagi (Gambar 15)

Capaian realisasi tanam penerapan budidaya jagung mencapai areal seluas 2.816.563 Ha atau 93,89% dari target 3.000.000 Ha di, serta

realisasi anggaran sebesar Rp1.963.315.532.000,- atau 86,18% dari pagu Rp2.278.170.159.000,-.



Gambar 15. Kegiatan Budidaya Jagung Tahun 2017 di Provinsi Bengkulu

2. Bantuan Benih

Di tahun 2017, kegiatan bantuan benih dilakukan melalui perbanyak benih sumber jagung terealisasi 87 Ha atau 93,55% dari target 93 Ha.

3. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Pada tahun 2017, dialokasikan bantuan sarana pascapanen jagung sebanyak 2359 unit dengan anggaran Rp104.002.186.000,-. Realisasi penyaluran bantuan mencapai 100% yang terdiri dari *Corn Combine Harvester* dan *Corn Sheller*.

4. Pengendalian OPT dan HPT

- a. Dalam rangka pengamanan produksi jagung dari gangguan serangan OPT, dilaksanakan kegiatan Pemantapan Penerapan

Pengendalian Hama Terpadu (PPHT). Penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) adalah pengendalian hama dan penyakit dengan pendekatan ekologi ramah lingkungan sesuai prinsip PHT (budidaya tanaman sehat, memanfaatkan musuh alami, pengamatan rutin dan petani sebagai ahli PHT) menggunakan agens pengendali hayati (APH), pestisida nabati dan benih refugia. Realisasi kegiatan mencapai 570 Ha atau 92,68% dari target 615 Ha dan realisasi anggaran Rp892.463.000,- atau 88,88% dari pagu Rp1.004.125.000,-.

b. Dalam upaya menekan populasi OPT sehingga serangan OPT tidak meluas, dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT jagung. Gerakan ini dilakukan oleh Brigade Proteksi Tanaman dan TNI. Di tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT sebanyak 143 kali atau 97,95% dan realisasi anggaran Rp5.987.772.000 atau 99,40% dari pagu Rp6.047.585.000,-.

c. Penguatan Agroekosistem

Penguatan agroekosistem adalah gerakan pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan agens hayati, pestisida nabati, MOL, PGPR, dan benihrefugia yg didapat dr LPHP. Bantuan ini merupakan trigger untuk memotivasi petani agar mengembangkan lebih luas lagi dalam upaya pengamanan produksi. Pada tahun 2017 telah dilakukan penguatan agroekosistem pada lahan seluas 270 Ha dengan anggaran sebesar Rp153.125.000,-.

d. Dalam rangka meningkatkan akurasi pengamatan dan peramalan OPT, pada tahun 2017 telah berhasil dikembangkan model teknologi Pengamatan Peramalan Pengendalian OPT sebanyak 3 model teknologi jagung. Model peramalan tersebut merupakan pelengkap dari model yang selama ini telah dikembangkan dan diaplikasikan di lapangan.

5. Inovasi dan Teknologi

Dalam pengembangan inovasi dan teknologi, Kementerian Pertanian

telah merakit 2 (dua) varietas unggul baru jagung hibrida toleran lahan sub optimal mendukung swasembada pangan berkelanjutan dengan nama Nakula Sadewa 29 dan Srikandi Andi Depu 2. Selain itu, juga telah dihasilkan teknologi Budidaya Jagung Hibrida Nasa 29, Teknologi Pengendalian Penyakit Bulai pada Jagung, Pengembangan Prototipe Mesin Combine untuk Tanaman Jagung dan Pengembangan Mesin Penyiapan Lahan dan Penanam Biji-bijian Terintegrasi



VUB jagung Nakula Sadewa (NASA 29) bertongkol 2



CVUB Srikandi Andi Depu 2 berbiji ungu hitam



Pemanfaatan *Combine* di Kec Toroh, Grobogan, Jawa Tengah



Prototipe mesin penyiapan lahan dan penanaman biji-bijian

Gambar 16. Inovasi Dan Teknologi Tanaman Jagung yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian

Di tahun 2017, Unit Produksi Benih Sumber (UPBS) telah menghasilkan 142,2 ton benih sumber jagung yang terdiri dari beberapa varietas dan kelas benih. Benih sumber tersebut telah disebar di beberapa daerah melalui BPTP.

Secara rinci kegiatan pendukung terkait pencapaian produksi jagung dapat dilihat pada Tabel.7

Tabel 7. Kegiatan untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Jagung

No.	Kegiatan Padi	Fisik	Anggaran (000 Rp)					
			Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi
Program Ditjen Tanaman Pangan								
1	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	Ha	3.000.000	2.816.563	93,89	2.278.170.159	1.963.315.532	86,18
2	Perbanyak Benih Sumber Jagung	Ha	93	87	93,55			
3	Pemantapan Penerapan PHT	Ha	615	570	92,68	1.004.125	892.463	88,88
4	Gerakan Pengendalian OPT Reguler	Kali	146	143	97,95	1.389.140	1.345.474	96,86
5	Sarana Pascapanen Jagung	Unit/Paket	2.359	2.359	100,00	104.002.186	99.656.292	95,82
6	Penguatan Agroekosistem Jagung	Ha	285	270	94,74	162.500	153.125	94,23
Program Badan Litbang								
1	Perakitan Varietas Unggul Jagung lahan sub optimal dan optimal (varietas)	varietas	2	2	100,0	1.800.000	1.744.606	96,92
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Jagung (teknologi)	teknologi	1	1	100,0	400.000	394.701	98,68
3	Penyediaan Benih Sumber (ton)	ton	287,9	142,2	49,4	6.426.535	6.184.923	96,24
4	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Jagung (Teknologi)	teknologi	1	1	100,0	280.000	266.618	95,22
TOTAL						2.393.634.645	2.073.953.734	86,64

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Litbang 2017

Keterangan: Pagu dan realisasi perbanyak benih sumber jagung termasuk di dalam pagu dan realisasi benih sumber padi.

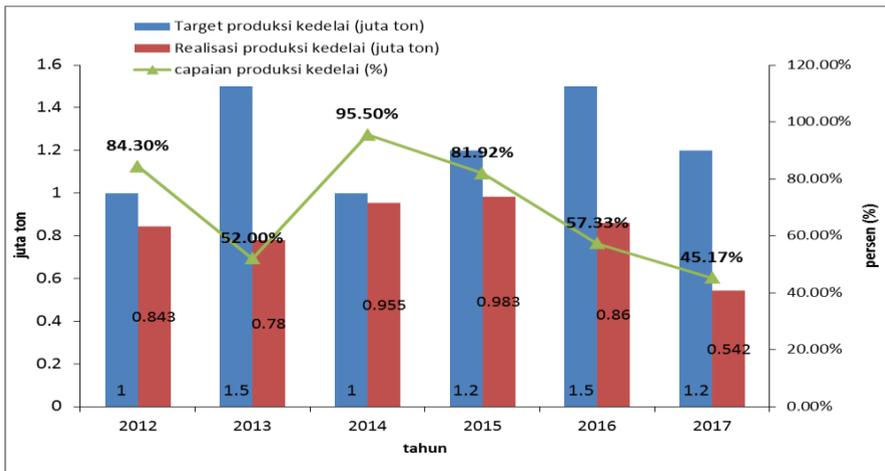
Untuk mendukung upaya pencapaian produksi jagung nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp2.393.634.645.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp2.073.953.734.000,- atau secara persentase sebesar 86,64%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi jagung, terdapat efisiensi sebesar 8,54%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi jagung dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

SS 1. IKU 3 Produksi Kedelai	Target 1,2 juta ton PK Realisasi 542 ribu ton PK	% Capaian 45,17 % Kurang Berhasil
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Keterangan: PK = Pipilan Kering

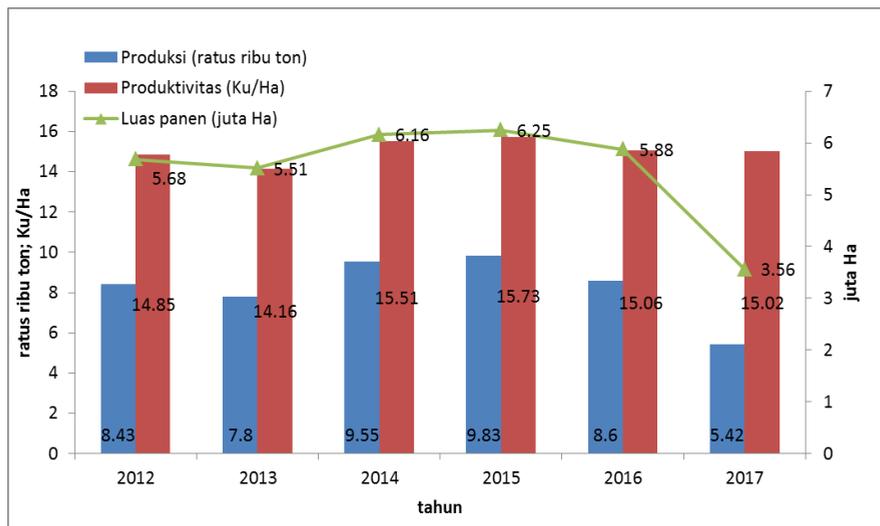
Produksi kedelai tahun 2017 sebesar 542 ribu ton atau sebesar 45,17% dari target 1,2 juta ton, sehingga masuk kategori kurang berhasil. Capaian kinerja produksi kedelai tahun 2012 hingga 2017 disajikan pada Gambar 17.



Gambar 17. Capaian Kinerja Produksi Kedelai Tahun 2012-2017

Produksi kedelai tahun 2012 hingga tahun 2017 menunjukkan tren penurunan, walaupun tren ini kembali naik pada tahun 2014 dan tahun 2015 dan turun kembali pada tahun 2016-2017. Realisasi produksi tahun 2017 sebesar 542 ribu ton mengalami penurunan sebesar 36,98 % dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 860 ribu ton. Capaian kinerja produksi kedelai dalam 6 (enam) tahun terakhir belum mencapai target. Capaian kinerja produksi kedelai terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 45,17%, sedangkan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 95,50%.

Capaian kinerja ini tentunya sangat dipengaruhi oleh produktivitas dan luas panen kedelai sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 18.



Gambar 18. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2012-2017

Gambar 18 menunjukkan adanya korelasi positif antara produktivitas dan luas panen kedelai dengan produksi kedelai, dimana produktivitas dan luas panen meningkat bersamaan dengan meningkatkan produksi kedelai.

Dibandingkan target produksi kedelai tahun 2019 sebesar 2,76 juta ton, maka realisasi produksi kedelai pada tahun 2017 sebesar 542 ribu ton baru mencapai 19,64%. Melihat belum tercapainya persentase capaian kedelai di tahun 2017 dibandingkan target tahun 2019, Kementerian Pertanian akan melakukan berbagai upaya-upaya yang lebih besar dan nyata dalam rangka meningkatkan produksi kedelai selama dua tahun ke depan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran produksi kedelai di tahun 2017, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan, antara lain:

1. Fasilitas Budidaya Kedelai

Fasilitas penerapan budidaya kedelai bertujuan untuk meningkatkan produksi kedelai nasional melalui berbagai upaya yang didukung oleh anggaran APBN dan APBN-P. Melalui anggaran APBN, dialokasikan bantuan budidaya kedelai seluas 216.770 ha untuk beberapa kegiatan, antara lain produksi pola tanam terpadu spesifik lokasi (PTT), penerapan teknologi budidaya jenuh air (BJA) dan Optimalisasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) pada lahan sawah maupun lahan kering termasuk pemanfaatan lahan terlantar (bera), lahan bukaan baru, kerjasama pemanfaatan lahan perhutani, hutan tanaman rakyat, perkebunan, lahan transmigrasi, dan lahan potensial lainnya dengan system monokultur maupun tumpangsari. Dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar 500.000 Ha digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai dengan memanfaatkan lahan bera, lahan tidur, lahan pasang surut, lahan perkebunan, lahan Perhutani, serta lahan yang telah dipakai untuk program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) Jagung (Gambar 19)



Gambar 19. Gerakan Tanam Perdana Kedelai di Provinsi Kalimantan Selatan

2. Bantuan Benih

Kegiatan bantuan benih terdiri dari perbanyak benih sumber kedelai dengan realisasi perbanyak benih sumber kedelai mencapai areal seluas 177 Ha atau 93,65% dari target 189 Ha.

3. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

- a) Dalam rangka pengamanan produksi kedelai dari gangguan serangan OPT, dilaksanakan kegiatan Pemantapan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT). Realisasi kegiatan ini mencakup areal seluas 230 Ha atau 85,19% dari target 270 Ha, dengan realiasi anggaran sebesar Rp489.212.000 atau 87,64% dari pagu Rp558.225.000,- Kegiatan PPHT ini memberikan hasil menurunnya penggunaan pestisida kimia sintesis, meningkatnya perkembangan musuh alami dan meningkatnya penggunaan pengendali ramah lingkungan di hamparan pertanaman kedelai.
- b) Dalam upaya menekan perkembangan populasi OPT sehingga serangan OPT dapat diturunkan dan tidak meluas, dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT kedelai sebanyak 60 kali dengan anggaran Rp565.689.000,-.
- c) Penguatan agroekosistem merupakan gerakan pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan agens hayati, pestisida nabati, MOL, PGPR, dan benihrefugia yg didapat dr LPHP. Bantuan ini merupakan trigger untuk memotivasi petani agar mengembangkan lebih luas lagi dalam upaya pengamanan produksi. Pada tahun 2017 telah dilakukan penguatan agroekosistem pada lahan seluas 120 Ha dengan anggaran sebesar Rp103.625.000,-.

4. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Pada tahun 2017 dialokasikan bantuan sarana pascapanen kedelai sebanyak 828 unit dengan anggaran Rp18.676.788.000,-. Penyaluran bantuan dapat terealisasi 100% yang berupa *power thresher* multiguna.

5. Inovasi dan Teknologi

Dalam upaya meningkatkan produksi kedelai, Kementerian Pertanian telah dilepas sebanyak 1 Varietas Unggul Baru (VUB) kedelai, Derap 1, yang memiliki keunggulan: potensi hasil 3,2 t/ha dengan rata-rata hasil 2,8 t/ha, tahan terhadap hama pengisap polong hingga 80% dan agak tahan hama penggerek polong, berukuran biji besar (17,6 gr/100 biji), umur masak genjah (76 hari), tahan terhadap pecah polong serta memiliki kandungan protein 39,2%. Selain mengembangkan VUB, juga telah dihasilkan inovasi baru berupa Teknologi budidaya kedelai tumpangsari dengan jagung pada lahan kering beriklim kering tanah alfisol mendukung pertanian bioindustri dan Teknologi pengendalian hama lalat batang (stem fly) melanagromyza sojae zehnter. (Gambar 20)



Bentuk Tanaman dan Biji VUB Derap 1



Keragaan pertumbuhan tanaman “Tumpangsari baris ganda jagung (varietas Pertiwi- 6) dengan Kedelai (Dena 1)” pada lahan kering iklim kering bertanah Alfisol di Kabupaten Probolinggo (Jawa Timur). musim hujan tahun 2017.

Gambar 20. Inovasi dan Teknologi Tanaman Kedelai

Di tahun 2017, Unit Produksi Benih Sumber (UPBS) telah menghasilkan 145,64 ton benih sumber kedelai yang telah disebar di beberapa daerah melalui BPTP.

Secara ringkas kegiatan pendukung untuk pencapaian produksi kedelai dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kegiatan untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi kedelai

No	Kegiatan Kedelai	Fisik				Anggaran (000 Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Tanaman Pangan								
1	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	Ha	716.770	607.002	84,69	965.971.752	815.977.433	84,47
2	Perbanyak Benih Sumber Kedelai	Ha	189	177	93,65			
3	Pemantapan Penerapan PHT	Hektar	270	230	85,19	558.225	489.212	87,64
4	Gerakan Pengendalian OPT Reguler	Kali	60	60	100	570.650	565.689	99,13
5	Sarana Pascapanen Kedelai	Unit	828	828	100	18.676.788	18.574.085	99,45
6	Penguatan Agroekosistem Kedelai	Hektar	120	100	83,33	103.625	85.000	82,03
Program Badan Litbang								
1	Perakitan Varietas Unggul Kedelai toleran pecah polong dan biji besar serta lahan pasang surut dan penggerek polong (varietas)	varietas	1	1	100	1.340.000	1.339.393	99,95
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Kedelai (teknologi)	teknologi	2	2	100	760.000	759.555	99,9414
3	Penyediaan Benih Sumber (ton)	ton	203	145,64	71,74	4.311.213	4.189.633	97,1799
4	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Kedelai (Teknologi)	teknologi	1	1	100	575.900	574.615	99,78
TOTAL						992.868.153	842.554.615	84,86

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan dan Badan Litbang 2017

Keterangan: Pagu dan realisasi perbanyak benih sumber kedelai termasuk di dalam pagu dan realisasi benih sumber padi.

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi kedelai nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp992.868.153.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp842.554.615.000,- atau secara persentase sebesar 84,86%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi kedelai, terdapat efisiensi sebesar 0,13%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi kedelai dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Secara umum, akar permasalahan dari belum tercapainya target

produksi kedelai adalah jatuhnya atau rendahnya harga kedelai, terbatasnya ketersediaan benih kedelai, tingginya serangan hama dan penyakit tanaman kedelai, keterbatasan alat pascapanen, dan adopsi teknologi petani yang masih rendah.

Untuk merespon berbagai permasalahan tersebut, maka berbagai solusi dapat disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan ke depan, antara lain: (1) menaikkan *branding* kedelai non rekayasa genetik yang diproduksi oleh petani, (2) Membatasi impor kedelai, (3) meningkatkan luas tanam kedelai di areal lahan baru, (4) memperkuat perlindungan tanaman kedelai dengan kegiatan PPHT kedelai, gerakan pengendalian OPT Kedelai dan penguatan agroekosistem, (5) dukungan alat pasca panen kedelai untuk menurunkan susut hasil, (6) meningkatkan ketersediaan benih kedelai unggul, dan (7) diseminasi pemanfaatan teknologi budidaya kedelai yang mudah dan murah

Secara ringkas, akar permasalahan dan rekomendasi solusi bagi upaya peningkatan produksi kedelai dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rekomendasi Solusi Untuk Akar Permasalahan Produksi Kedelai

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Penurunan areal tanam yang disebabkan oleh kurangnya gairah petani menanam kedelai karena harga kedelai ditingkat petani relatif rendah dan meningkatnya volume impor kedelai dengan harga yang murah.	(1) Menaikkan branding kedelai non rekayasa genetik yang diproduksi oleh petani. (2) Membatasi impor kedelai (3) Meningkatkan luas tanam kedelai di areal lahan baru
2	Terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu baik dari segi jumlah maupun kualitas	Meningkatkan produksi benih kedelai bersertifikat
3	Banyaknya peluang terjadinya serangan hama maupun penyakit sejak saat benih mulai tumbuh sampai panen dan pascapanen.	Memperkuat perlindungan tanaman kedelai dengan kegiatan PPHT kedelai, gerakan pengendalian OPT Kedelai dan penguatan agroekosistem
4	Ketersediaan alat, khususnya peralatan panen, pascapanen, dan sarana gudang penyimpanan yang masih sangat terbatas.	Dukungan alat pasca panen kedelai untuk menurunkan susut hasil.
5	Rendahnya adopsi teknologi di tingkat petani.	Diseminasi pemanfaatan teknologi budidaya kedelai yang mudah dan murah

Sumber: Ditjen TP, 2017

Kegiatan Dukungan untuk Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai

Selain beberapa kegiatan yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa kegiatan lain yang juga mendukung tercapainya peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, yaitu: bantuan pupuk bersubsidi serta pengawalan dan pendampingan upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi.

(1) Bantuan pupuk bersubsidi

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang sebagian besar biaya produksinya disubsidi oleh pemerintah, sehingga dapat dijual murah kepada petani dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET). Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani.

Pada TA 2017 telah dialokasikan bantuan pupuk bersubsidi sebesar 9.550.000 ton dan terealisasi sebesar 9.270.008 ton (97,07%) meliputi pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan organik. Anggaran untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini berasal dari Kementerian Keuangan dengan alokasi sebesar Rp29.832.523.953.419,- dan terealisasi sebesar Rp26.840.701.056.839

(2) Pengawalan dan Pendampingan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai

Pelaksanaan keseluruhan program upaya khusus tahun 2017 perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan untuk memastikan pelaksanaan UPSUS dapat memberikan dampak bagi kinerja Kementerian Pertanian tahun 2017. Beberapa program terkait pengawalan dan pendampingan meliputi:

a). Pendampingan Kegiatan oleh TNI AD

Dengan adanya Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) No 01/MOU/RC.120/M/1/2015 tentang Mewujudkan Kedaulatan Pangan tanggal 8 Januari 2015, maka dalam pencapaian kedaulatan pangan melalui program UPSUS Pajale dilibatkan

dukungan jajaran TNI. Dukungan dari jajaran TNI ini telah diwujudkan sejak persiapan pertanaman sampai pengawalan benih dan pupuk. Peran dari jajaran TNI adalah (1) menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan tanam serentak, perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi serta gerakan pengendalian OPT dan panen; (2) melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk penyaluran benih, pupuk dan alsintan serta infrastruktur jaringan irigasi; dan (3) melakukan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.

b). Pendampingan Penyuluh dan Perguruan Tinggi (Dosen dan Mahasiswa)

Dengan sasaran produksi pajale yang telah ditetapkan melalui dukungan kegiatan dan anggaran yang sangat besar, diperlukan pendampingan penyuluh dan perguruan tinggi. Petani sebagai penerima manfaat kegiatan sekaligus sebagai pelaku peningkatan produksi pajale diberikan pendampingan agar hasil yang dicapai dapat lebih efektif. Kontribusi atau peran dari pendampingan penyuluh dan perguruan tinggi pada pengawalan UPSUS Pajale ini sebagai berikut:

- Penyuluh

- 1) Melaksanakan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL, RJIT dan *demfarm*.
- 2) Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani (poktan, gapoktan, P3A dan GP3A) dan kelembagaan ekonomi petani.
- 3) Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pelaku usaha.

- Perguruan Tinggi (Dosen dan Mahasiswa)

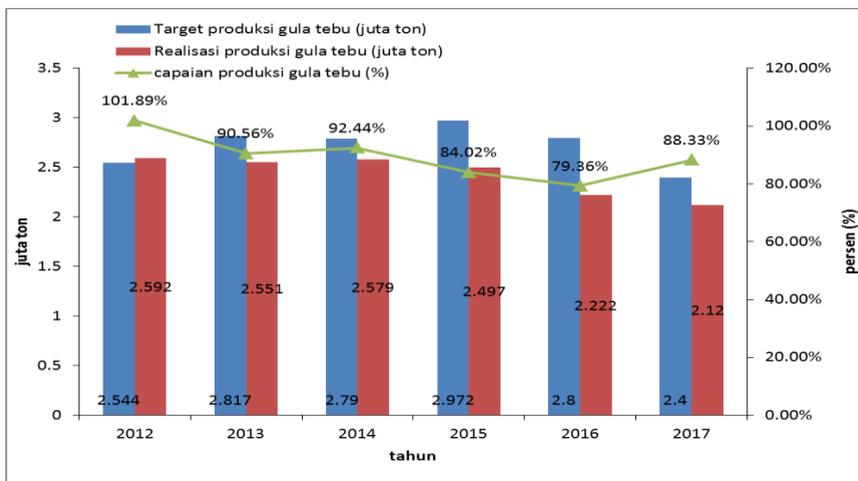
- 1) Membantu melaksanakan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan GP-PTT, POL, RJIT dan *demfarm*.

- 2) Membantu penyuluh dalam memfasilitasi introduksi teknologi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui *demfarm*.
- 3) Mengembangkan model pemberdayaan petani.

SS 1. IKU 4 Produksi Gula Tebu	Target 2,40 juta ton GKP Realisasi 2,12 juta ton GKP	% Capaian 88,33 % Berhasil
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Keterangan: GKP = Gula Kristal Putih / hablur

Target produksi gula tebu pada tahun 2017 adalah 2,40 juta ton hablur. Realisasi produksi gula tebu hingga akhir tahun 2017 mencapai 2,12 juta ton hablur atau sekitar 88,33% dari target tahun 2017. Persentase capaian indikator produksi gula tebu masuk kategori berhasil.

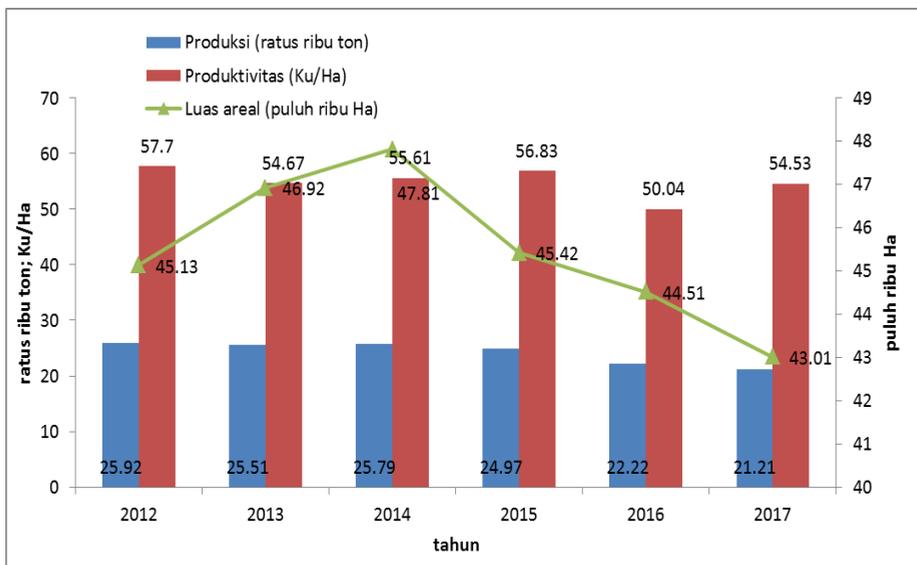


Gambar 21. Capaian Kinerja Produksi Gula Tebu Tahun 2012-2017

Gambar 21. memperlihatkan tren kinerja produksi gula tebu yang mencakup target, realisasi dan capaian selama tahun 2012-2017.

Capaian kinerja produksi gula tebu tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016, dimana tahun 2017 Kementerian Pertanian mencapai produksi gula tebu sebesar 2,12 juta ton hablur serta kurang dapat memenuhi target target 2,40 juta ton hablur yang ditetapkan atau sekitar 88,33%.

Kinerja produksi gula tebu jelas berkorelasi dengan produktivitas dan luas areal gula tebu, sebagaimana diperlihatkan Gambar 22.



Gambar 22. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Areal Gula Tebu Tahun 2012-2017

Gambar 22. menjelaskan bahwa lambatnya pertumbuhan produksi gula tebu dipengaruhi oleh pertumbuhan luas areal tebu dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir yang relatif stabil. Bahkan luas areal gula tebu mengalami penurunan dari 478 ribu Ha pada tahun 2014, 454 ribu Ha pada tahun 2015, dan 445 ribu Ha pada tahun 2016, hingga menjadi 430 ribu Ha pada tahun 2017.

Dibandingkan target produksi gula tebu tahun 2019 sebesar 3 juta ton, maka realisasi produksi gula tebu pada tahun 2017 sebesar 2,12 juta ton baru mencapai 70,67%. Oleh karena itu harus segera

dilakukan upaya-upaya yang lebih besar dan nyata dalam rangka meningkatkan produksi gula selama lima tahun ke depan. Apabila hal ini tidak dilakukan, target swasembada gula dikhawatirkan tidak akan tercapai.

Untuk mendukung peningkatan produksi gula tebu, di tahun 2017 Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan seperti:

1. Rawat Ratoon

Teknologi Rawat Ratoon Tebu adalah perawatan tanaman tebu setelah panen agar produktifitas panennya dapat dipertahankan. Rawat ratoon dilakukan apabila sisa tebangannya masih cukup tinggi dan tingkat produksi tebu masih menguntungkan. Pada TA 2017 telah dialokasikan rawat ratoon dialokasikan untuk 2250 Ha dan terealisasi 2150 Ha (95,56%)

2. *Mapping* ketersediaan air

Mapping ketersediaan air merupakan kegiatan yang bertujuan untuk penyediaan air di lahan tebu. Kegiatan ini dilaksanakan di empat Provinsi yaitu Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

3. Pendampingan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan

Pelaksanaan kegiatan di lapangan sangat memerlukan pendampingan dari petugas terhadap pekebun. Pada TA 2017, dilaksanakan pengawalan pendampingan tebu, pengawasan varietas tebu adaptif, dan bimbingan teknis petani dan alsintan.

4. Bantuan Peralatan

Peralatan sangat menentukan tingkat keberhasilan budidaya tanaman dan penanganan pasca panen. Peralatan tersebut antara lain pompa air, traktor roda 4, dan *grab loader*. Pada TA 2017, dilaksanakan kegiatan bantuan peralatan sebanyak 275 unit dan terealisasi sebanyak 260 unit.

6. Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD)

Benih merupakan komponen teknologi yang sangat penting dalam budidaya tanaman karena sangat menentukan tingkat produktivitas, dan mutu hasil. Penggunaan benih unggul bermutu pada tanaman tebu merupakan salah satu faktor penting dan secara langsung berdampak positif terhadap produktivitas tebu. Oleh karena itu



Gambar 23. Kebun Benih Datar di Gorontalo

penggunaan benih unggul bermutu menjadi keharusan bagi pelaku usaha (petani dan pabrik gula/PG). Benih harus dihasilkan dari kebun benih yang dikelola dengan baik dan dilakukan secara berjenjang. Benih yang dihasilkan dapat melalui perbanyakan secara

Konvensional (stek) dan asal Kultur Jaringan (laboratorium). Untuk tebu, produksi dan pengelolaan benih dilakukan secara berjenjang. Jenjang kebun Benih tebu konvensional, meliputi: Kebun Bibit Pokok Utama (KBPU), Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar (KBD) (Gambar 23). Pada TA 2017 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) seluas 370 Ha dan terealisasi seluas 107 Ha di 4 Provinsi.

5. Inovasi dan Teknologi

Dalam pengembangan inovasi dan teknologi, Kementerian Pertanian telah melepas 4 (empat) varietas tebu yaitu AAS Agribun, AMS Agribun, ASA Agribun, dan CMC Agribun (Gambar 24). Selain itu, juga telah dihasilkan untuk mendukung produktivitas tebu antara lain: Protokol perbenihan tebu RC-1, Teknologi pupuk NPK tebu PC, dan Pengendalian penyakit tebu melalui benih sehat (Pengendalian penyakit dengan Hot water Treatment (HWT) dan kultur meristem pada tanaman tebu)



AAS Agribun



AMS Agribun



ASA Agribun



CMG Agribun

Gambar 24. Varietas Tebu yang Dilepas Tahun 2017

Secara ringkas kegiatan pendukung untuk pencapaian produksi gula tebu dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kegiatan untuk Mendukung Tercapainya Peningkatan Produksi Gula Tebu Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Ditjen Perkebunan								
1	Rawat Ratoon	Ha	2250	2150	95,56	7.631.250.000	5.881.077.600	77,07
2	Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu TKP	Orang	556	556	100,00	18.708.387.000	16.718.478.000	89,36
3	Mapping ketersediaan air	Pkt	5	5	100,00	2.243.105.000	2.050.733.900	91,42
4	Pengawasan Pendampingan Tebu dan Pengadaan Sarana	Keg	10	10	100,00	1.425.460.000	1.319.071.600	92,54
5	Penerapan Varietas Tebu Adaptif di wilayah Pengembangan Baru	Pkt	4	4	100,00	1.375.000.000	1.120.360.700	81,48
6	Pengawasan Varietas Tebu Adaptif	Pkt	1	1	100,00	226.900.000	186.978.000	82,41
7	Bimbingan Teknis Petani dan Alsintan	Keg	2	2	100	438.350.000	416.297.200	94,97
8	Alat dan Mesin Pertanian	Unit						
	Grab Loader	Unit	41	41	100	41.026.880.375	37.304.628.125	90,93
	Traktor Roda 4	Unit	43	43	100	31.902.118.400	28.701.840.400	89,97
	Pompa Air	Unit	191	176	92,15	5.720.000.000	4.894.689.250	85,57
9	Pembangunan KBD Tebu	Ha	832	107	12,86	33.745.007.000	4.324.831.000	12,82
10	Fasilitasi Pengolahan Hasil Tebu	Unit	8	8	100,00	3.382.000.000	2.547.007.000	75,31
Program Badan Litbang								
1	Perakitan Varietas Unggul Tebu dengan Rendemen dan Produktivitas Tinggi di Lahan Kering	Varietas	1	4	400	190.000.000	189.527.500	99,75
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Tebu	Teknologi	2	3	150	155.000.000	154.126.700	99,44
3	Benh Sumber Tebu	Budget	1.500.000	1.525.000	101,67	205.000.000	204.970.773,00	99,99
Total						148.374.662.775	106.014.822.719	71,45

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi gula tebu nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp148.374.662.775,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp106.014.822.719,- atau secara persentase sebesar 71,45%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi gula tebu, terdapat efisiensi sebesar 11,68%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi gula tebu dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Selain kegiatan tahun 2017, pencapaian kinerja produksi gula di tahun 2017 sebagian juga merupakan dampak dari kegiatan yang dilakukan di tahun 2016 antara lain: rawat ratoon, perluasan lahan tebu, pengawalan kebun benih tebu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, serta bantuan peralatan (seperti: traktor, *dump truck*, truk bak kayu, *grab loader*, dan pompa air).

Akar permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya produksi gula tebu antara lain: (1) Pengembangan Tebu 90% di lahan Kering/marginal, (2) Sistem Budidaya belum Optimal, (3) Sulitnya memperoleh benih unggul, (4) Rendemen tidak Optimal, (5) Transparansi rendemen, (6) Sulit melakukan perluasan areal tebu (7) Lahan sempit dan terpencar, (8) Harga Gula tidak Stabil, (9) Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, (9) Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, (10) Dukungan lembaga riset pengembangan tebu kurang, dan (11) Minimnya investasi.

Berdasarkan analisis akar permasalahan tersebut, solusi yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi untuk dilakukan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Rekomendasi solusi untuk akar permasalahan produksi gula tebu

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Pengembangan Tebu 90% di lahan Kering/marginal	1. Penyediaan sumur dalam, embung, sumur dangkal, permukaan
2	Sistem Budidaya belum Optimal	2. Meningkatkan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan 3. Rehabilitasi Tanaman melalui bongkar ratoon dan rawat ratoon 4. Adopsi inovasi terbaru dari studi banding, penelitian dan percontohan atau demplot.
3	Sulitnya memperoleh benih unggul	5. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian dan sumber benih 6. Pembangunan benih unggul secara berjenjang dan terencana
4	Rendemen tidak Optimal	7. Revitalisasi PG 8. Menggunakan varietas unggul 9. Sistem budidaya sesuai rekomendasi teknis
5	Transparansi rendemen	10. Fasilitasi pengawas rendemen 11. Membentuk Tim Transparansi Rendemen 12. Pengawasan rendemen melibatkan petani, dinas terkait, Perguruan tinggi dan PG 13. Pengukuran rendemen individu menggunakan Core Sampler 14. melakukan manajemen tebang muat angkut yang benar
6	Sulit melakukan perluasan areal tebu	15. Meningkatkan Koordinasi dengan K/L terkait dengan pembebasan lahan 16. Melatih petani baru 17. Perluasan di lahan pengembangan
7	Lahan sempit dan terpecah	18. Melakukan regrouping lahan minimal 10 ha, bekerja sama dengan pemda dan BPN
8	Transparansi rendemen	19. Pengawasan rendemen melibatkan petani, dinas terkait, Perguruan tinggi dan PG
9	Harga Gula tidak Stabil	20. Menekan biaya produksi dengan full mekanisasi, regrouping lahan, manajemen tebang muat angkut, subsidi pupuk, insentif produksi gula tebu dan profesionalitas petani tebu 21. Membentuk Tim pengawasan pasar gula 22. Penguatan lembaga pemasaran bentukkan petani/klp tani tebu
10	Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan	23. Melatih tenaga kerja pertebuan 24. Meningkatkan kapabilitas SDM petugas teknis dan penyuluh dan petani tebu melalui pelatihan/traning 25. Profesionalisasi kelembagaan petani melalui pelatihan dan training

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
		26. Asosiasi tebu Indonesia di optimalkan
11	Terbatasnya SDA	27. Optimalisasi lahan 28. Optimalisasi penggunaan sumber daya air 29. Memanfaatkan iklim sebagai sumberdaya yang efisien 30. Menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung
12	Dukungan lembaga riset pengembangan tebu kurang	31. Pemberdayaan lembaga riset tebu yang sudah ada secara optimal
13	Minimnya investasi	32. Sosialisasi dan koordinasi dengan investor 33. Meningkatkan koordinasi sinergi dengan pihak-pihak terkait 34. Memfasilitasi investor baik secara administrasi maupun infrastruktur
14	Menyatukan persepsi yang sama terhadap kemajuan pembangunan pergulaan Nasional	35. Sosialisasi kepada seluruh stakeholders pergulaan dalam menyatukan persepsi. 36. Meningkatkan kebersamaan lembaga/instansi/organisasi terkait 37. Meningkatkan pemberdayaan petani/kelompoktani/koperasi/asosiasi pertebuan Indonesia

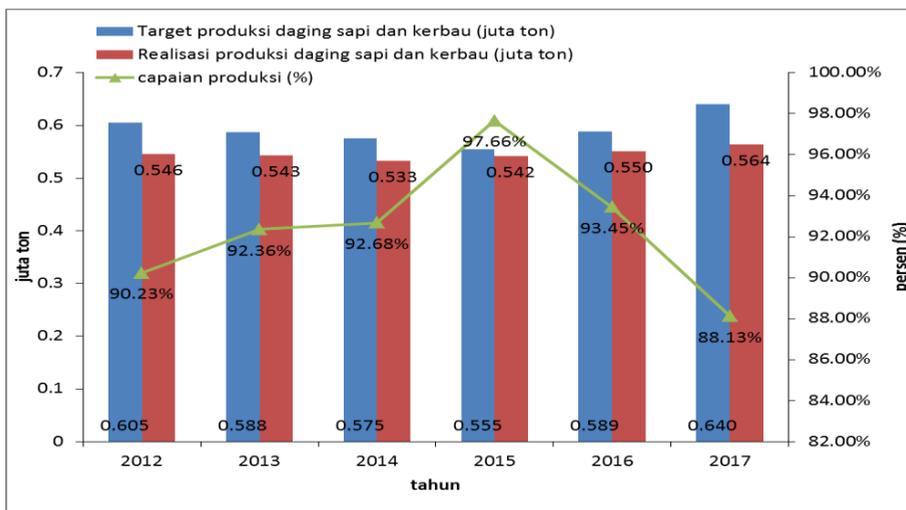
Sumber data: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017

SS 1. IKU 5 Produksi Daging Sapi dan Kerbau	Target 640 ribu ton karkas Realisasi 564,02 ribu ton karkas	% Capaian 88,13% Berhasil
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Keterangan: PK = Pipilan Kering

Produksi daging sapi dan kerbau tahun 2017 sebesar 564,02 ribu ton daging karkas atau 88,13% dari target 640 ribu ton karkas yang setara. Meskipun belum mencapai target, namun capaian produksi daging sapi dan kerbau tahun 2017 ini masuk kategori berhasil.

Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau tahun 2012 hingga tahun 2017 disajikan pada Gambar 25.



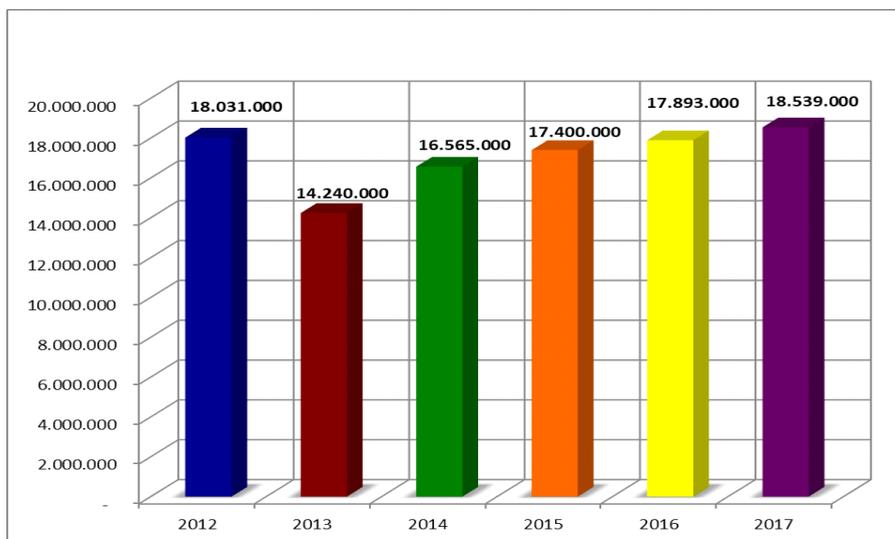
Gambar 25. Capaian Kinerja Produksi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2012-2017

Selama 6 (enam) tahun terakhir, produksi daging sapi dan kerbau mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dibandingkan tahun 2016, produksi tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 13,6 ribu ton (2,47%) . Peningkatan produksi daging tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 seiring dengan : 1) Peningkatan populasi sapi/kerbau pada tahun 2017 sebesar 3,61%; 2) Peningkatan angka pemotongan sapi/kerbau tercatat sebesar 0,78%. Angka Pemotongan sapi/kerbau tahun sebelumnya sebanyak 2.278.033 ekor, dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 2.295.722 ekor.

Pada Gambar 25. tampak bahwa terjadi penurunan *trend* target produksi daging sapi dan kerbau yang dimulai tahun 2013. Kebijakan tersebut ditempuh setelah diterbitkannya data populasi hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST13) sebagai basis data, dengan parameter teknis hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau/PSPK tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS serta *survey* karkas pada tahun 2012 yang dilakukan oleh IPB dalam penghitungan *meat yield*. Mulai tahun 2016 terjadi peningkatan angka target produksi daging sapi dan kerbau, dengan pertimbangan: 1) Kebijakan akselerasi percepatan target pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri

yang mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka) melalui Upsus SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang dimulai di akhir tahun 2016, serta 2) Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 tahun 2016 tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang mewajibkan pelaku usaha importir sapi bakalan juga memasukkan indukan dengan rasio 5 ekor bakalan wajib memasukkan 1 ekor indukan.

Dibandingkan target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2019 sebesar 0,755 juta ton karkas, capaian produksi di tahun 2017 baru mencapai 74,30%. Dengan kebijakan UPSUS SIWAB maka target produksi tahun 2019 optimis akan dapat terlampaui. Untuk itu, kinerja peningkatan produksi daging sapi dan kerbau harus ditingkatkan selama 2 tahun ke depan. Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau sangat dipengaruhi oleh populasi sapi dan kerbau.



Gambar 26. Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2012-2017

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 26, perkembangan populasi

sapi dan kerbau selama 2012-2017 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah populasi sapi dan kerbau sebanyak 18,03 juta ekor. Berdasarkan Sensus Ternak tahun 2013 (ST13), populasi sapi mengalami penurunan menjadi 14,24 juta ekor di tahun 2013, namun kemudian secara konsisten meningkat terus menjadi 15,65 juta ekor di tahun 2014, 17,4 juta ekor di tahun 2015, 17,89 juta ekor pada tahun 2016, dan 18,54 juta ekor pada tahun 2017.

Meskipun demikian, kenaikan populasi ternak sapi dan kerbau belum cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga pada tahun 2017 Kementerian Pertanian menerbitkan beberapa regulasi:

- (1) Permentan Nomor 2/Permentan/PK.440/2/2017 perubahan atas Permentan Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah NKRI. Penyempurnaan yang dilakukan dalam Permentan ini adalah terkait jangka waktu pemenuhan rasio, spesifikasi ternak ruminansia besar, dan masa berlaku rekomendasi.
- (2) Permentan Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Pada tanggal 14 Desember 2017, Kementerian Pertanian memfasilitasi penandatanganan Mou antara Bank dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mendorong peran aktif, serta sinergi antara Pemerintah Daerah dan Perbankan dengan investor.

Selain hal tersebut, untuk mendukung pencapaian produksi daging sapi dan kerbau, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan pendukung di tahun 2017, seperti:

1) Optimalisasi reproduksi melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus SIWAB)

Upsus SIWAB adalah kegiatan yang terintegrasi untuk percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan. Percepatan peningkatan populasi dilaksanakan melalui Inseminasi Buatan (IB). Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi melalui Upsus Siwab. Capaian IB

melalui Upsus Siwab sebanyak 3,97 juta ekor atau 99,41% dari target 4 juta ekor. Sedangkan capaian bunting sebesar 1,89 juta ekor, atau 63,08% dari target 3 juta ekor.

2) Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan berkualitas

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui penanaman dan pemanfaatan tanaman pakan ternak yang berkualitas yang dapat diakses oleh kelompok ternak, dalam rangka mendukung Kegiatan Upsus Siwab. Capaian kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas sebanyak 4.725 Ha, dari target 9.487 Ha (49,80%).

3) Penguatan pakan tambahan untuk ternak gangguan reproduksi

Pemenuhan pakan konsentrat merupakan salah satu upaya perlakuan yang ditujukan untuk perbaikan sistem reproduksi ternak yang mengalami gangguan reproduksi akibat kekurangan nutrisi. Capaian kegiatan pemenuhan pakan konsentrat sebanyak 2.787 ribu ton atau 93,99% dari target 2.965 ribu ton.

4) Produksi semen beku

Salah satu faktor penentu keberhasilan Inseminasi Buatan di lapangan adalah mutu dan ketersediaan semen beku. Pada tahun 2017, ditargetkan jumlah produksi semen beku sebanyak 4,57 juta dosis yang dilaksanakan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Balai Inseminasi Buatan Lembang. Jumlah semen beku yang diproduksi tahun 2017 sebesar 4,15 juta dosis atau 90,71% dari target.

5) Penanganan Gangguan Reproduksi

Kesehatan hewan memiliki peran penting dalam dukungan keberhasilan peningkatan populasi kaitannya dengan penanganan gangguan reproduksi. Dampak adanya gangguan reproduksi dapat dilihat dari rendahnya *service per conception* (S/C), panjangnya *calving interval* (CI), kemajiran, dan rendahnya angka kelahiran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen PKH melaksanakan kegiatan penanganan gangguan reproduksi dengan target menangani 300.000 ekor ternak sapi yang mengalami gangguan reproduksi. Realisasi kegiatan penanganan gangguan reproduksi tahun 2017 sebesar 299.283 ekor atau 99,76% dari target.

6) Pengendalian pemotongan betina produktif

Pemotongan betina produktif menjadi salah satu kendala dalam percepatan peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau. Oleh sebab itu dilaksanakan kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif yang pada tahun 2017 diprioritaskan terhadap daerah-daerah yang pemotongan betina produktifnya cukup tinggi, merupakan sentra peternakan dan memiliki Rumah Potong Hewan (RPH). Pada tahun 2017 kegiatan ini dilaksanakan pada 40 Kabupaten/Kota di 17 provinsi.

7) Pengembangan populasi sapi potong dan kerbau

Kegiatan ini merupakan kegiatan penambahan populasi di kelompok ternak. Tahun 2017 realisasi kegiatan pengembangan populasi sapi potong sebanyak 147 kelompok atau 100 % dari target 147 kelompok, sedangkan pengembangan populasi kerbau sebanyak 4 kelompok dari 5 kelompok yang ditargetkan.

8) Asuransi Ternak Sapi

Kontribusi dari kegiatan asuransi ternak sapi adalah mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi akibat hal-hal yang diluar kendali petani/peternak untuk melalui pembayaran premi asuransi ternak sapi.

9) Inovasi dan Teknologi

Badan Litbang Pertanian pada Tahun 2017 telah melakukan penyebaran 69 ekor sapi PO terseleksi diantaranya di Kabupaten Tuban (20 ekor), Kabupaten Cirebon (20 ekor), Jambi (15 ekor), Kabupaten Trenggalek (11 ekor) dan DIY (3 ekor). Hal ini dilakukan dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan bibit sumber sapi potong dan perbaikan kualitas genetik sapi di lapangan. Teknologi Litbang dalam rangka budidaya sapi dan pakan sapi adalah sebagai berikut:

Teknologi Pembuatan Test Kit Diagnostik Kebuntingan Dini Pada Sapi PO, Teknologi Pakan Sapi Potong Dengan Memanfaatkan Prebiotik Penurun Metan Berbahan Dasar Saponin Dan Tanin, serta Teknologi Pakan Kompleks Berbasis Limbah Industri Sawit Dan Indigofera.

Secara ringkas kegiatan pendukung untuk pencapaian produksi daging sapi dan kerbau dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Kegiatan Peningkatan Produksi Daging Sapi/Kerbau Kementerian Pertanian tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (000 Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan								
1	Optimalisasi Reproduksi	Juta ekor	4	4	98.50	622,422,000	522,477,000	83,94
2	Penanaman dan pengembangan pakan berkualitas	Ha	9,487	4,725	49.80	112,399,000	94,583,000	84,15
3	Penguatan Pakan Tambahan Untuk Ternak Gangguan Reproduksi	Ton	2,965	2,787	94.00	19,891,000	17,138,000	97,92
4	Produksi Semen Beku	Juta dosis	457	415	90.81	20,414,000	19,947,000	97,71
5	Penanganan gangguan reproduksi	Ribu Ekor	300	299	99.76	100,971,000	92,953,000	92,06
6	Pengendalian pemotongan betina produktif	Lokasi	40	40	100	30,729,000	2,506,000	81,55
7	Pengembangan populasi sapi potong	Klp	147	147	100	40,948,000	38,033,000	92,88
8	Pengembangan populasi kerbau	Klp	5	4	80	1,464,000	1,366,000	93,29
Program Penelitian dan Pengembangan teknologi								
1	Perakitan Galur Unggul Sapi PO Agrinak dan F1 Silangan Sapi PO dan Bali (galur)	Galur	2	2	100	1,485,706	1481273	99.70
2	Perakitan Teknologi Peternakan dan Veteriner Komoditas Strategis (teknologi)	Teknologi	24	30	125	3,751,533	3,319,296	88.48
3	Bibit Unggul Ternak sapi dan kerbau (ekor)	Ekor	200	200	100	760,000	734,544	96.65
Program Ditjen PSP								
1	Asuransi Ternak sapi (ekor)	Ekor	120000	91831	76.53	19,200,000	14,692,960	76.53
Total						974,435,239	809,231,073	83.05

Sumber: Diten Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi daging sapi/kerbau nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp974.435.239.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp809.231.073.000,- atau secara persentase sebesar 83,05%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi daging sapi/kerbau, terdapat efisiensi sebesar 11,40%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi daging sapi/kerbau dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Akar permasalahan tidak tercapainya target produksi daging sapi dan kerbau di tahun 2017 yaitu gangguan reproduksi pada indukan ternak sapi, pemotongan betina produktif, produktivitas sapi dan kerbau dengan BCS (*Body Conditioning Score*) yang masih rendah,

skala kepemilikan peternak yang kecil, ternak sebagai usaha sampingan, kekurangan jumlah SDM tenaga teknis reproduksi (IB, PKb, dan ATR), dan kurangnya sarana dan prasarana.

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, disusunlah solusi sebagai rekomendasi perbaikan antara lain: (1) penanggulangan gangguan reproduksi pada indukan sapi, (2) penanganan pematangan sapi betina produktif, (3) perbaikan pakan sapi, (4) penguatan kelembagaan peternak, (5) pelatihan dan bimbingan teknis, dan (6) penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana semen beku, N2 Cair, dan kontainer. Secara lengkap, akar permasalahan dan rekomendasi solusi perbaikan disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Rekomendasi solusi untuk akar permasalahan produksi daging sapi dan kerbau

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1.	Ada gangguan reproduksi pada indukan sapi baik secara kesehatan reproduksinya maupun diakibatkan oleh kekurangan gizi karena pakan kurang	Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada indukan sapi
2.	Jumlah pematangan indukan produktif masih cukup tinggi	Penanganan Pematangan Sapi dan Kerbau Betina Produktif
3.	Produktivitas sapi dan kerbau yang diukur melalui angka Body Condition Score (BCS) masih rendah (1-3)	Perbaikan Pakan Ternak Sapi
4	Peternak yang memiliki sapi 1-2 ekor sekitar 66,34%*), yang secara kultural sebagai usaha sampingan	Penguatan Kelembagaan Peternak
5	Kekurangan Jumlah SDM Tenaga Teknis Reproduksi (IB, PKb, ATR)	Pelatihan dan Bimbingan Teknis
6	Kurangnya sarana dan prasarana	Penyediaan dan Distribusi Sarana dan Prasarana semen beku, N2 Cair, dan kontainer.

Sasaran Strategis 2 (SS 2)

TERJAMINNYA DISTRIBUSI PANGAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Salah satu permasalahan di dalam pembangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke konsumen yang belum optimal. Masalah jaringan distribusi pangan seringkali menjadi penyebab ketidaklancaran pasokan pangan khusus pada daerah-daerah defisit pangan yang wilayahnya sulit dijangkau. Jaringan distribusi dan perdagangan antar pulau menjadi sangat penting perannya dalam perdagangan hasil pertanian, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kondisi ini tentu akan memicu terjadinya gejolak harga pangan. Target dari sasaran strategis ini adalah kestabilan harga dan distribusi pangan, dengan dua indikator yaitu Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa dan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen.

Yang dimaksud rasio disini adalah membandingkan antara jumlah produksi padi di luar Jawa dengan jumlah penduduk di luar Jawa dalam kurun waktu 1 tahun yaitu 2017, dengan target 337 kg/tahun.

Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi bangsa dan negara, karena merupakan komoditas makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani Indonesia. Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan nasional.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yang sudah diterbitkan sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2002 sampai 2012. Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras.

Sasaran strategis kedua memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa dan (2) Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen.

SS 2. IKU 1 Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa	Target 337 Realisasi 359	% Capaian 106,53% Sangat Berhasil
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pra Angka Ramalan II, produksi padi di luar Pulau Jawa sebesar 40.914.690 ton. Jumlah penduduk di luar Pulau Jawa tahun 2017 berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS, 2015 sebesar 114.070.197 jiwa. Jadi realisasi Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa tahun 2017 sebesar 359 kg/kapita atau mencapai 106,53 % dari target 337 kg/kapita, sehingga masuk kategori sangat berhasil.

Selama 6 (enam) tahun terakhir, rasio produksi padi per kapita di Luar Jawa tahun terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa seiring pertambahan jumlah penduduk di Luar Jawa, produksi padi di luar Jawa juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan rasio produksi padi di Luar Pulau Jawa tahun 2017, maka capaian di tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 16,8 kg/ kapita (5 %). Perkembangan capaian rasio padi di Luar Jawa selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Perkembangan Rasio Produksi Padi di Luar Pulau Jawa Tahun 2012-2017

	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRODUKSI PADI LUAR JAWA	32.529.463	33.786.689	34.183.416	36.427.815	38.949.786	40.914.690
PENDUDUK LUAR JAWA	104.565.290	106.382.298	108.233.355	110.168.571	112.100.963	114.070.197
RASIO PRODUKSI PADI LUAR JAWA	311	318	316	331	347	359

Sumber: BPS diolah

Perlu diingat bahwa perhitungan rasio/perbandingan antara produksi padi dengan jumlah penduduk di luar Jawa tersebut menggambarkan ketersediaan produksi di luar Pulau Jawa. Jika dilakukan analisis lebih mendalam dengan memperhatikan angka konsumsi beras di luar Pulau Jawa, maka produksi padi sebesar 40,91 juta ton di tahun 2017 sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan beras penduduk di luar Pulau Jawa, bahkan diperoleh surplus sebesar 7,67 juta ton seperti terlihat dalam Tabel 15.

Tabel 15. Data Produksi dan Konsumsi Beras di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2016-2017

WILAYAH	2016						2017					
	PRODUKSI PADI GKP (TON)	PADI (Untuk Konsumsi Pangan)*	BERAS (62,74%)	PENDUDUK (JIWA)	KONSUMSI (**)	SURPLUS/DEFISIT (TON)	PRODUKSI PADI GKP (TON)	PADI (Untuk Konsumsi Pangan)*	BERAS (62,74%)	PENDUDUK (JIWA)	KONSUMSI (**)	SURPLUS/DEFISIT (TON)
PULAU JAWA	40.191.566	34.162.831	21.433.760	146.767.281	18.199.143	3.234.617	40.372.104	34.316.288	21.530.039	148.546.013	18.419.706	3.110.334
LUAR PULAU JAWA	38.949.786	33.107.318	20.771.531	112.100.963	13.900.519	6.871.012	40.914.690	34.777.487	21.819.395	114.070.197	14.144.704	7.674.691
TOTAL NASIONAL	79.141.352	67.270.149	42.205.292	258.868.245	32.099.662	10.105.629	81.286.794	69.093.775	43.349.434	262.616.210	32.564.410	10.785.024

Sumber: BPS diolah, 2017

Keterangan:

*) Produksi beras dikurangi penggunaan 15% (untuk benih, pakan ternak, industri non pangan, susut/tercecer gabah dan dikurangi penggunaan beras untuk konsumsi non pangan)

***) Konsumsi beras = 124 kg/per kapita/tahun

Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran strategis Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa, antara lain: (1) penerapan budidaya padi seluas 615 ribu Ha; (2) bantuan benih padi inbrida 236 ribu ton; (3) perbanyak benih sumber padi 235 Ha; (4) pengembangan desa mandiri benih 1620 Ha; (5) penguatan desa mandiri benih 7790 Ha; (6) fasilitasi sarana pasca panen 2449 unit; (7) PPHT seluas 10.000 Ha; (8) Penanganan DPI seluas 220 Ha; dan gerakan pengendalian OPT sebanyak 465 kali. Kegiatan pendukung pencapaian produksi padi di luar Jawa dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Kegiatan Pendukung Pencapaian Rasio Produksi Padi di Luar Jawa Tahun 2017

No	Kegiatan		Fisik			Anggaran (000 Rp)		
	Nama Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Fasilitas Penerapan Budaya Padi	Ha	652,137	615,629	94.40	431,335,078	393,714,646	91.28
2	Perbanyakan Benih Sumber Padi	Ha	255	235	92.16	12,362,160	11,514,432	93.14
3	Penguatan Desa Mandiri Benih	Ha	8,960	7,790	86.94	49,865,353	49,821,231	99.91
4	Pengembangan Desa Mandiri Benih	Ha	1,650	1,620	98.18			
5	Pemantapan Penerapan PHT	Ha	10,475	10,000	95.47	13,552,275	12,800,926	94.46
6	Pemantapan Penanganan DPI	Ha	220	220	100.00	846,675	821,568	97.03
7	Gerakan Pengendalian OPT (Reguler+TNI)	Kali	465	465	100.00	4,444,365	4,403,768	99.09
8	Sarana Pasca Panen Padi	Unit/Paket	2,449	2,449	100.00	668,348,205	660,202,388	98.78
9	UPPO	unit	1030	1029	99.90	180,250,000	180,019,924	99.87
10	Penguatan Agroekosistem Padi	Ha	4,950	4,800	96.97	1,729,625	1,659,910	95.97
11	Bantuan Benih Padi Inbrida DIPA Pusat	Ha	500,000	235,735	47.15	126,838,328	55,774,546	43.97
Total						1,489,572,064	1,370,733,338	92.02

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian rasio produksi padi di luar Jawa, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp1.489.572.064.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp1.370.733.388.000,- atau secara persentase sebesar 92,02%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan rasio produksi padi di luar Jawa, terdapat efisiensi sebesar 1,47%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan pendukung pencapaian rasio produksi padi di luar Jawa dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan

<p>SS 2. IKU 2 Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen</p>	<p>Target \geq HPP (Rp3.700,-) Realisasi Rp4.615,-</p>	<p>% Capaian 124,73 % Sangat Berhasil</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Keterangan: HPP = Harga Pembelian Pemerintah

Definisi harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen yaitu besaran harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen/petani. Keberhasilan indikator ini diukur dengan membandingkan antara GKP lebih besar atau sama dengan harga pembelian pemerintah (HPP) senilai Rp3.700/Kg.

Harga gabah kering panen di tingkat produsen diperoleh dengan cara menghitung rata-rata harga harga gabah kering panen di tingkat produsen pada 34 provinsi.

Keberhasilan indikator ini diukur dengan membandingkan antara GKP dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Jika lebih besar atau sama dengan harga pembelian pemerintah (HPP) maka dapat dikatakan berhasil. Harga rata-rata Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat produsen tahun 2017 adalah sebesar Rp4.615/kg atau 124,73 % diatas nilai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun 2017 sebesar Rp3.700/kg. Dengan demikian, capaian indikator harga gabah kering panen di tingkat produsen tahun 2017 masuk kategori sangat berhasil.

Gambar 28. memperlihatkan bahwa harga GKP di tingkat produsen/petani memiliki pola yang hampir sama setiap bulan dan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan harga GKP Tahun 2016, maka terjadi peningkatan/penurunan capaian di tahun 2017. Perkembangan harga GKP dan HPP selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 27.



Gambar 27. Perkembangan Harga GKP di Tingkat Produsen 2013-2017 Berdasarkan Pantauan BPS

Data harga gabah kering panen (GKP) diambil dari Badan Pusat Statistik. Sebagai perbandingan, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) juga melakukan pemantauan harga pangan yang dilakukan secara panel di 22 Provinsi sentra produksi padi. Hasil kedua pemantauan Perkembangan harga GKP, GKG dan beras di tingkat petani tersebut relatif sama. Selama Tahun 2017 sebagian besar petani di lokasi panel menjual gabah dalam bentuk GKP dan GKG. Perkembangan Harga GKP, GKG, dan Beras Tingkat Petani dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Perkembangan Harga GKP, GKG dan Beras di Tingkat Petani Berdasarkan Pantauan Panel Harga BKP Tahun 2017

Bulan	Harga (Rp/Kg)		
	GKP Tk Petani	GKG Tk Penggilingan	Beras Medium Tk penggilingan
Jan	4.420	5.428	9.223
Feb	4.292	5.115	8.811
Mar	4.111	4.996	8.576
Apr	4.210	5.088	8.581
Mei	4.147	5.052	8.559
Jun	4.161	5.124	8.574
Jul	4.122	5.125	8.583
Aug	4.129	4.994	8.564
Sep	4.272	5.272	8.539
Oct	4.361	5.327	8.715
Nov	4.421	5.422	8.850
Dec	4.499	5.411	9.028
Rerata	4.244	5.166	8.682
Maksimum	4.499	5.428	9.223
Minimum	4.111	4.994	8.539
Pert/bln (%)	0,19	0,01	(0,18)
CV	3,20	3,22	2,54

Sumber : Badan Ketahanan Pangan. GKP = Gabah Kering Panen, GKG = Gabah Kering Giling

Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen antara lain:

(1) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Kegiatan LDPM menyalurkan dana kepada Gapoktan sebagai modal usaha agar anggotanya mampu secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang distribusi pangan, dan menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik. Tujuan dari kegiatan LDPM utamanya adalah melindungi petani terhadap jatuhnya harga pada saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan pada saat paceklik.

Selama tahun 2013-2017, kegiatan P-LDPM telah berhasil menumbuhkan Gapoktan sebanyak 413 Gapoktan, dengan rincian seperti terlihat pada tabel 18.

Tabel 18. Perkembangan LDPM Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, Tahun 2013-2017

Tahun	Tahap Penumbuhan			Tahap Pengembangan		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
2013	75	74	98.67	281	210	74.73
2014	38	38	100.00	117	102	87.18
2015	203	203	100.00	38	36	94.74
2016	100	98	98	203	189	93.10
2017	-	-	-	98	94	95.92
Total	416	413	99.28	737	631	85,62

Sumber: BKP, 2017

Selain menjaga harga ditingkat petani, dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang meningkatkan kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi kelangkaan pangan. Berpengaruh positif dalam membangun perspektif anggota Gapoktan dalam pengembangan agribisnis. Dari kegiatan yang diinisiasi Badan Ketahanan Pangan melalui penguatan LDPM, ternyata tidak hanya mampu melindungi dan memberdayakan petani, tetapi para petani dan Gapoktan telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar Gapoktan juga telah memperoleh dampak ikutan, berupa mata pencaharian. Semua ini, tentu berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

(2) Serap Gabah (SERGAB)

Upaya lain yang dilakukan untuk menahan harga gabah jauh di tingkat produsen adalah kegiatan menyerap gabah langsung dari petani. Program serap gabah (SERGAB) ini dilaksanakan oleh

Kementerian Pertanian bersama dengan BULOG, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pemerintah Daerah setempat, serta TNI AD. Penyerapan gabah langsung kepada petani ini memotong mata rantai tata niaga beras menjadi lebih pendek, memberikan jaminan harga beli gabah di tingkat produsen (petani), dan menjaga stabilitas harga beras di masyarakat. Kegiatan Serap Gabah ini bertujuan untuk menanggulangi turunnya harga gabah di tingkat petani pada masa musim panen sehingga petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Jaminan harga beli di petani akan mendorong kegairahan menanam dan bertani yang pada akhirnya akan menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan nasional. Perkembangan serap gabah petani selama (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 19.

Tabel 19. Realisasi Serap Gabah Petani Tahun 2015-2017

No.	Bulan	2015	2016	2017	% 17/16
1	Jan	-	641	4.148	547,1
2	Feb	-	4.193	48.884	1.065,8
3	Mar	30.964	167.950	425.556	153,4
4	Apr	430.559	649.867	424.064	(34,7)
5	Mei	661.741	572.459	218.170	(61,9)
6	Jun	385.726	406.485	155.605	(61,7)
7	Jul	194.344	162.416	277.782	71,0
8	Agu	90.231	287.224	202.310	(29,6)
9	Sep	22.985	240.173	196.432	(18,2)
10	Okt	67.359	207.500	122.222	(41,1)
11	Nov	61.328	165.353	65.177	(60,6)
12	Des	21.265	97.244	20.902	(78,5)
JUMLAH		1.966.502	2.961.505	2.161.252	(27,0)

Sumber: Kementan dan Bulog, 2017

(3) Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan HBKN

Kementerian Pertanian sejak tahun 2010 mulai mengembangkan model pemantauan data harga dan pasokan pangan melalui metode

panel untuk mendukung perumusan kebijakan stabilisasi harga pangan. Dengan metode panel, dapat diperoleh data harga dan pasokan pangan yang mutakhir sehingga dapat dianalisis dan dirumuskan secara tepat, terutama disaat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dimana kebutuhan dan harga pangan cenderung mengalami peningkatan. Kegiatan panel harga pangan tahun 2017 dilaksanakan di 35 propinsi dengan melibatkan enumerator sebanyak 948 orang sebagai petugas pengumpul dan pelapor data. Pengiriman data akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas pesan pendek (*Short Messsage Services*) atau SMS.

(4) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ Toko Tani Indonesia (TTI)

Toko Tani Indonesia (TTI) mulai dilaksanakan tahun 2015. berupa kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Perum Bulog dengan melakukan terobosan untuk solusi permanen yaitu : (1) menyerap produk pertanian. (2) memperpendek rantai distribusi pemasaran. dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat. Pada tahun 2017, telah dikembangkan 406 TTI di 7 provinsi yaitu Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan NTB. Pelaksanaan TTI tersebut dipasok oleh Gapoktan /LUPM berasal dari 7 (tujuh) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat sesuai dengan karakteristik sentra pangan yang dimiliki. Gapoktan tersebut berkewajiban memasok bahan pangan ke TTI di wilayah Jabodetabek dan wilayahnya yang menjadi fokus stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen. Komoditas pangan yang wajib dipasok oleh gapoktan/LUPM adalah Beras, Cabai Merah, dan Bawang Merah. Selama 2015-2017 telah terbentuk 2433 Toko Tani yang dipasok oleh 891 Gapoktan/LUPM. Salah satu inovasi yang dikembangkan saat ini adalah adanya kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan salah satu layanan transportasi online memperluas pasar sekaligus mempermudah pelanggan berbelanja bahan pangan sehari-hari melalui Toko Tani Indonesia. (Gambar 28).



Gambar 28. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Head of Go-Mart, Menteri Pertanian dan Menteri melepas 50 Driver Go-Jek mengantar bahan pangan Toko Tani Indonesia (TTI).

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Produsen dapat dilihat pada tabel 20

Tabel 20. Kegiatan Pendukung Pencapaian Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Produsen Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (000 Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Badan Ketahanan Pangan								
1	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan)	Gapoktan	98	95	97	7,657,000	7,322,982	95.64
2	Jumlah Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)/TTI (Gap/TTI)	Gap/Toko	406/.1000	406/.1113		130,853,827	121,551,953	92.89
3	Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (HBKN)	Provinsi	35	33	100	30,152,580	29,067,816	96.40
Total						168,663,407	157,942,751	93.64

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2017

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Produsen Tahun 2017, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai Rp168.663.407.000,- dengan

realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp157.942.751.000,- atau capaiannya sebesar 93,64%. Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Produsen, terdapat efisiensi sebesar 14,91%.

Sasaran Strategis 3 (SS 3) MENINGKATNYA AKSES DAN PEMANFAATAN PANGAN DAN GIZI

Salah satu indikator meningkatnya akses pemanfaatan pangan dan gizi adalah melalui pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH menggambarkan proporsi konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, dan kelompok pangan lainnya. Konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dengan cara mengalikan antara presentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan.

SS 3. IKU 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Target 88,4 Realisasi 88	% Capaian 99,55% Berhasil
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------

Capaian skor PPH tahun 2016 sebesar 86 atau 99,77% dari target 86,2, sehingga masuk kategori berhasil. Perkembangan skor PPH yang menggambarkan situasi konsumsi pangan 2012-2017 ditunjukkan dalam Tabel 21.

Tabel 21. Perkembangan Skor PPH Tahun 2012 – 2017.

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,8	83,5	91,5	81,4	82,5	83,4	84,1	85,2	86,2	86	88,4	88

Sumber: Susenas 2012-2017 BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran. oleh BKP

Keterangan : Target berdasarkan Renstra Revisi BKP 2010 – 2014 dan Renstra BKP 2015 – 2019

Kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH tahun 2012-2017 berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2012-2013 mengalami penurunan dari 83,5 menjadi 81,4, terus mengalami peningkatan hingga 88 pada tahun 2017. Realisasi capaian skor PPH di tahun 2012-2013 mempunyai kesenjangan yang cukup besar dengan target yang ditetapkan. Kesenjangan tersebut sebagai akibat : (1) koreksi data beberapa komoditas ikan, sayur, dan buah dalam Susenas dengan mengikuti tren pengeluaran yang meningkat pada komoditas tersebut, dan (2) adanya perubahan struktur penduduk Indonesia ke arah yang lebih tua, sehingga menyebabkan kebutuhan rata-rata kalori penduduk juga meningkat. Adanya kesenjangan tersebut telah dievaluasi dengan reuiu target sasaran merujuk pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 yaitu merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025 yang sebelumnya, sesuai Perpres 22 tahun 2009 dijadikan target capaian tahun 2015.

Dengan demikian, telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target pencapaian kualitas konsumsi pangan dengan *baseline* data tahun 2013 (skor PPH sebesar 81,4), menghasilkan target skor PPH 82,5 tahun 2014, 84,1 tahun 2015, 86,2 tahun 2016, dan 88,4 pada tahun 2017. Setelah dilakukan perubahan terhadap target skor PPH tersebut, capaian kualitas konsumsi pada tahun 2014 dan 2015 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 101,1%, menjadi 101,3% pada tahun 2015, akan tetapi sedikit menurun 99,77% pada tahun 2016 dan 99,55% pada tahun 2017. Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor PPH Penduduk Indonesia Tahun 2013-2017 per

kelompok pangan disajikan pada tabel 22.

Tabel 22 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk Indonesia

Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari)				
	2013	2014	2015	2016	2017
I. Padi-padian	1164	1164	1253	1274	1.318
II. Umbi-umbian	39	38	48	49	60
III. Pangan Hewani	174	183	201	211	225
IV. Minyak dan Lemak	233	243	257	265	233
V. Buah/biji berminyak	39	38	44	42	24
VI. Kacang-kacangan	58	57	57	60	62
VII. Gula	93	90	102	111	76
VIII. Sayuran dan buah	96	101	99	96	101
IX. Lain-lain	35	36	38	37	53
Total Energi	1930	1949	2099	2147	2.153
Tk.Konsumsi Energi (TKE)	89,8	90,7	97,6	99,9	107,6
Skor PPH (berdasarkan AKE 2.000 Kkal/kap/hari)	81,4	83,4	85,2	86,0	88,0

Sumber : Susenas 2013 – 2017; BPS.diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP

Secara nasional, sumber konsumsi energi masyarakat pada tahun 2017 masih didominasi oleh kelompok padi-padian, yaitu sebesar 1.318 kkal/kap/hari. Angka tersebut mencapai 122,6% jika dibandingkan dengan standar konsumsi energi kelompok padi-padian, yaitu sebesar 1.075 kkal/kap/hari. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi per kelompok pangan belum mencapai kondisi ideal, yang ditandai dengan masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan terigu, serta masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah.

Pencapaian skor PPH merupakan kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian melalui program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat telah mengalokasikan kegiatan berupa:

(1) Pemberdayaan Pemanfaatan Pekarangan

Kementerian Pertanian menyusun suatu konsep yang disebut dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KRPL ini memiliki fungsi multiguna, karena dari lahan yang relatif sempit dapat menghasilkan bahan pangan seperti umbi-umbian, sayur, buah-buahan, tanaman rempah dan obat, serta bahan pangan hewani. (Gambar 29).



Gambar 29. Pemanfaatan Pekarangan dalam konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

(2) Gerakan Diversifikasi Pangan

Dalam gerakan diversifikasi pangan dilaksanakan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penganekaragaman pangan. Pada tahun 2017 kegiatan ini dilaksanakan di 35 lokasi serta melibatkan pimpinan daerah.

(3) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.

Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2017, salah satunya adalah pengawasan pada proses produksi (On Farm), yaitu dengan melakukan sertifikasi prima 1, 2 dan 3 serta surveilans oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/Pusat (OKKPD/OKKPP) kepada petani/kelompok tani/pelaku usaha. Sertifikasi prima 3 diberikan kepada produk pertanian yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan; Sertifikasi prima 2 dilihat dari aspek keamanan dan mutu pangan; serta prima 1 dari aspek keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar dengan sertifikasi prima, dilakukan juga pengawasan pangan segar di rumah kemas (*packing house*) dan pelaku usaha melalui pendaftaran rumah kemas dan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) oleh OKKPD/OKKPP. Pengawasan ini bersifat sukarela, dimana hanya rumah kemas/pelaku usaha yang menginginkan produknya didaftar.

Pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian Skor PPH pada tahun 2017 dapat terlihat pada tabel 23

Tabel 23. Kegiatan Pendukung Pencapaian Skor PPH Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Badan Ketahanan Pangan								
1	Pemberdayaan Pekarangan Pangan (desa)	Desa	1,691	1,691	100	42,766,500,000	42,313,050,099	98.94
2	Pemantauan Pengenekaragaman Pangan (Lokasi)	Lokasi	35	35	100	776,055,000	759,238,825	97.83
3	Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	Unit	35	35	100	2,700,615,000	2,685,150,920	99.43
4	Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan (Rekomendasi)	Lokasi	35	35	100	9,761,831,000	9,254,458,848	94.80
Total						56,005,001,000	55,011,898,692	98.23

Sumber: Badan Ketahanan pangan, 2017

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Skor PPH Tahun 2017, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai Rp56.005.001.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp55.011.898.692,- atau capaiannya sebesar 98,23% dengan efisiensi sebesar 1,81%.

Pencapaian skor PPH merupakan kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Artinya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat menuju Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) bukan semata-mata intervensi Kementerian Pertanian, dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat untuk mengonsumsi pangan antara lain:

- a. masih rendahnya daya beli masyarakat;
- b. rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pentingnya konsumsi pangan B2SA;
- c. keterlibatan swasta dan pemerintah dalam pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi (*scaling up production*), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; dan
- d. berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.

Oleh sebab itu, beberapa rekomendasi solusi yang diberikan antara lain:

- a. Perlu terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sarana mendukung penyediaan pangan terutama umbi-umbian, sayur, ikan dan ayam. Hal ini sejalan dengan program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang perlu terus ditingkatkan jangkauannya di daerah;
- b. perlu terus menerus dilakukan sosialisasi akan pentingnya konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat antara lain melalui gerakan diversifikasi pangan;
- c. Perlu terus dikembangkan teknologi untuk memproduksi dan mengolah pangan lokal terutama dengan pihak swasta sehingga masyarakat semakin mudah mengakses pangan dengan harga yang terjangkau; dan

- d. Perlu inovasi pengembangan dan pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan minat masyarakat mengonsumsinya, antara lain melalui program Pengembangan Pangan Pokok Lokal.

Sasaran Strategis 4 (SS 4)

MENINGKATNYA KONSUMSI PANGAN LOKAL

Indonesia merupakan salah satu negara konsumen beras terbesar di dunia. Populasi Indonesia yang terus meningkat menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi beras. Apabila konsumsi pangan masih tetap didominasi oleh beras sebagai sumber karbohidrat, maka akan cukup memberatkan bagi upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu kepada sumber daya lokal.

Hal inilah yang membuat Kementerian Pertanian memberikan perhatian yang besar pada ketersediaan beras, sekaligus juga berusaha untuk mengembalikan keberagaman sumber pangan lokal untuk mengurangi konsumsi beras tersebut. Untuk itu, konsumsi pangan lokal oleh masyarakat harus ditingkatkan. Selain menciptakan ketahanan pangan, pelestarian pangan lokal, upaya itu diyakini sejalan dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Yang dimaksud pangan lokal non beras adalah kelompok umbi-umbian (singkong, ubi jalar, sagu, kentang, umbi lainnya) dan jagung.

Tujuan dari sasaran strategis meningkatnya konsumsi pangan lokal adalah meningkatnya konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras.

Sasaran strategis nomor empat ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras. Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras adalah jumlah konsumsi energi pangan lokal yang dihitung dari konsumsi energi singkong, ubi jalar, kentang, sagu, umbi lainnya dan jagung dibandingkan dengan konsumsi energi beras pada kurun waktu tertentu.

Rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras diperoleh dengan cara : membandingkan jumlah konsumsi energi pangan lokal yang dihitung dari konsumsi energi singkong, ubi jalar, kentang, sagu, umbi lainnya dan jagung dengan jumlah energi beras.

<p>SS 4. IKU 1</p> <p>Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras</p>	<p>Target</p> <p>5,87%</p> <p>Realisasi</p> <p>7,48%</p>	<p>% Capaian</p> <p>127,43%</p> <p>Sangat Berhasil</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Capaian indikator rasio konsumsi pangan lokal non beras terhadap beras tahun 2017 adalah 7,48% atau 127,43% dari target 5,87%, sehingga masuk sangat berhasil. Capaian ini menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat yang bersumber dari pangan lokal yaitu umbi-umbian dan jagung di tingkat masyarakat sudah baik. Namun demikian perlu terus didorong kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Salah satunya melalui sosialisasi/gerakan/kampanye diversifikasi pangan sehingga pola konsumsi masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sumber pangan yaitu beras saja.

Diversifikasi konsumsi pangan ini tidak sebatas hanya diartikan sebagai penganekaragaman konsumsi karbohidrat saja, akan tetapi juga sumber pangan zat gizi lainnya yang diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas

Dalam upaya mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan konsumsi pangan lokal non beras, di tahun 2017 Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan seperti: kegiatan pemberdayaan pekarangan pangan di 1691 desa yang berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), pemantauan penganekaragaman pangan di 35 lokasi, serta Gerakan Diversifikasi Pangan di 35 lokasi.

Rincian kegiatan pendukung pencapaian Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras dapat terlihat pada tabel 24.

Tabel 24. Kegiatan Pendukung Pencapaian pencapaian Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras Tahun 2016

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Badan Ketahanan Pangan								
1	Pemberdayaan Pekarangan Pangan (desa)	Desa	1,691	1,691	100	42,766,500,000	42,313,050,099	98.94
2	Pemantauan Penganekaragaman Pangan (Lokasi)	Lokasi	35	35	100	776,055,000	759,238,825	97.83
3	Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	Unit	35	35	100	2,700,615,000	2,685,150,920	99.43
4	Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan (Rekomendasi)	Lokasi	35	35	100	9,761,831,000	9,254,458,848	94.80
Total						56,005,001,000	55,011,898,692	98.23

Sumber: BKP, 2017

Anggaran yang dialokasikan Kementerian Pertanian untuk mencapai keberhasilan Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Bersas adalah sebesar Rp56.005.001.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp55.011.898.692,- atau capaiannya sebesar 98,23% dengan efisiensi sebesar 1,81%.

Sasaran Strategis 5 (SS 5) STABILNYA PRODUKSI CABAI DAN BAWANG MERAH

Stabilisasi pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulitnya memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kemampuan produksi pangan dalam negeri dan pengelolaan stok pangan nasional. Situasi ini diperparah dengan aksi spekulasi baik di daerah produsen yang surplus maupun daerah yang biasanya menjadi negara pengimpor.

Komoditas aneka cabai (cabai besar dan cabai rawit) dan bawang merah merupakan komoditas hortikultura unggulan nasional yang kesehariannya tidak lepas dari kehidupan rumah tangga serta

industri, baik dikonsumsi dalam keadaan segar maupun olahan. Dalam kurun beberapa waktu terakhir ini kedua komoditas tersebut juga memberikan andil dalam fluktuasi perekonomian nasional, terutama dalam hal inflasi. Dalam perkembangannya, diperlukan kolaborasi dan peran aktif dari seluruh pelaku, baik di pusat dan daerah dalam pengembangan dan penanganan komoditas cabai dan bawang merah.

Dilatarbelakangi dari permasalahan diatas, Kementerian Pertanian menjadikan stabilnya produksi bulanan cabai dan bawang merah menjadi salah satu sasaran strategis yang harus dicapai.

Sasaran strategis nomor lima ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) Koefisien variasi produksi bulanan cabai besar, (2) Koefisien variasi produksi bulanan cabai rawit, dan (3) Koefisien variasi produksi bulanan bawang merah. Koefisien Variasi (KV) Produksi adalah tingkat fluktuasi keragaman jumlah produksi bulanan dalam setahun.

Rumus Koefisien Variasi Produksi adalah sebagai berikut:

$$KV = S/X \times 100 \%$$

Dimana:

KV = koefisien variasi

S = simpangan baku

X = rata-rata

Adapun, Simpangan baku merupakan standar deviasi dari x_1, x_2, \dots, x_n , dengan penghitungan mengikuti rumus sebagai berikut:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Sedangkan, rata – rata merupakan rata – rata nilai produksi yang nilainya diperoleh dari:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Semakin besar nilai koefisien variasi semakin tinggi fluktuasi jumlah produksi bulanan dalam setahun.

<p>SS 5. IKU 1 Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar</p>	<p>Target ≤15 Realisasi 12,64</p>	<p>% Capaian 118,67% Sangat Berhasil</p>
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Realisasi Koefisien Variasi produksi cabai besar di tahun 2017 mencapai 12,64 atau 118,67% lebih rendah dari target 15, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Koefisien Variasi produksi cabai besar tahun 2012 hingga 2017 disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Produksi Bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Besar 2012-2017

Bulan	Produksi (Ton)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	68.655	75.843	86.225	78.383	70.501	72.469
2	99.766	97.581	98.411	106.339	95.603	98.272
3	96.451	92.023	98.775	118.024	109.521	112.579
4	91.393	98.576	95.696	102.029	100.620	103.429
5	84.175	98.848	96.988	96.264	80.854	83.112
6	79.702	89.640	99.707	96.969	90.145	92.661
7	84.460	90.200	98.693	85.560	94.190	96.819
8	74.682	82.356	90.894	82.791	87.776	90.226
9	76.398	83.763	89.843	73.517	87.871	90.324
10	71.223	71.386	76.879	68.210	73.534	75.586
11	64.615	65.782	69.478	67.141	74.880	76.970
12	62.791	66.883	73.017	69.957	80.092	82.328
Jumlah	954.310	1.012.879	1.074.603	1.045.182	1.045.587	1.074.777
Rata-rata	79.526	84.407	89.550	87.098	87.132	89.565
Standart Baku	12.082	12.073	10.843	16.682	11.737	11.324
Koefisien Variasi	15,19	14,30	12,11	19,15	13,47	12,64

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Tabel 25. memperlihatkan bahwa produksi cabai tahun 2017 mencapai 1.074.777 ton, meningkat 2,79% dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 1.045.587 ton. Meskipun demikian, produksi bulanan cabai besar bervariasi tiap bulannya. Produksi di bulan Januari merupakan produksi yang terendah dikarenakan memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi.

Dalam rangka menjaga stabilisasi produksi aneka cabai, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kebijakan berupa pengaturan pola tanam di 33 provinsi (Gambar 30), pengaturan pola tanam ini merupakan langkah strategis yang dapat disinergikan dalam kegiatan pengembangan kawasan dimana dalam pengaturan pola tanam tersebut telah dilakukan pengaturan bulanan dalam satu tahun yang mengacu pada tingkat kebutuhan secara proporsional khususnya dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional yang biasanya kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan *supply demand*.



Gambar 30. Penanaman Cabai dalam Rangka Mendukung Pengaturan Pola Tanam Nasional

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 26, produksi cabai besar di bulan Juli dan Desember yang merupakan hari Raya Idul Fitri dan Natal mengalami peningkatan, sehingga kebijakan pola tanam yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian merupakan suatu keberhasilan dan langkah nyata, karena mampu menciptakan kondisi pasar dan pasokan yang cukup kondusif dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional. Keseimbangan *supply demand* cabai besar tahun 2017 terlihat dalam Tabel 26.

Tabel 26 Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabai Besar Tahun 2017

Bulan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah	
Produksi (Ton)	72,469	98,272	112,579	103,429	83,112	92,881	96,819	90,226	90,324	75,586	76,970	82,328	1,074,777	
Kehilangan/tercecer (Ton)	4,493	6,093	6,980	6,413	5,153	5,745	6,003	5,594	5,600	4,886	4,772	5,104	66,636	
Kebutuhan (Ton)	Konsumsi Rumah Tangga	50,196	50,196	50,196	50,196	51,653	51,534	50,196	51,491	50,196	50,196	51,815	608,057	
	Konsumsi Non Rumah Tangga	25,509	34,592	39,628	36,407	29,255	32,617	34,080	31,760	31,794	26,606	27,094	378,322	
	-Benih	145	197	225	207	166	185	194	180	181	151	154	165	2,150
	-Industri Besar	7,247	9,827	11,258	10,343	8,311	9,286	9,682	9,023	9,032	7,559	7,697	8,233	107,478
	-Industri Kecil Menengah (UKM)	3,623	4,914	5,629	5,171	4,156	4,633	4,841	4,511	4,516	3,779	3,849	4,116	53,739
	-Horeka dan PKL	14,494	19,654	22,516	20,686	16,622	18,532	19,364	18,045	18,065	15,117	15,394	16,468	214,955
	Total	75,705	84,787	89,823	86,603	80,908	84,151	84,276	83,251	81,990	76,802	77,289	80,794	986,379
Neraca (Ton)	(7,729)	7,392	15,776	10,414	(2,949)	2,765	6,541	1,382	2,734	(5,902)	(5,091)	(3,571)	21,762	

Sumber: Data olahan Ditjen Hortikultura, 2017

Terlihat pada tabel 26, bahwa meskipun produksi cabai besar bervariasi tiap bulannya, ketersediaan produksi cabai besar cukup merata tercukupi sepanjang tahun dan surplus dibandingkan dengan dengan kebutuhan per bulan sepanjang tahun, sehingga tidak ada impor cabai segar di tahun 2017.

Selain pengaturan pola tanam, Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPTP, BPSB maupun mantri tani serta penyuluh juga melakukan pembinaan dan pendampingan khusus guna menumbuhkan para *champion* (petani unggulan) komoditas aneka cabai di daerah-daerah sentra produksi. Dengan penumbuhan *champion* cabai kegiatan pengembangan kawasan dalam pengaturan pola tanam, peningkatan kualitas SDM, pemasaran serta penyebaran informasi akan lebih efektif. Pada tahun 2017 *champion* Cabai berhasil ditumbuhkan di Kabupaten Garut, Cianjur, Sumedang, Bandung, Tasikmalaya, Temanggung, Magelang, Banjarnegara, Batang, Kebumen, Purbalingga, Malang, Kediri, Blitar, Sleman, Kulon Progo dan Lombok Timur. Penumbuhan *champion* tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yaitu Kabupaten Magelang, Temanggung, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur,

Sumedang dan Lombok Timur. Kementerian Pertanian telah melakukan MoU dengan *champion* tersebut untuk menjaga pasokan khusus dalam rangka stabilisasi harga melalui pasar murah di beberapa titik. Pasar murah yang telah dilakukan dimaksudkan untuk memutus rantai pasar dari petani produksi ke konsumen.

Masalah budidaya, serangan OPT, serta pemanfaatan benih bermutu merupakan isu-isu strategis di lapangan yang senantiasa segera dan langsung diselesaikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip budidaya ramah lingkungan dan GAP.

Dalam hal inovasi dan teknologi cabai besar, pada tahun 2017 berhasil dilakukan perakitan varietas cabai merah Cabai Merah (Besar) Hibrida dengan nama varietas yang diusulkan Inata Agrihorti : Hasil panen buah cabai 625 – 711 gram/tanaman atau 14,17 – 19,72 ton/ha, daya simpan buah pada suhu kamar (24 – 27°C) selama 7 hari, kebutuhan benih per hektar 250 gram dengan daya berkecambah benih 80%. Wilayah adaptasi dataran tinggi pada ketinggian 800 - 1500 m dpl. Dapat ditanam di luar musim/*off season* (Mei-Agustus). Selain itu Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang menghasilkan paket teknologi produksi cabai dengan produktivitas >20 Ton/Ha *off season*, Rancang Bangun Mesin Pembibitan Cabai Otomatis, dan Teknologi Penanganan Cabai Segar melalui Penyimpanan *Controlled Atmosphere* dan *Modified Atmosphere* untuk Mempertahankan Kesegaran (Gambar 31).



Gambar 31. Inovasi dan Teknologi Mendukung Peningkatan Produksi Cabai

Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi cabai besar dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Cabai Besar

No	Kegiatan	Fisik			Anggaran (000 Rp)			
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Hortikultura								
1	Pengembangan kawasan aneka cabai (Ha)	Ha	17.283	18.301	105,89	513.032.138	492.480.771	95,99
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan VUB Carvi Agrihorti Toleran Virus CHIMV	Varietas	1	1	100	200.000	199.887	99,94
2	Paket Teknologi produksi cabai dengan produktivitas >20Ton/Ha off season	Teknologi	24	24	100	350.000	343.164	98,05
3	Benih Sumber Cabai merah (kg)	Kg	100	31,3	31,30	1.000.000	998.638	99,86
4	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Cab	Teknologi	1	1	100	371.492	370.180	99,65
Total						514.953.630	494.392.639	96,01

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi cabai besar nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp514.953.630.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp494.392.639.000,- atau secara persentase sebesar 96,01%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi cabai besar, terdapat efisiensi sebesar 10,13%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi cabai besar dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan

SS 5. IKU 2 Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit	Target ≤17 Realisasi 20,96	% Capaian 81,10% Berhasil
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Capaian indikator variasi produksi bulanan cabai rawit tahun 2017 adalah 20,96 atau 81,10% lebih tinggi dari koefisien variasi yang ditargetkan yaitu 17, sehingga masuk kategori berhasil. Koefisien Variasi produksi cabai rawit tahun 2012 hingga 2017 disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Produksi bulanan dan Coefisien Variasi Cabe Rawit 2012-2017

Bulan	Produksi (Ton)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	45.572	48.266	51.725	59.203	43.868	48.160
2	53.267	47.596	53.547	67.984	56.383	61.901
3	52.940	53.996	56.472	70.451	63.646	69.875
4	70.360	56.367	68.900	85.658	67.526	74.134
5	75.862	66.204	85.159	92.200	71.743	78.764
6	69.700	70.718	75.514	89.625	78.944	86.669
7	64.229	62.210	83.355	85.138	111.944	122.898
8	62.653	65.522	78.219	82.450	90.771	99.654
9	59.799	61.165	66.048	62.055	88.923	97.624
10	52.025	62.445	61.933	59.317	87.628	96.203
11	51.754	62.847	55.775	61.851	80.786	88.692
12	44.053	56.165	63.827	54.005	73.826	81.050
Jumlah	702.214	713.502	800.473	869.938	915.988	1.005.624
Rata-rata	58.518	59.459	66.706	72.495	76.332	83.802
Standart Baku	10.184	7.111	11.623	13.661	17.856	17.563
Koefisien Variasi	17,40	11,96	17,42	18,84	23,39	20,96

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Jika dilihat dari tabel 28, produksi cabai tahun 2017 mencapai 1.005.624 ton atau meningkat 9,79% dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 915.988 ton. Meskipun demikian, produksi bulanan cabai besar bervariasi tiap bulannya. Produksi di bulan Januari merupakan produksi yang terendah dikarenakan memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi. Dibandingkan dengan cabai besar, produksi cabai rawit cenderung lebih tinggi koefisien variasinya dikarenakan lebih rentan terhadap cuaca dan serangan OPT (organisme pengganggu tanaman).

Stabilnya produksi bulanan cabai rawit tidak lepas dari terobosan kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian melalui; 1) peningkatan produktivitas, produksi, kualitas dan daya saing, 2) manajemen pola tanam mendukung produksi merata sepanjang tahun, 3) peningkatan mutu melalui penanganan pascapanen, 4) peningkatan kapabilitas SDM, 5) Sinergisme penelitian dan pengembangan, 6) optimalisasi industri perbenihan, 7) perlindungan

hortikultura, 8) dukungan kebijakan lintas sektoral dan akses permodalan. Berikut disajikan gambaran kebijakan dan strategi serta peta jalan (road map) pengembangan cabai tahun 2016 – 2045.



Gambar 32. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cabai Tahun 2016 - 2019

Kebijakan dan strategi ini mampu menciptakan kondisi pasar dan pasokan yang cukup kondusif dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional. Keseimbangan *supply demand* cabai rawit tahun 2017 terlihat dalam tabel 29.

Tabel 29. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Cabai Rawit 2017

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	
Produksi (Ton)	48.160	61.901	69.875	74.134	78.764	86.669	122.898	99.854	97.624	96.203	88.892	81.050	1.005.624	
Kehilangan/tercecer (Ton)	2.485	3.194	3.606	3.825	4.064	4.472	6.342	5.142	5.037	4.964	4.577	4.182	51.890	
Kebutuhan (Ton)	Konsumsi Rumah Tangga	53.906	53.906	53.906	53.906	57.499	58.398	53.906	56.601	53.906	53.906	56.601	660.345	
	Konsumsi Non Rumah Tangga	9.285	11.934	13.472	14.293	15.186	16.710	23.695	19.213	18.822	18.548	17.100	193.884	
	-Benih	135	173	196	208	221	243	344	279	273	269	248	227	2.816
	-Industri Besar	1.445	1.857	2.096	2.224	2.383	2.600	3.687	2.990	2.929	2.886	2.681	2.431	30.169
	-Industri Kecil Menengah (UKM)	2.408	3.095	3.494	3.707	3.938	4.333	6.145	4.983	4.881	4.810	4.435	4.052	50.281
	-Horeka & PKL	5.298	6.809	7.686	8.155	8.664	9.534	13.519	10.962	10.739	10.582	9.756	8.915	110.619
Total	63.191	65.840	67.378	68.199	72.685	75.108	77.600	75.814	72.728	72.454	71.006	72.227	854.229	
Neraca (Ton)	(17.516)	(7.134)	(1.108)	2.110	2.015	7.089	38.956	18.697	19.859	18.785	13.110	4.640	99.505	

Sumber: Data olahan Ditjen Hortikultura, 2017

Sebagaimana terlihat pada tabel 29 meskipun produksi cabai rawit

bervariasi tiap bulannya, ketersediaan produksi cabai rawit merata tercukupi sepanjang tahun.

Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi cabai rawit dapat dilihat pada tabel 30.

Tabel 30. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Cabai Rawit

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (000 Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Hortikultura								
1	Pengembangan kawasan cabai rawit (Ha)	Ha	17,283	18,301	105.89	513,032,138	492,480,771	95.99

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi cabai rawit nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp513.032.138.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp492.480.771.000,- atau secara persentase sebesar 95,99%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi cabai rawit, terdapat efisiensi sebesar 10,31%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi cabai rawit dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan

Akar permasalahan belum tercapainya target koefisien variasi produksi bulanan cabai rawit di tahun 2017 disebabkan antara lain: (1) masih terbatasnya areal tanam cabai rawit, (2) masih terbatasnya pemanfaatan teknologi budidaya cabai rawit yang sesuai GAP (*Good Agricultural Practices*), (3) terbatasnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya cabai rawit, (4) terbatasnya informasi pasar dan permodalan yang dimiliki petani, 4) Gangguan Iklim dan OPT 5) Ketersediaan sumber daya air terbatas.

Berdasarkan permasalahan, maka solusi yang dapat diusulkan sebagai rekomendasi perbaikan ke depan antara lain: (1) perluasan areal tanam, terutama di luar Jawa, (2) bantuan sarana dan prasarana budidaya cabai rawit, (3) sosialisasi penerapan GAP dalam budidaya cabai rawit, (4) Peningkatan kapasitas petani dan pelaku usahatani cabai rawit, (5) Penanaman di luar musim (6) Penanaman

cabai *polybag*, 7) aplikasi teknologi-teknologi budidaya seperti penggunaan sungkup plastik pada saat musim hujan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

SS 5. IKU 3 Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah	Target ≤20 Realisasi 16,14	% Capaian 123,92% Sangat Berhasil
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Capaian koefisien variasi produksi bulanan bawang merah mencapai nilai 16,14 atau 123,92% lebih rendah dari target 20, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Koefisien variasi produksi bawang merah tahun 2012 hingga 2017 disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31. Produksi Bulanan dan Koefisien Variasi Bawang Merah 2012-2017

Bulan	Produksi (Ton)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	107.946	115.486	149.013	124.667	133.012	138.905
2	73.350	68.136	66.234	107.208	129.605	135.347
3	46.254	59.307	58.506	56.474	85.005	88.771
4	57.994	77.632	83.949	99.635	101.522	106.020
5	80.953	70.657	98.307	91.369	136.361	142.402
6	92.116	89.464	140.637	130.209	122.210	127.625
7	104.974	88.991	122.245	129.755	118.046	123.276
8	114.083	109.625	114.597	122.545	135.390	141.388
9	81.906	100.684	100.475	126.940	112.839	117.838
10	100.921	87.930	102.696	87.944	150.724	157.402
11	47.862	55.836	104.847	90.648	86.339	90.164
12	55.837	87.025	92.480	61.790	135.808	141.825
Jumlah	964.195	1.010.773	1.233.984	1.229.184	1.446.860	1.510.961
Rata-rata	80.350	84.231	102.832	102.432	120.572	125.913
Standart Baku	24.192	18.777	26.757	25.732	20.704	20.321
Koefisien Variasi	30,11	22,29	26,02	25,12	17,1715	16,1389

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Jika dilihat dari tabel 31, pola tanam reguler yang umum dilakukan oleh petani bawang merah adalah pada Bulan April-September, dengan waktu panen raya pada bulan Juni dan Agustus. Bulan Oktober-Januari dikenal sebagai bulan *off season*, dimana petani tidak banyak melakukan penanaman sehingga mengakibatkan berkurangnya pasokan di bulan-bulan tersebut. Kondisi ini ikut

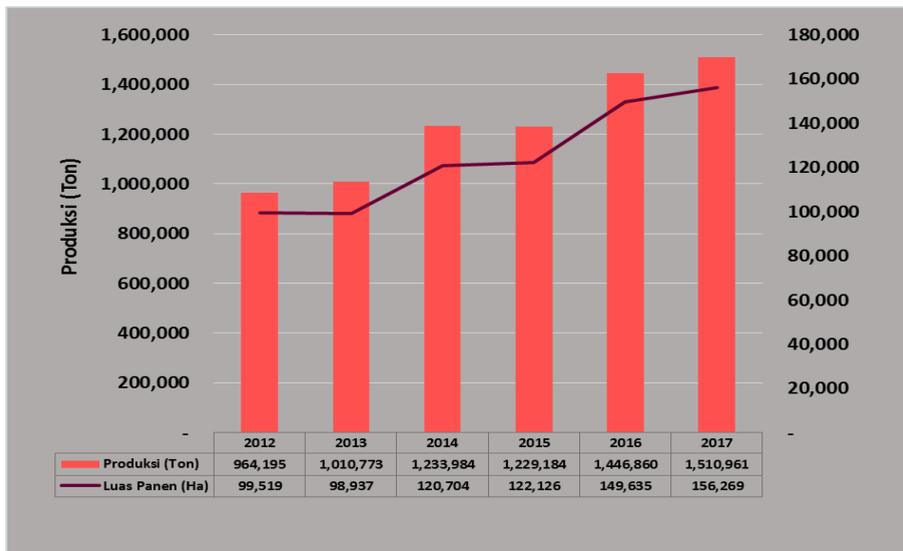
berimbas kepada ketidakstabilan harga baik di tingkat petani maupun harga yang diterima oleh konsumen.

Langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Pertanian berupa penerapan manajemen tanam bawang merah yang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan sepanjang tahun, terutama saat *off season* dan menjelang hari-hari besar nasional. Sosialisasi dan edukasi baik ke petani, penyuluh, petugas dinas untuk melakukan pertanaman di luar musim terus dilakukan agar petani bisa mendapatkan harga "baik" setiap saat namun tidak memberatkan konsumen. Target pemerintah yaitu menjaga stabilitas pasokan dan harga bawang merah sepanjang tahun tanpa Impor. Hasilnya cukup signifikan, mampu mendorong perubahan pola tanam dari yang berbasis musim menjadi berbasis kebutuhan. Periode *off season* sudah tidak ada lagi karena telah diantisipasi dengan penambahan luas tanam baik swadaya maupun dukungan dana APBN serta APBD, sehingga produksi meningkat dan memenuhi kebutuhan nasional bahkan ekspor. Pada Tahun 2017 Indonesia berhasil mengekspor bawang merah ke berbagai Negara diantaranya adalah Thailand (500 Ton) (Gambar 33.), Singapura (247,5 Ton), Timor Leste (30 Ton) dan Vietnam (45 ton) dari lokasi sentra yang berasal dari Kabupaten Brebes, Nganjuk, Pasuruan, Malaka dan Enrekang. Keberhasilan ekspor bawang merah ini ditopang oleh adanya produksi dalam negeri yang tercukupi. Produksi dalam negeri melimpah disebabkan berhasilnya program pengembangan kawasan bawang merah.



Gambar 33. Menteri Pertanian Melakukan Pelepasan Ekspor Bawang Merah ke Thailand

Tahun 2017 luas tanam bawang merah naik 5.43% dibandingkan Tahun 2016 dengan produksi mencapai 1,51 juta ton (Gambar 34), serta ditutup dengan tidak adanya impor bawang merah konsumsi masuk ke wilayah NKRI.



Gambar 34. Grafik Produksi dan Luas Panen Bawang Merah Tahun 2012-2017

Perkembangan bawang merah dipengaruhi pula oleh perubahan luas panen yang terjadi di provinsi sentra produksi. Berdasarkan Gambar 34 terlihat adanya korelasi positif antara luas panen bawang merah dengan produksi bawang merah, dimana luas panen menjadi faktor yang cukup dominan dalam peningkatan produksi bawang merah.

Keberhasilan peningkatan produksi bawang merah ini disebabkan adanya upaya khusus yang telah dilakukan sejak tahun 2015 hingga beberapa tahun ke depan untuk memperluas pertanaman dan meningkatkan produksi bawang merah melalui; 1) Pengembangan dan penumbuhan kawasan pada sentra produksi dengan penekanan pada pengembangan berbasis kelompok tani di pulau Jawa dan Indonesia Timur, 2) Pengembangan perbenihan dengan kemandirian benih, 3) Pengelolaan sistem produksi merata sepanjang tahun, melalui produksi di luar musim (*off season*) di sentra utama yang didukung oleh teknologi pengairan dan budidaya *off season*,

pengembangan sentra produksi di luar Pulau Jawa serta pengaturan pola produksi, 4) Penerapan sistem jaminan mutu pada proses produksi, 5) Peningkatan usaha penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk, melalui fasilitasi bantuan sarana pasca panen dan pengolahan hasil (*bangsal pascapanen*, alat pengolahan hasil skala *home industry*), fasilitasi kemiraan dan jaringan usaha, 6) Peningkatan kapabilitas SDM, melalui optimalisasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan dan kelembagaan tani (asosiasi/gapoktan/koperasi tani), 7) Sinergisme penelitian dan pengembangan, melalui dukungan penelitian *off season*, studi kelayakan usaha, dukungan kebijakan dan pengembangan di daerah.

Dalam segi inovasi dan teknologi, untuk meningkatkan produksi



Gambar 35. VUB Bawang Merah
Violetta Agrihorti 2

bawang merah, telah berhasil dirakit varietas bawang merah dengan nama varietas Violetta Agrihorti 2, mempunyai keunggulan agak tahan terhadap cendawan *Alternaria porri*, produksi umbi kering tinggi, warna umbi merah-ungu tua (menarik) dan adaptif di dataran tinggi (Gambar 35).

Selain itu juga dihasilkan Teknologi Budidaya Bawang Merah Produksi 40 ton/ha *Off Season* menggunakan Bawang asal *True Shalot Seed* (TSS). Telah dialokasikan pula 650 kg benih sumber bawang merah yang dilakukan dengan perbanyakannya secara vegetatif dengan menggunakan umbi sebagai benih.

Kementerian Pertanian melalui Balitbang juga menghasilkan alat dan sarana dalam mendukung produksi bawang merah, antara lain: Rekayasa Mesin Tanam dan Panen Bawang Merah, Rekayasa Pengembangan *In Store Controlled Room* (ISCR) untuk mempertahankan Kualitas Bawang Merah dalam Masa Simpan, Kegiatan Rancang Bangun Mesin Pembibitan Bawang Merah dan

Cabai Otomatis (*Automatic Seeding Machine for Shallot and Chili Paper*).

Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi bawang merah dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Bawang Merah

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (000 Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Hortikultura								
1	Pengembangan kawasan bawang merah	Ha	7,630	7,432	97.40	304,075,584	276,448,806	90.91
2	Produksi Benih Bawang Merah	Kg	2,416,695	2,319,797	95.99	23,944,713	22,885,785	95.58
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan varietas unggul bawang merah Violetta Agrihorti	varietas	1	1	100	400,000	399,202	99.80
2	Paket Teknologi Budidaya Bawang Merah produksi 40 ton/ha off season	teknologi	1	1	100	350,000	347,912	99.40
3	Benih sumber bawang merah	Kg	650	111	17	1,783,000	1,772,070	99.39
4	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Bawang Merah	Teknologi	1	1	100	347,648	345,201	99.30
Total						330,900,945	302,198,976	91.33

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi bawang merah nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp330.900.945,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp302.198.976,- atau secara persentase sebesar 91,33%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi bawang merah, terdapat efisiensi sebesar 6,08%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi bawang merah dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 6 (SS 6) BERKEMBANGNYA KOMODITAS BERNILAI TAMBAH DAN BERDAYA SAING

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing, seperti: kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, teh, nenas, manggis, salak, mangga, daging kambing dan domba. Target dari sasaran strategis ini adalah produksi dari beberapa komoditas pertanian tersebut.

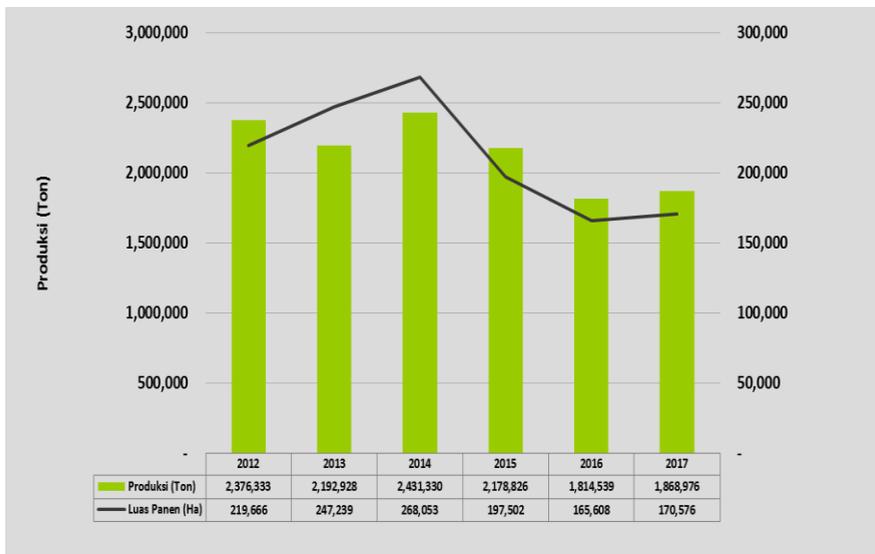
Sasaran strategis nomor enam ini memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) produksi mangga, (2) produksi nenas, (3) produksi manggis, (4) produksi salak, (5) produksi kentang, (6) produksi karet, (7) produksi kopi, (8) produksi kakao, (9) produksi kelapa, (10) produksi teh, dan (11) produksi daging kambing dan domba.

SS 6. IKU 1 Produksi Mangga	Target 2.399 ribu ton Realisasi 1.869 ribu ton	% Capaian 77,9% Cukup Berhasil
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Mangga adalah komoditas buah yang cukup potensial dan mempunyai pangsa pasar ekspor yang cukup menjanjikan. Berdasarkan angka prognosa tahun 2017, produksi mangga mencapai 1.869 ribu ton, realisasi ini lebih rendah dibandingkan target kinerja tahun 2017 sebesar 2.399 ribu ton sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 77,9 % atau dapat dikatakan cukup berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, produksi mangga meningkat sebesar 3%.

Produksi mangga dalam 6 (enam) tahun terakhir berfluktuasi dengan

kecenderungan meningkat. Sempat mencapai produksi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 2.413 ribu ton, produksi mangga mengalami penurunan pada tahun 2015 dan terus meningkat hingga tahun 2017. Secara rinci produksi dan luas panen mangga dapat dijabarkan pada Gambar 36.



Gambar 36. Produksi dan Luas Panen Mangga Tahun 2012-2017

Berdasarkan Gambar 36. terlihat bahwa fluktuasi produksi mangga tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan luas panen. Pada saat luas panen meningkat cukup signifikan di tahun 2011 hingga 2014, produksi mangga cenderung berfluktuasi. Selanjutnya, pada tahun 2015 hingga 2017 pertumbuhan produksi dan luas panen cenderung linier.

Dibandingkan target produksi mangga tahun 2019 sebesar 2.519 ribu ton, maka realisasi produksi mangga pada tahun 2017 sebesar 1.869 ribu ton baru mencapai 74,2%. Tren pertumbuhan luas areal mangga yang cenderung stabil bahkan mengalami penurunan dikhawatirkan akan menjadi penghambat dalam mewujudkan target produksi mangga di Tahun 2019.

Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung pencapaian produksi mangga yaitu pengembangan kawasan mangga dengan kegiatan didalamnya antara lain: fasilitasi bantuan sarana prasarana seperti benih, pupuk, alsintan, dan mulsa plastik, perlindungan terhadap OPT dan dampak perubahan iklim, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani.

Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi mangga dapat dilihat pada tabel 33

Tabel 33 Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Mangga

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Hortikultura								
	Pengembangan kawasan mangga	Ha	1,355	1,240	91.51	12,216,882,630	11,029,886,617	90.28

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi mangga nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp12.216.882.630,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp11.180.025.432,- atau secara persentase sebesar 90,28%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi mangga, terdapat efisiensi sebesar 1,36%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi bawang merah dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Akar permasalahan tidak tercapainya rasio produksi mangga dikelompokkan kedalam 3 domain permasalahan, yaitu

- 1) Dampak perubahan iklim yang tidak menentu dengan frekuensi curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan proses pembungaan terhambat dan rontok sebelum menjadi buah,
- 2) Adanya serangan OPT terutama lalat buah (*Bactrocera spp*) yang merusak buah mangga.
- 3) Selain itu, pada pertanaman *existing* produktivitas pohon mangga yang memproduksi semakin menurun, hal ini disebabkan umur

tanaman tersebut rata-rata sudah di atas 15-20 tahun, sehingga pengembangan kawasan baru sangat diperlukan.

4) Penerapan inovasi teknologi masih belum optimal.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi mangga, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kawasan-kawasan pengembangan mangga. Dengan terbangunnya kawasan budidaya mangga maka pendampingan dan pembinaan pengelolaan tanaman mangga dapat lebih mudah dilakukan. Di dalam kawasan mangga diberikan berbagai bantuan untuk merehabilitasi tanaman mangga yang sudah tua, menangani serangan hama dan penyakit tanaman, pemupukan, dan pelaksanaan *Good Agricultural Practices* (GAP).

SS 6. IKU 2 Produksi Nenas	Target 1.902 ribu ton Realisasi 1.431 ribu ton	% Capaian 75,24% Berhasil
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------



Nenas adalah komoditas buah yang cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan industri olahan. Pangsa pasar nenas sebagian besar didominasi oleh produk olahan. Berdasarkan angka prognosa tahun 2017, produksi nenas mencapai 1.431 ribu ton lebih rendah dibandingkan target tahun 2017 sebesar 1.902 ribu ton (75,24%) atau belum mencapai target. Meskipun demikian produksi nenas dinyatakan berhasil karena jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi peningkatan produksi sebesar 2,50%. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 1.948 ribu ton, maka produksi nenas tahun 2017 baru mencapai 73,46% atau masih cukup jauh untuk memenuhi target tersebut. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih besar dan nyata untuk dapat mendukung peningkatan produksi

nenas sehingga mampu memenuhi pasar domestik dan internasional. Gambaran capaian produksi dan luas panen nenas tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 37.



Gambar 37. Produksi dan Luas Panen Nenas Tahun 2012-2017

Fluktuasi produksi nenas selama enam tahun terakhir ini dipengaruhi oleh peningkatan maupun penurunan yang terjadi pada luas panen nenas seperti yang diilustrasikan pada Gambar 21. Trend produksi nenas dalam periode 2012 - 2016 menunjukkan peningkatan di awal tiga tahun pertama dimana bahkan pada tahun 2013, produksi nenas mencapai produksi tertinggi sebesar 1.882 ribu ton, namun pada periode 2014-2016, menurun secara signifikan secara berturut-turut sebesar 2,51% , 5,77%, dan 19,28% serta meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 2,5%.

Sedangkan, perkembangan luas panen menunjukkan penurunan sejak 2013 sampai tahun 2015. Hingga akhirnya di tahun 2016 luas panen nenas mengalami peningkatan mencapai 14.167 ha dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 14.521 ha.

Kementerian Pertanian melaksanakan pengembangan kawasan nenas dalam mendukung pencapaian produksi nenas dengan berbagai kegiatan didalamnya antara lain: fasilitasi bantuan sarana

prasarana seperti benih, pupuk, alsintan, dan mulsa plastik, perlindungan terhadap OPT dan dampak perubahan iklim, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani. Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi nenas dapat dilihat pada tabel 34

Tabel 34 Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Nenas

No	Kegiatan	Fisik			Anggaran (Rp)			
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Hortikultura								
	Pengembangan kawasan nenas	Ha	126	126	100.00	1,136,034,842	1,120,778,801	98.66

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi nenas nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp1.136.034.842,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp1.120.778.801,- atau secara persentase sebesar 98,66%. Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi nenas, terdapat efisiensi sebesar 1,36%

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi nenas dikelompokkan kedalam 2 domain permasalahan, yaitu

- 1) Minimnya fasilitasi bantuan pemerintah untuk pengembangan kawasan nenas di sentra produksi nenas. Pada tahun 2011 hingga 2015 terdapat bantuan pengembangan kawasan nenas seluas 71 ha, 123 ha, 25 ha, 60 ha dan 60 ha namun di tahun 2016 hanya seluas 23 ha (Kubu raya dan Kediri), dan pada tahun 2017 hanya 126 ha.
- 2) Selain itu, penyebab lain belum optimalnya produksi nenas adalah perawatan atau pemeliharaan pertanaman pada sentra-sentra produksi sudah mulai tidak intensif dibandingkan di awal pengembangan, banyaknya tanaman yang sudah tidak produktif dan belum direvitalisasi, serta adanya alih komoditas.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi nenas, maka rekomendasi

solusi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kawasan-kawasan pengembangan nenas. Dengan terbangunnya kawasan budidaya nenas maka pendampingan dan pembinaan pengelolaan tanaman nenas dapat lebih mudah dilakukan. Di dalam kawasan nenas diberikan berbagai bantuan untuk merehabilitasi tanaman nenas yang sudah tua, menangani serangan hama dan penyakit tanaman, pemupukan, dan pelaksanaan *Good Agricultural Practices* (GAP).

<p>SS 6. IKU 3 Produksi Manggis</p>	<p>Target 120 ribu ton Realisasi 168,5 ribu ton</p>	<p>% Capaian 140,42 % Sangat Berhasil</p>
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



Manggis adalah komoditas buah andalan ekspor Indonesia. Permintaan manggis ke beberapa negara di Timur Tengah dan Eropa selama 5 (lima) tahun terakhir cukup meningkat. Berdasarkan angka prognosa tahun 2017, produksi manggis mencapai 168.500 ton lebih tinggi dibandingkan target tahun 2017 sebesar 120 ribu ton (140,42%) atau telah melampaui target, masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Selama periode 2012 hingga 2017, rata-rata produksi manggis mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 13,01 %. Hal ini dapat dilihat dari trend produksi manggis setiap tahunnya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014, yang disebabkan dampak perubahan iklim pada kurun waktu tersebut. Meskipun demikian, trend produksi manggis secara umum terus meningkat hingga tahun 2017.

Sementara itu, produksi tahun 2017 apabila dibandingkan terhadap target produksi jangka menengah tahun 2019 (akhir tahun RPJMN) sebesar 155 ribu ton, produksi manggis telah mencapai 108,71%. Capaian produksi dan luas panen manggis disajikan pada Gambar 38.



Gambar 38. Produksi dan Luas Panen Manggis Tahun 2012-2017

Peningkatan produksi manggis di tahun 2017 disebabkan antara lain oleh penerapan budidaya yang baik dan benar sesuai SOP dan GAP khususnya pada kelompok tani yang mendapat fasilitasi bantuan untuk pengembangan manggis sejak tahun 2010, peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat dari program bantuan benih buah, terkendalinya tanaman dari gangguan OPT dan dampak iklim. Meskipun demikian peningkatan produksi belum sepenuhnya didukung oleh akses pasar yang lebih luas serta dukungan harga jual yang baik. Sehingga, kedepan diperlukan adanya dukungan penguatan jaringan pasar (domestik dan internasional), kelembagaan usaha dan perbaikan teknologi pascapanen dalam rangka peningkatan mutu produk dan daya saing.

Selain hal tersebut diatas, peningkatan produksi manggis juga dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi pada luas panen manggis. Terlihat bahwa luas panen manggis cenderung meningkat sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, kemudian menurun di tahun 2014 dan dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017

menjadi seluas 23.816 ha. Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi manggis dapat dilihat pada tabel 35

Tabel 35 Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Manggis

No	Kegiatan	Fisik			Anggaran (Rp)			
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi (%)	(%)	
Program Ditjen Hortikultura								
	Pengembangan kawasan manggis	Ha	470	470	100	4,237,590,285	4,180,682,831	98.66

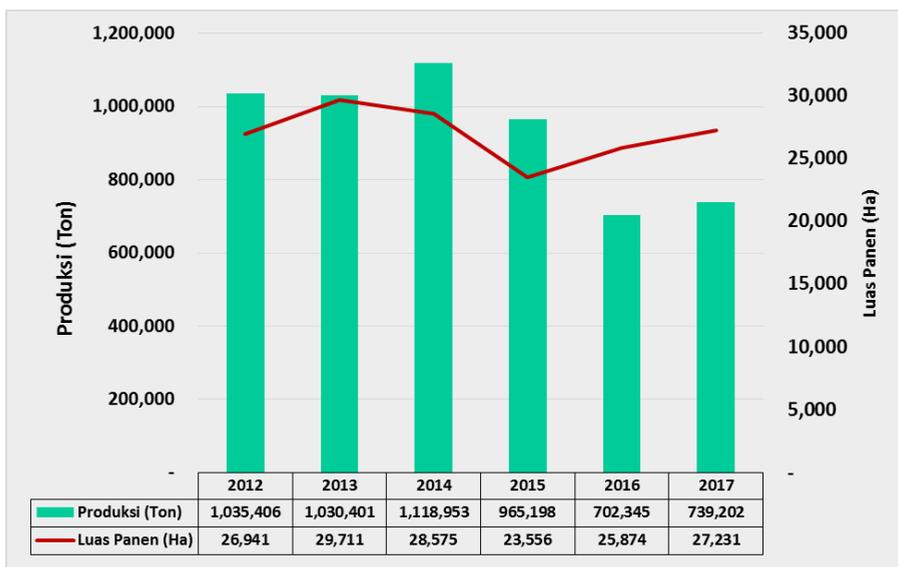
Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi manggis nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp4.237.590.285,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp4.180.682.831,- atau secara persentase sebesar 98,66%. Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi manggis, terdapat efisiensi sebesar 1,36%

SS 6. IKU 4 Produksi Salak	Target 1.152 ribu ton Realisasi 739 ribu ton	% Capaian 64,15% Cukup Berhasil
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------



Produksi salak tahun 2017 ditargetkan sebesar 1.152 ribu ton, sementara realisasi produksi salak sebesar 739 ribu ton (64,15%) atau masuk kategori **Cukup Berhasil**. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2016 sebesar 702 ton, maka produksi tahun 2017 meningkat 5,25%. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 1.146 ribu ton, produksi tahun 2017 baru mencapai 64,48%. Gambaran produksi dan luas panen salak tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 39. berikut.



Gambar 39. Produksi dan Luas Panen Salak Tahun 2012-2017

Meskipun produksi salak di tahun 2017 belum mampu mencapai target seperti yang diharapkan, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan produksi. Peningkatan produksi salak tahun 2017 didukung oleh pengembangan kawasan salak dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian didalamnya seperti fasilitasi bantuan sarana prasarana seperti benih, pupuk, alsintan, dan mulsa plastik, perlindungan terhadap OPT dan dampak perubahan iklim, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani. Rincian kegiatan pendukung pencapaian produksi salak dapat dilihat pada tabel 36

Tabel 36 Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Salak

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Hortikultura								
	Pengembangan kawasan salak	Ha	75	62	82.67	676,211,216	533,704,191	78.93

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi salak nasional,

Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp676.211.216,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp533.704.191,- atau secara persentase sebesar 78,93%. Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi salak, terdapat efisiensi sebesar 4,74%

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi salak tahun 2017 disebabkan oleh bencana alam yang terjadi di sentra produksi salak, yaitu Kabupaten Karangasem sehingga banyak tanaman salak terkena puso. Alih fungsi lahan, serangan OPT lalat buah (*Bactrocera spp*) dan pemeliharaan kurang di sentra salak menjadikan produksi jauh dibawah target yang ditetapkan.

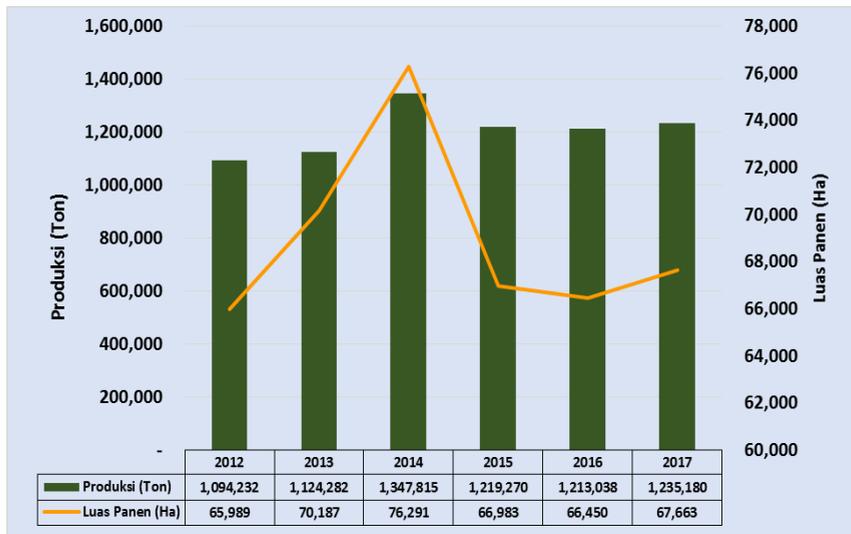
Berdasarkan permasalahan tidak tercapainya produksi salak ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan adalah peningkatan penerapan budidaya yang baik dan benar (sesuai SOP dan GAP) khususnya pada kelompok tani yang mendapat fasilitasi bantuan untuk rehabilitasi pohon salak yang terkena dampak bencana alam, penambahan luas tanam, penggantian varietas yang diminati konsumen, pengendalian OPT lalat buah secara preemtif.

<p>SS 6. IKU 5 Produksi Kentang</p>	<p>Target 1.437 ribu ton Realisasi 1.235 ribu ton</p>	<p>% Capaian 85,9% Berhasil</p>
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------



Produksi kentang tahun 2017 belum berhasil mencapai target yang direncanakan, dimana target produksi kentang sebesar 1.437 ribu ton dan dapat terealisasi sebesar 1.235 ribu ton atau mencapai 85,9% (**Berhasil**). Produksi tahun 2017 tersebut meningkat 1,83% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2016 sebesar 1.213 ribu ton. Selanjutnya, jika

dibandingkan dengan target jangka menengah di tahun 2019 sebesar 1.431 ribu ton, maka capaian produksi kentang tahun 2017 baru mencapai 86,30% atau masih memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target. Ilustrasi capaian produksi dan luas panen kentang tahun 2017 disajikan pada Gambar 40.



Gambar 40. Produksi dan Luas Panen Kentang Tahun 2012-2017

Produksi kentang dalam enam tahun terakhir ini menunjukkan trend peningkatan, walaupun di tahun 2015 sempat mengalami penurunan. Namun, produksi kentang kembali mengalami peningkatan di tahun 2016. Adapun, rata-rata pertumbuhan produksi kentang adalah sebesar 4,82%. Peningkatan dan penurunan produksi kentang sangat dimungkinkan mendapat pengaruh dari perubahan luas panen kentang selama enam tahun kebelakang.

Kementerian Pertanian melaksanakan pengembangan kawasan kentang dengan beberapa kegiatan didalamnya antara lain: fasilitasi bantuan sarana prasarana seperti benih, pupuk, alsintan, dan mulsa plastik, perlindungan terhadap OPT dan dampak perubahan iklim, serta pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani. Rincian

kegiatan pendukung pencapaian produksi kentang dapat dilihat pada tabel 37

Tabel 37 Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kentang

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Hortikultura								
	Kawasan Kentang	Ha	262	187	71.37	4,201,713,394	2,629,102,425	62.57
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
	Perakitan VUB Kentang Spudy Agrihorti	varietas	1	1	100	117,000,000	109,000,000	93.16
Total						4,318,713,394	2,738,102,425	63.40

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi kentang nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp4.318.713.394,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp2.738.102.425,- atau secara persentase sebesar 63,40%. Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi manggis, terdapat efisiensi sebesar 13,80%

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi kentang sesuai target dikelompokkan kedalam 5 domain permasalahan, yaitu ketersediaan benih yang belum mencukupi, beberapa lahan daerah sentra mengalami pencemaran baik itu oleh pathogen tular tanah (Nematoda Sista Kuning (NSK)) maupun pencemaran lainnya, serta adanya bencana alam tanah longsor ataupun erosi pada beberapa lokasi dengan lahan lereng. Akar permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 38.

Tabel 38. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Perbaikan Pencapaian Produksi Kentang

No.	Akar Masalah	Rekomendasi solusi perbaikan kinerja
1	Harga komoditas kentang menurun drastis di awal tahun sehingga petani enggan menanam walaupun harga benih murah	Menjaga stabilitas harga kentang konsumsi dengan memotong rantai pemasaran melalui Toko Tani Indonesia (TTI)
2	Pada sentra-sentra produksi kentang seperti Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara dan Batang, lahannya tercemar NSK sehingga tidak cocok untuk perbenihan dan produksi serta adanya serangan OPT erwinia pada produksi kentang	Rotasi tanaman dengan tanaman lain selama beberapa tahun untuk memutuskan siklus NSK dan Erwinia
3	Cuaca hujan yang tinggi menyebabkan banyaknya serangan hama dan umbi kentang membusuk sebelum waktu panen.	Gerakan Pengendalian OPT
4	Pengaruh Impor Kentang, khususnya kebutuhan kentang untuk industri. Nilai impor kentang pada tahun 2017 adalah sebesar	Pengembangan budidaya kentang untuk kebutuhan industri

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2017

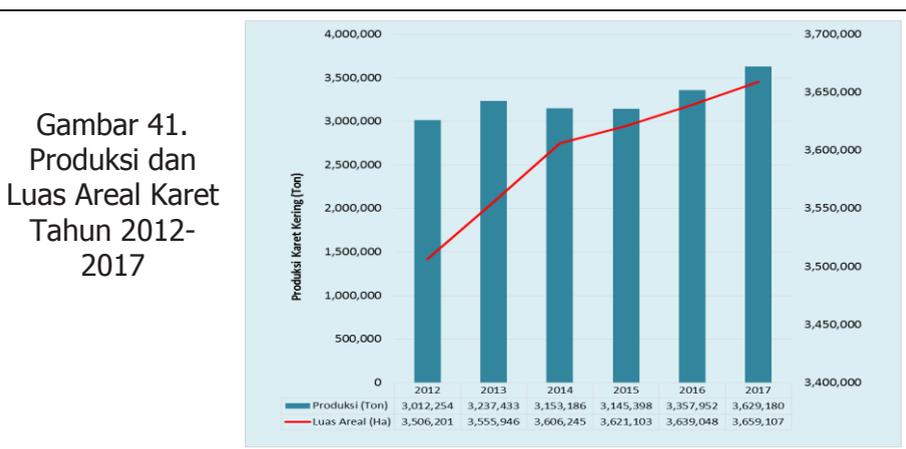
Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi kentang ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan antara lain: menggunakan varietas baru yang lebih toleran dan bernilai komersial, rotasi tanaman untuk memutuskan siklus OPT terutama NSK, pelepasan varietas lokal dan unggul, dan gerakan pengendalian OPT.

<p>SS 6. IKU 6 Produksi Karet</p>	<p>Target 3.559 ribu ton karet kering Realisasi 3.629 ribu ton karet kering</p>	<p>% Capaian 101,97% Sangat Berhasil</p>
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------



Karet merupakan komoditas perkebunan andalan ekspor Indonesia. Permintaan karet ke beberapa negara di Amerika dan Eropa selama 5 (lima) tahun terakhir cukup meningkat. Berdasarkan angka sementara tahun 2017, produksi karet mencapai 3.230 ribu ton, lebih kecil dibandingkan target tahun 2017 sebesar 3.559 ribu ton (101,97%) atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Selama periode 2012 hingga 2017, produksi karet mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari *trend* produksi karet setiap tahunnya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014, namun *trend* produksi karet secara umum terus meningkat hingga tahun 2017 meningkat 8% dibanding produksi tahun 2016.

Sementara itu, produksi tahun 2017 apabila dibandingkan terhadap target produksi jangka menengah tahun 2019 (akhir tahun RPJMN) sebesar 3.810 ribu ton, produksi karet telah mencapai 95,25% sehingga diperlukan upaya keras untuk dapat mencapai target. Ilustrasi capaian produksi dan luas areal karet tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 41.



Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai target produksi karet tahun 2017 antara lain:

(1) Peremajaan Tanaman Karet

Peremajaan tanaman karet dilakukan di kebun-kebun karet yang pohonnya sudah tidak berproduksi dengan baik. Karet yang sudah tua ditebang dan akarnya dibongkar sedang kayunya bisa digunakan sebagai kayu bakar. Perlakuan peremajaan dilakukan seperti pada saat penanaman baru. Hanya saja pada penanaman bibit perlu dilakukan pemupukan karena tanah bekas kebun karet sangat kurang unsur haranya. Kegiatan peremajaan tanaman karet di tahun 2017 dilakukan di 42 Kabupaten di 10 Provinsi di Indonesia dengan total lahan seluas 12.077 Ha.

(2) Perluasan Tanaman Karet

Perluasan karet dilaksanakan pada daerah yang secara agroklimat sesuai untuk pengembangan tanaman karet yaitu diutamakan pada wilayah perbatasan. Fasilitas yang diberikan adalah benih karet unggul bermutu serta pengawalan dan pendampingan. Kegiatan perluasan tanaman karet di tahun 2017 dilaksanakan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dengan total lahan seluas 100 Ha.

(3) Kegiatan Pendukung Lainnya

Dalam peningkatan produksi karet nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kebersamaan 200 orang petani karet, serta penguatan kelembagaan petani

(4) Teknologi dan Inovasi

Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian menciptakan teknologi Teknologi mitigasi kekeringan pada tanaman karet, yaitu dengan pembuatan lubang biopori. Lubang biopori dibuat sedalam 1 meter dengan jumlah lubang biopori terbaik sebanyak 5 lubang untuk TBM dan 4 lubang untuk TM mampu meningkatkan air tersedia dan diameter batang terbesar pada tanaman karet (Gambar 42).



Gambar 42. Teknologi Mitigasi Kekeringan pada Tanaman Karet
Kegiatan pendukung pencapaian produksi karet dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Karet Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Perkebunan								
1	Peremajaan Tanaman Karet	Ha	5.100	4.750	93,14	35.457.562.000	29.569.529.300	83,39
2	Peremajaan Tanaman Karet (P)	Ha	9.550	7.327	76,72	88.415.375.000	57.495.765.330	65,03
3	Perluasan Tanaman Karet	Ha	100	100	100,00	802.000.000	464.625.000	57,93
4	Pengawasan dan Pendampingan Peremajaan Karet (P)	Keg	57	57	100,00	3.935.483.000	3.201.891.703	81,36
5	Pengawasan dan Pendampingan Perluasan Karet(P)	Keg	2	2	100,00	237.960.000	155.410.500	65,31
6	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Karet	Keg	1	1	100,00	449.655.000	351.652.000	78,20
7	Pelatihan Penuhbanan Kebersamaan Petani Karet	Orang	200	200	100,00	240.460.000	219.798.000	91,41
8	Penguatan Kelembagaan Petani Karet	Orang	30	30	100,00	95.385.000	86.755.000	90,95
Dukungan Perbenihan Perkebunan								
1	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (entres karet)	Ha	5	5	100,00	753.253.000	710.039.000	94,26
2	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam (entres karet)	Keg	2	2	100,00	174.604.000	102.834.000	58,90
3	Penyediaan benih siap tanam	Btg	1.400.000	700.000	50,00	2.229.772.000	1.248.106.000	55,97
4	Pengawasan dan Pembinaan benih karet	Keg	4	4	100,00	663.031.000	543.344.000	81,95
Dukungan Perlindungan Perkebunan								
1	Denfarm penerapan PHT tanaman karet	Ha	175	175	100,00	627.213.000	627.213.000	100,00
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan								
1	Pasca panen karet	KT	96	96	100,00	7.498.450.000	6.853.314.000	91,40
2	Fasilitasi pengolahan karet	Unit	21	21	100,00	5.638.000.000	5.113.890.000	90,70
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1	Teknologi Budaya tanaman karet	Teknologi	1	1	100	190.000.000	186.200.000	98,00
Total						147.408.203.000	106.930.366.833	72,54

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi karet nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp147.408.203.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp106.930.366.833,- atau secara persentase sebesar 72,54%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi karet, terdapat efisiensi sebesar 15,29%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi karet dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

<p>SS 6. IKU 7 Produksi Kopi</p>	<p>Target 637.539 ton kopi berasan Realisasi 668.683 ton kopi berasan</p>	<p>% Capaian 104,88% Sangat Berhasil</p>
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------



Kopi adalah jenis minuman yang penting bagi sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya karena kenikmatan konsumen peminum kopi namun juga karena nilai ekonomis bagi negara-negara yang memproduksi dan mengekspor biji kopi (seperti Indonesia). Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi hasil produksi.

Produksi kopi tahun 2017 ditargetkan sebesar 637.539 ton kopi berasan, sementara realisasi produksi kopi sebesar 668.683 ton (104,88%) atau masuk kategori **Sangat Berhasil**. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2016 sebesar 663.871 ton, maka produksi tahun 2017 naik 0,7%. Sedangkan, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 778 ribu ton, produksi tahun 2016 baru mencapai 85,95%. Gambaran produksi dan luas areal kopi tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 43.



Gambar 43. Produksi dan Luas Areal Kopi Tahun 2012-2017

Produksi kopi dalam enam tahun terakhir ini berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Sempat mencapai produksi tertinggi tahun 2012 sebanyak 691 ribu ton, produksi kopi terus mengalami penurunan tiap tahunnya hingga mencapai 639 ribu ton di tahun 2015. Akan tetapi dengan penambahan luas areal tanam di tahun 2016 dan 2017, produksi kopi terus meningkat hingga mencapai 668.683 ton di tahun 2017.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai target produksi kopi tahun 2017 antara lain:

(1) Intensifikasi Tanaman Kopi

Intensifikasi Tanaman Kopi Rakyat bertujuan untuk meningkatkan kualitas budidaya usaha tanaman kopi dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman kopi yang lebih baik. Dalam kegiatan intensifikasi, tanaman kopi mendapatkan perlakuan khusus meliputi pemupukan memakai pupuk yang seimbang serta pemberantasan hama dan penyakit dengan efektif. Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian melaksanakan intensifikasi tanaman kopi arabika seluas 4.500 Ha dan kopi robusta seluas 3750 Ha.

(2) Perluasan Tanaman Kopi

Salah satu upaya yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kopi, pada tahun 2017 perluasan kopi seluas 200 Ha di 4 provinsi

(3) Peremajaan Tanaman Kopi

Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian melaksanakan peremajaan tanaman kopi arabika seluas 1.300 Ha dan kopi robusta seluas 375 Ha.

(4) Kegiatan Pendukung Lainnya

Dalam peningkatan produksi kopi nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kebersamaan 200 orang petani kopi, serta pelatihan penguatan kelembagaan terhadap 30 petani kopi.

(5) Inovasi dan Teknologi

Dalam upaya peningkatan produksi kopi, Badan Litbang Pertanian mengembangkan beberapa teknologi yaitu teknologi pemupukan organik dengan pelarut P dan K pada tanaman kopi Robusta dan teknologi pengendalian hama PBKo dengan insektisida nabati.

Kegiatan pendukung pencapaian produksi kopi dapat dilihat pada tabel 40.

Tabel 40. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kopi Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Perkebunan								
1	Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika	Ha	4,900	4,500	91.84	17,635,974,000	13,028,320,125	73.87
2	Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta	Ha	3750	3750	100.00	14,373,600,000	11950864750	83.14
3	Perluasan Tanaman Kopi (P)	Ha	300	200	66.67	3,936,000,000	2670000000	67.84
4	Peremajaan Tanaman Kopi Robusta (P)	Ha	375	375	100.00	4,412,375,000.00	3,674,675,000.00	83.28
5	Peremajaan Tanaman Kopi Arabika (P)	Ha	1300	650	50.00	13,334,500,000.00	3,319,863,000.00	24.90
6	Perluasan Tanaman Kopi Robusta (P)	Ha	200	200	100.00	3,936,000,000.00	2,484,000,000.00	63.11
7	Perluasan Tanaman Kopi Arabika (P)	Ha	380	100	26.32	5,742,610,000.00	1,150,789,100.00	20.04
8	Pengawasan dan Pendampingan Peremajaan Kopi Arabika (P)	Keg	16	14	87.50	920,000,000.00	655,581,250.00	71.26
9	Pengawasan dan Pendampingan Peremajaan Kopi Robusta (P)	Keg	5	5	100.00	290,000,000.00	269,206,950.00	92.83
10	Pengawasan dan Pendampingan Perluasan Kopi Robusta (P)	Keg	4	2	50.00	260,000,000	118,500,000.00	45.58
11	Pengawasan dan Pendampingan Perluasan Kopi Arabika (P)	Keg	6	4	66.67	287,250,000	172,347,888.00	60.00
12	fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Kopi	Keg	1	1	100.00	436,750,000	433,150,000.00	99.18
13	Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kopi	Orang	200	200	100.00	246,035,000	223,514,300.00	90.85
14	Penguatan Kelembagaan Petani Kopi	Orang	30	30	100.00	102,715,000	102,715,000.00	100.00
15	fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan	Keg	1	1	100.00	200,000,000	199,200,000.00	99.60
Dukungan Perbenihan Perkebunan								
	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (entres kopi)	Ha	3	3	100.00	148,862,000	114,122,000	76.66
	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (KI kopi)	Ha	10	8	80.00	652,783,000	490,023,000	75.07
	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam (KI kopi)	Ha	6	5	83.33	266,349,000	178,900,000	67.17
	Penyediaan benih siap tanam	Btq	4,100,580	3,737,504	91.15	12,188,893,000	9,585,681,000	78.64
	Pengawasan dan Pembinaan penyediaan benih tanaman kopi	Keg	6	6	100.00	948,358,000	712,329,000	75.11
Dukungan Perlindungan Perkebunan								
	Denfarm penerapan PHT tanaman kopi	Ha	200	200	100.00	738,300,000	738,300,000	100.00
	SLPHT tanam kopi	KT	2	2	100.00	230,060,000	230,060,000	100.00
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan								
	Pasca panen kopi	KT	69	69	100.00	14,752,850,000	13,123,598,000	88.96
	fasilitasi pengolahan karet	Unit	21	21	100.00	5,869,600,000	5,199,177,000	88.58
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1	Penelitian teknologi budidaya kopi (teknologi)	Teknologi	2	2	100	220,000,000	216,700,000	98.50
Total						102,129,864,000.00	71,041,617,363.00	69.56

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi kopi nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp102.129.864.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp71.041.617.363,- atau secara persentase sebesar 69,56%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi kopi, terdapat efisiensi sebesar 22,30%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi kopi dapat memaksimalkan

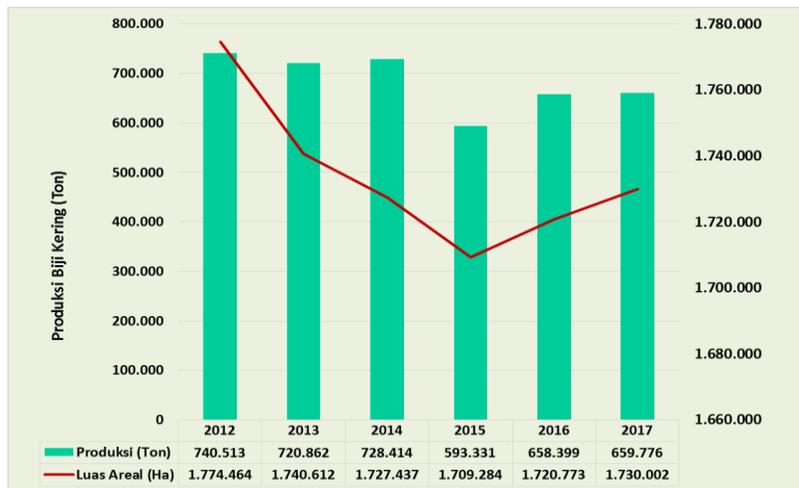
pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

<p>SS 6. IKU 8 Produksi Kakao</p>	<p>Target 688.345 ton biji kering Realisasi 659.776 ton biji kering</p>	<p>% Capaian 95,85% Berhasil</p>
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------



Hingga saat ini produksi kakao mencapai 659.776 ton yang menempatkan Indonesia sebagai Negara produsen terbesar ketiga dunia setelah Pantai gading dan Ghana. Produksi kakao di tahun 2017 ini meningkat 1377 ton (0,2%) dibanding produksi tahun 2016. Meskipun demikian, produksi kakao di

tahun 2017 ini belum dapat mencapai target yaitu sebesar 688.345 ton biji kering (95,85%) atau dalam kategori berhasil. Gambaran produksi dan luas areal kakao tahun 2011-2016 disajikan pada Gambar 44.



Gambar 44. Produksi dan Luas Areal Kakao Tahun 2012-2017

Produksi kakao dalam enam tahun terakhir ini mengalami fluktuasi

dengan kecenderungan meningkat. Walaupun mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2012 hingga 2015, namun, produksi kakao kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 dan 2017. Luas areal kakao yang semakin menurun menjadi faktor utama produksi kakao sukar untuk meningkat. Akan tetapi dengan adanya kegiatan pengembangan kawasan kakao seluas 9 ribu Ha dan teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, produksi dan produktivitas kakao di tahun 2017 dapat meningkat.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 961 ribu ton, produksi tahun 2017 baru mencapai 68% sehingga diperlukan upaya yang keras untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi kakao tahun 2017 antara lain:

(1) Peremajaan Tanaman Kakao

Peremajaan kakao dapat dilakukan pada kebun-kebun kakao yang tidak produktif di sentra pengembangan kakao. Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian melakukan peremajaan tanaman kakao seluas 4243 Ha di 29 Kabupaten yang terdapat di 9 Provinsi.

(2) Perluasan Tanaman Kakao

Salah satu upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas kakao berkelanjutan adalah melalui kegiatan perluasan tanaman kakao. Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa provinsi di Indonesia yang masih memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas tersebut, dengan dukungan ketersediaan lahan cukup luas yang secara teknis memenuhi syarat dan SDM yang memadai. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan perluasan tanaman kakao seluas 900 Ha di 2 Provinsi.

(3) Kegiatan Pendukung Lainnya

Dalam peningkatan produksi kakao nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan, pengembangan desa kakao di Yogyakarta, dan fasilitasi pengembangan kelembagaan petani kakao

(4) Inovasi dan Teknologi

Badan Litbang Pertanian mendukung peningkatan produktivitas kakao dari segi pengendalian OPT, yaitu Teknologi pengendalian VSD dengan metabolit sekunder.

Kegiatan pendukung pencapaian produksi kakao dapat dilihat pada tabel 41.

Tabel 41. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kakao Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Perkebunan								
1	Peremajaan Tanaman Kakao (P)	Ha	5,475	4,243	77.50	62,831,485,000	45,304,929,750	72.11
2	Perluasan Tanaman Kakao(P)	Ha	900	900	100	8,559,414,000	7,269,657,653	84.93
3	Pengembangan Desa Kakao	Keg	1	1	100	50,000,000	49,999,700	100.00
4	TKP dan PL-TKP	org	500	500	100	10,084,490,000	9,936,390,000	98.53
5	Pengembangan desa kakao	keg	1	1	100	787,514,000	785,174,000	99.70
6	Operasional Substation	Keg	4	4	100	2,359,000,000	2,336,543,700	99.05
7	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan	Keg	3	3	100	700,000,000	641,701,000	91.67
8	Pengawasan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao (P)	Keg	38	38	100	2,205,472,000	1,922,198,902	87.16
9	Pengawasan dan Pendampingan Perluasan tanaman Kakao (P)	Keg	6	6	100	360,260,000	324,435,950	90.06
10	Pelatihan penguatan kelembagaan petani kakao	org	90	90	100	399,555,000	388,447,000	97.22
11	Pengawasan dan pendampingan perluasan	keg	6	6	100	360,260	324,436	90.06
Dukungan Perbenihan Perkebunan								
1	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (entees kako)	Ha	21	21	100	468,287,000	421,189,000	89.94
2	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (KI kakao)	Ha	4	4	100	107,572,000	103,057,000	95.80
3	Penyediaan benih siap tanam	Btg	1,482,000	1,267,110	86	3,853,196,000	3,231,993,000	83.88
4	Pengawasan dan Pembinaan	Keg	4	4	100	663,031,000	543,344,000	81.95
Dukungan Perlindungan Perkebunan								
1	SLPHT Perkebunan	KT	2	2	100	218,060,000	218,060,000	100.00
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan								
1	Paspa panen	KT	3	3	100	937,600,000	896,114,000	95.58
2	Pengolahan	Unit	2	2	100	1,999,400,000	1,911,135,000	95.59
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan teknologi kakao	teknologi	1	1	100	220,000,000	216,700,000	98.50
Total						96,804,696,260	76,501,394,091	79.03

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi kakao nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp96.804.696.260,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp76.501.394.091,- atau secara persentase sebesar 79,03%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi kakao, terdapat efisiensi sebesar 7,33%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi kakao dapat memaksimalkan

pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi kakao dikelompokkan kedalam 5 domain permasalahan, yaitu

- (1) Anomali iklim menyebabkan serangan hama dan penyakit tinggi, gugurnya bunga karena hujan dan angin. Hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas kakao
- (2) Distabilitas harga menyebabkan petani kurang tertarik memelihara tanaman kakao secara intensif, rendahnya harga disebabkan antara lain kandungan lemak kakao Indonesia tinggi karena tidak difermentasikan atau difermentasi tetapi tidak sesuai standar dan harganya berbasis satuan berat serta lemahnya sistem pemasaran.
- (3) Inovasi teknologi belum optimal menyebabkan petani produktivitas rendah. Lemahnya penguasaan teknologi antara lain sistem budidaya belum optimal, kurang tersedianya benih unggul, lemahnya penguasaan pasca panen
- (4) Minimnya Industri pengolahan menyebabkan ketergantungan pasar internasional sebagai produsen produk kakao
- (5) Akses modal petani sangat lemah menyebabkan petani sering perangkap dengan ijon. Hal ini disebabkan juga oleh dukungan perbankan sangat lemah.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi kakao ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 42.

Tabel 42. Rekomendasi akar permasalahan Kakao Tahun 2017

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Rendahnya produktivitas karena anomali iklim	(1) Penanganan OPT secara intensif (2) Menanam benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim
2	Harga yang tidak stabil dan cenderung rendah	(3) Memperbaiki sistem pemasaran dengan penguatan kelembagaan petani (4) Melakukan pasca panen antara lain fermentasi sesuai anjuran (5) Memanfaatkan peluang ekspor dengan penguatan kelembagaan petani
3	Lemahnya inovasi teknologi	(6) Pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga teknis dilapangan dan petani untuk memperbaiki pola budidaya, pasca panen dan pemasaran (7) Penyediaan benih unggul yang adaptif
4	Minimnya industri pengolahan produk kakao	(8) Pembinaan, pelatihan, Studi banding kepada kelompok tani (9) Mengundang investor untuk pengolahan produk kakao di Indonesia
5	Lemahnya Modal Petanai	(10) Pembinaan, pengawalan supervisi dan sosialisasi pemanfaatan bantuan pemerintah (11) Memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan dan lembaga lain (12) Mendorong perbankan dan lembaga keuangan lain untuk memberikan fasilitas kredit kepada petani

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2017

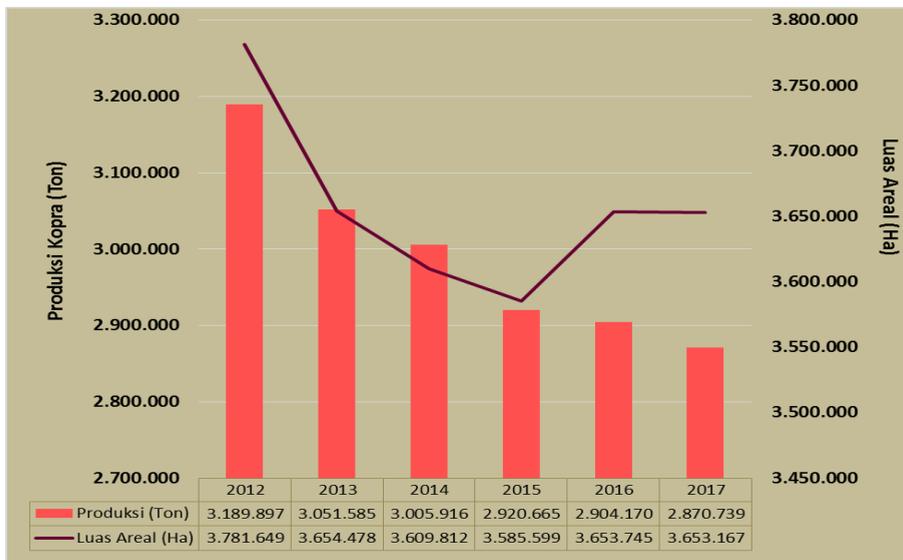
SS 6. IKU 9 Produksi Kelapa	Target 2.673 ribu ton Realisasi 2.870,74 ribu ton	% Capaian 107,39% Sangat Berhasil
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------



Sebagai negara tropis yang sangat luas, Indonesia adalah surga bagi pohon kelapa. Pohon ini dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dari pulau Sumatera hingga Papua.

Luas perkebunan kelapa di Indonesia saat ini mencapai 3,53 juta hektar (Ha) yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 3,5 juta Ha; perkebunan milik pemerintah seluas 3 ribu Ha; serta milik swasta seluas 29 ribu Ha.

Dari segi produksi, capaian tahun 2017 ini sebesar 2.870,74 ribu ton atau 107,39% dari target yang ditetapkan (2.673 ribu ton), dalam kategori sangat berhasil. Gambaran produksi dan luas areal kelapa tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 45.



Gambar 45. Produksi dan Luas Areal Kelapa Tahun 2012-2017

Produksi kelapa dalam enam tahun terakhir ini menunjukkan trend penurunan, sempat mencapai produksi tertinggi tahun 2012 sebanyak 3.189 ribu ton, produksi kelapa terus mengalami penurunan tiap tahunnya hingga mencapai 2.871 ribu ton di tahun 2017. Penurunan produksi kelapa sangat dimungkinkan mendapat pengaruh dari luas areal kelapa yang terus berkurang selama lima tahun kebelakang. Pengembangan kawasan kelapa yang dilakukan di di tahun 2017 diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa di tahun-tahun mendatang.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 3.491 ribu ton, produksi tahun 2017 baru mencapai 82,24%

sehingga diperlukan upaya yang keras untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi kelapa tahun 2017 antara lain:

(1) Peremajaan Tanaman Kelapa

Peremajaan tanaman kelapa dilakukan jika tanaman kelapa telah berumur tua (> 60 tahun) dan dapat juga dilakukan pada pohon kelapa yang berumur < 60 tahun jika tanaman tidak produktif atau produksi < 30 butir/pohon/tahun. Pada tahun 2017 telah dilakukan peremajaan tanaman kelapa seluas 14.047 Ha di 22 Kabupaten pada 8 Provinsi.

(2) Perluasan Tanaman Kelapa

Salah satu upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas kelapa adalah melalui kegiatan perluasan tanaman. Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa provinsi di Indonesia yang masih memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas tersebut, dengan dukungan ketersediaan lahan cukup luas yang secara teknis memenuhi syarat dan SDM yang memadai. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan perluasan tanaman kelapa seluas 700 Ha di 6 Kabupaten pada 3 Provinsi.

(3) Kegiatan Pendukung Lainnya

Dalam peningkatan produksi kelapa nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan, pelatihan penumbuhan kebersamaan 200 orang petani kelapa, serta penguatan kelembagaan petani kelapa sebanyak 30 Orang.

(4) Inovasi dan Teknologi

Kementerian pertanian melalui Badan Litbang Pertanian menghasilkan beberapa Varietas Unggul baru (VUB) untuk meningkatkan produktivitas kelapa, yaitu: Kelapa Bido Moratai, Kelapa Dalam Lampanah, Kelapa Dalam Selayar, dan Kelapa Dalam Babasal (Gambar 46.)



Gambar 46. VUB Tanaman Kelapa

(dari kiri: Kelapa Bido Morotai, Kelapa Dalam Selayar, Kelapa Dalam Lampanah) Kegiatan pendukung pencapaian produksi kelapa dapat dilihat pada tabel 43.

Tabel 43. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kelapa Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Perkebunan								
1	Peremajaan Tanaman Kelapa	Ha	11,725	10,462	89.23	26,493,145,000	23,135,704,540	87.33
2	Peremajaan Tanaman Kelapa (P)	Ha	4,586	3,585	78.17	13,461,450,000	8,557,379,850	63.57
3	Pengawasan dan Pendampingan Perluasan Kelapa (P)	Ha	1,100	700	63.64	3,201,700,000	1,902,908,372	59.43
4	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Kelapa	Keg	30	30	100.00	1,746,770,000	1,591,322,900	91.10
5	Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa	Keg	10	10	100.00	471,300,000	420,465,600	89.21
6	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi	Keg	1	1	100.00	280,550,000	280,514,800	99.99
7	Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kelapa	Orang	200	200	100.00	320,800,000	291,999,500	91.02
8	Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa	Orang	30	30	100.00	203,550,000	192,600,000	94.62
9	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan	Keg	2	1	50.00	180,600,000	176,625,500	97.80
10	Perluasan Tanaman Kelapa	Ha	1,100	700	63.64	3,201,700,000	1,902,908,000	59.43
11	pengawasan dan pendampingan peremajaan kelapa	Keg	30	30	100.00	1,746,770,000	1,591,322,000	91.10
Dukungan Perbenihan Perkebunan								
1	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (KI kelapa)	Ha	10	5	50.00	185,990,000	106,823,000	57.43
2	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam (KI kelapa)	Keg	146	137	93.84	1,062,980,000	974,804,000	91.70
3	Penyediaan benih siap tanam	Btg	616,000	616,000	100.00	10,501,322,000	9,032,677,000	86.01
4	Pengawasan dan Pembinaan penyediaan benih kelapa	Keg	7	6	85.71	1,201,568,000	817,143,000	68.01
Dukungan Perlindungan								
1	Denfarm penerapan PHT tanaman kelapa	Ha	225	225	100.00	529,400,000	529,400,000	100.00
2	SLPHT tanaman kelapa	KT	2	2	100.00	230,060,000	230,060,000	100.00
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran								
1	pasca panen kelapa	KT	15	15	100.00	1,311,635,000	1,307,890,000	99.71
2	Fasilitasi pengolahan kelapa	Unk	26	26	100.00	7,131,470,000	6,668,495,000	93.51
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan Varietas kelapa	varietas	3	4	133.33	400,500,000	392,490,000	98.00
2.	Perakitan Teknologi Tanaman Kelapa dan Palma	teknologi	1	1	100	370,120,000	362,717,600	98.00
Total						74,233,380,000	60,466,250,662	81.45

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi kelapa nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp74.233.380.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp60.466.250.662,- atau secara persentase sebesar 81,45%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi kelapa, terdapat efisiensi sebesar 8,86%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi kelapa dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

SS 6. IKU 10 Produksi Teh	Target 146.168 ton Realisasi 139.362 ton	% Capaian 95,34% Berhasil
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------



Produksi teh saat ini mencapai 139 ribu ton yang menempatkan Indonesia sebagai Negara produsen terbesar ketujuh dunia. Produksi teh di tahun 2017 ini meningkat 427 ton (0,3%) dibanding produksi tahun 2016. Meskipun demikian, produksi teh di tahun 2017 ini belum

dapat mencapai target yaitu sebesar 146.168 ton biji kering (95,34%) atau dalam kategori berhasil. Gambaran produksi dan luas areal teh tahun 2012-2017 disajikan pada Gambar 47



Gambar 47.
Produksi dan
Luas Areal Teh
Tahun 2012-
2017

Produksi teh dalam enam tahun terakhir ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Walaupun mengalami penurunan di tahun 2012-2013 dan meningkat di tahun 2014, pada tahun 2015 produksi teh menurun, namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2017.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 sebesar 163 ribu ton, produksi tahun 2017 baru mencapai 85 % sehingga diperlukan upaya yang keras untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Kementerian Pertanian melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan produksi teh tahun 2017 antara lain:

(1) Rehabilitasi Tanaman Teh

Rehabilitasi merupakan upaya untuk meningkatkan keragaman pertanaman dan pengutuhan kawasan teh. Selain itu kegiatan ini juga dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu teh melalui penerapan teknologi budidaya anjuran. Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi tanaman teh seluas 200 Ha di 2 Kabupaten Purwakarta dan Tasikmalaya.

(2) Kegiatan pendukung lainnya

Dalam peningkatan produksi teh nasional dilaksanakan pula kegiatan pendukung lainnya yang berupa pendampingan dan pengawalan.

(3) Inovasi dan Teknologi

Kementerian pertanian melalui Badan Litbang Pertanian menghasilkan beberapa Varietas Unggul baru (VUB) untuk meningkatkan produktivitas teh, yaitu Teh Tambi 1 dan 2 yang cocok ditanam di dataran tinggi Tipe Ikilm B (Gambar 48).



Gambar 48. VUB Teh Tambi 1 dan 2

Kegiatan pendukung pencapaian produksi teh dapat dilihat pada tabel 44.

Tabel 44. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Teh Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Perkebunan								
1	Rehabilitasi Tanaman Teh (P)	Ha	200	200	100	4.229.800.000	3.181.660.000	75,22
2	Pengawasan dan Pendampingan Rehabilitasi tanaman Teh (P)	Keg	3	3	100	196.300.000	188.556.500	96,06
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan Varietas unggul teh	varietas	1	2	200	295.000.000	291.165.000	98,7
Total						4.721.100.000,00	3.661.381.500	77,55

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi teh nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp4.721.100.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp3.661.381.500,- atau secara persentase sebesar 77,55%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi teh, terdapat efisiensi sebesar 37%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi teh dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Akar permasalahan tidak tercapainya produksi teh dikelompokkan kedalam 5 domain permasalahan, yaitu;

- 1) Inovasi teknologi belum optimal menyebabkan produktivitas tidak meningkat
- 2) Harga kurang menarik menyebabkan petani kurang antusias dalam pengembangan teh. Hal ini disebabkan rantai pemasaran yang belum mendukung produsen.
- 3) Industri hilir belum maksimal, menyebabkan ketergantungan petani pada pedagang pengepul atau perusahaan pengolahan teh.
- 4) Lemahnya Akses modal, menyebabkan petani mengikuti sistem ijon
- 5) SDM masih belum Optimal, mengakibatkan lemahnya penguasaan teknologi terbaru

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi teh ini, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 45.

Tabel 45. Akar Permasalahan dan Rekomendasi Solusi Produksi Teh

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Produktivitas tidak meningkat	(1) Perbaiki sistem budidaya (Rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi) (2) Perbaiki pasca panen
2	Harga cenderung turun	(3) Memperbaiki sistem pemasaran (4) Memperkuat kelembagaan petani untuk pemasaran
3	Industri pengolahan masih kurang	(5) Melatih petani untuk meningkatkan nilai tambah melalui pasca panen dan pengolahan produk teh
4	Lemahnya dukungan permodalan petani	(6) Fasitasi anggaran untuk perbaikan mutu tanaman (7) Dukungan perbankan dan lembaga permodalan lainnya
5	SDM masih lemah	(8) Pembinaan dan Pelatihan petugas lapangan (9) Pembinaan dan Pelatihan petani (10) Koordinasi dan konsultasi terkait pengembangan teh dengan perusahaan

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2017

<p>SS 6. IKU 11 Produksi Daging Kambing dan Domba</p>	<p>Target 120 ribu ton Realisasi 124,84 ribu ton</p>	<p>% Capaian 104,47% Sangat Berhasil</p>
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------



Ternak kambing dan domba merupakan ternak ruminansia kecil yang porsinya paling besar dipelihara di Indonesia dan umumnya dipelihara oleh peternak kecil. Keunggulan ternak tersebut antara lain: (1) membutuhkan modal yang relatif kecil; (2) mudah pemeliharaannya; (3) banyak digunakan untuk berbagai acara baik acara kekeluargaan seperti syukuran maupun acara yang berhubungan dengan ritual keagamaan dan budaya seperti hewan kurban pada hari raya kurban, khitanan, dan aqiqah; dan (4) mudah dijual ketika membutuhkan uang kontan secara cepat.

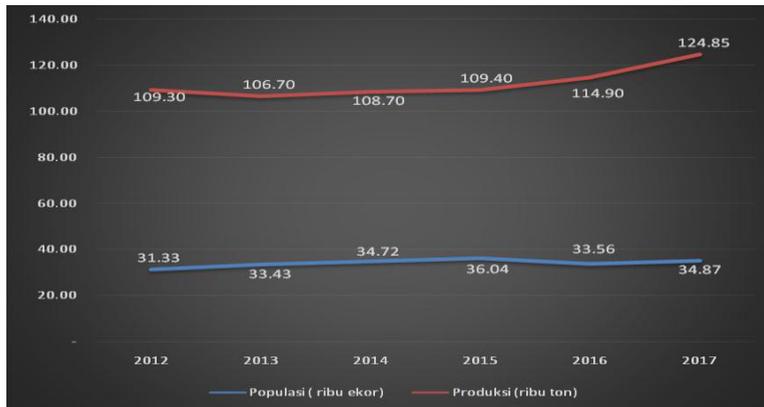
Daging kambing dan domba merupakan pangan hewani alternatif selain daging sapi. Dengan tingginya harga daging sapi di pasar, maka mengkonsumsi daging kambing dan domba dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan. Produksi daging kambing dan domba merupakan karkas hasil pemotongan ternak kambing dan domba ditambah dengan *edible offal* (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Data produksi daging kambing dan domba didapatkan melalui metode verifikasi dan validasi data dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Produksi daging kambing dan domba tahun 2017 melampaui target tahunan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Dari target 120 ribu ton karkas diperoleh 124,85 ribu ton (104,47%) atau dapat dikatakan sangat berhasil.

Dibandingkan target produksi daging kambing dan domba di tahun 2019 sebesar 125 ribu ton, capaian produksi di tahun 2016 telah mencapai 99,88%. Untuk itu, kinerja pada tahun 2017 harus dipertahankan dan terus dikembangkan agar target tersebut dapat

terlampau .

Pencapaian kinerja produksi daging kambing dan kerbau juga dipengaruhi oleh populasi kambing dan domba yang dapat dijabarkan pada Gambar 49.



Gambar 49. Produksi dan Populasi Daging Kambing dan Domba Tahun 2012-2017

Perkembangan populasi kambing dan domba meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2012 populasi kambing dan domba 31,33 ribu ekor mengalami peningkatan secara konsisten hingga menjadi 34,87 ribu ekor.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan produksi daging kambing dan domba di tahun 2017 antara lain: pengembangan populasi kambing dan domba di 5 kelompok serta peningkatan kualitas bibit unggul ternak kambing sebanyak 1150 ekor.



Gambar 50. Pemberian Pakan Berbasis Limbah Sawit

Dalam hal inovasi dan teknologi, Badan Litbang Pertanian melakukan pengelolaan dan pemanfaatan bibit

sumber Kambing Boerka serta perbaikan kualitas genetik kambing potong di lapangan melalui

penyebaran 35 ekor bibit kambing diantaranya tersebar di Aceh (9 ekor), Bengkulu (5 ekor) dan Riau (21 ekor). Selain itu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas kambing telah dilakukan teknologi Penyusunan dan Pengolahan Ransum untuk Ternak Kambing dengan menggunakan limbah sawit. Bahan baku ini mudah diperoleh, tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, ekonomis dan tersedia sepanjang waktu oleh karena itu, teknologi ini berpotensi untuk dikembangkan dalam skala lebih luas (Gambar 50).

Kegiatan pendukung pencapaian produksi daging kambing dan kerbau dapat dilihat pada tabel 46.

Tabel 46. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Daging Kambing dan Domba Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Peternakan								
1	Pengembangan populasi kambing	Klp	2	2	100	430.000.000	428.960.000	99,76
2	Pengembangan populasi domba	Klp	3	3	100	577.150.000	500.810.000	86,77
3	Peningkatan kualitas bibit unggul ternak kambing	Ekor	1.150	1.237	108	725.620.000	713.360.000	98,31
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
1.	Perakitan Galur Unggul (galur)	Galur	5	7	140	1.517.938.000	1.516.811.235	99,93
Total						3.250.708.000	3.159.941.235	97,21

Sumber: Ditjen PKH dan Badan Litbang, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi kambing dan domba nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp3.250.708.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp3.159.941.235,- atau secara persentase sebesar 97,21%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi kambing dan domba, terdapat efisiensi sebesar 23,82%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi kambing dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 7 (SS 7) TERSEDIANYA BAHAN BAKU BIO INDUSTRI DAN BIO ENERGI

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BioFuel) sebagai bahan bakar lain, Presiden menginstruksikan antara lain kepada Menteri Pertanian untuk mengambil langkah-langkah percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati diantaranya mendorong penyediaan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) termasuk benih dan bibitnya.

Hal itulah yang melatarbelakangi pemilihan sasaran strategis Kementerian Pertanian yang ketujuh yaitu Tersedianya Bahan Baku Bio Industri dan Bioenergi. Sebagai indikator bagi pencapaian sasaran strategis ini adalah produksi kelapa sawit. Saat ini kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang potensial sebagai penghasil bioenergi. Indonesia yang merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan komoditas kelapa sawit sebagai Bahan Baku Bio Industri dan Bioenergi.

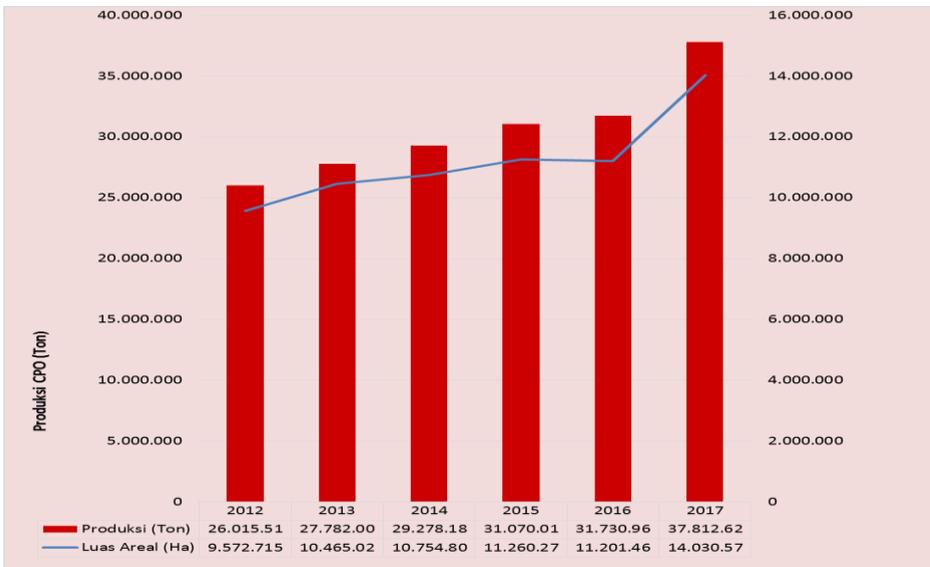
Sasaran strategis nomor tujuh memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu produksi kelapa sawit.

SS 7. IKU 1 Produksi Kelapa Sawit	Target 40.936.330 ton CPO Realisasi 37.812.627 ton CPO	% Capaian 92,37% Berhasil
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------



Pada tahun 2017, produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 37.812.627 ton CPO atau 92,37% dari target 40.936.330 ton CPO, sehingga masuk kategori berhasil. Capaian produksi kelapa sawit tahun 2017

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja produksi tahun 2016, yaitu sebesar 6 juta ton CPO atau 19,17% dan merupakan pencapaian produksi tertinggi selama 6 tahun terakhir. Capaian produksi dan luas areal kelapa sawit 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 51.



Gambar 51. Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit Tahun 2012-2017.

Gambar 51 memperlihatkan bahwa produksi kelapa sawit mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan peningkatan luas areal kelapa sawit. Sempat terkena dampak fenomena El Nino yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu, produksi komoditas kelapa sawit mengalami peningkatan karena ditopang oleh produksi sekitar 1 juta hektar tanaman sawit muda yang tahun ini mulai menghasilkan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai target indikator Produksi kelapa sawit antara lain perluasan areal seluas 500 Ha, pendampingan dan pengawalan, serta pengembangan kelembagaan usaha tani sawit. Kegiatan pendukung pencapaian produksi sawit dapat dilihat di tabel 47.

Tabel 47. Kegiatan Pendukung Pencapaian Produksi Kelapa Sawit Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program Ditjen Perkebunan								
1	Perluasan Tanaman Kelapa Sawit	Ha	500	500	100	3.959.350.000	3.867.218.750	97,67
2	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Kelapa Sawit	Keg	1	1	100	423.100.000	396.694.000	93,76
3	Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kelapa Sawit	Orang	200	200	100	118.575.000	112.286.000	94,70
4	Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit	Orang	30	30	100	233.275.000	232.718.000	99,76
Dukungan Pengolahan dan								
1	Fasilitasi penetapan harga TBS	Keg	12	12	100	360.000.000	346.640.000	96,29
2	Koordinasi dan supervisi GNPSDA sub Sektor Perkebunan (K Sawit)	Unit	2	2	100	1.999.400.000	1.911.135.000	95,59
Total						7.093.700.000	6.866.691.750	96,80

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian produksi kelapa sawit nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp7.093.700.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp6.866.691.750,- atau secara persentase sebesar 96,80%.

Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan produksi kelapa sawit, terdapat efisiensi sebesar 3,31%. Nilai ini menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan produksi kelapa sawit dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 8 (SS 8) MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA INSANI PETANI

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, dan peternak; mengentaskan

masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihelai pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang nomor delapan adalah Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial,

ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahatani sehingga mampu mengembangkan agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Capaian Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya diukur melalui jumlah kelompok tani pada kelas lanjut, madya, dan utama, dibandingkan dengan jumlah total kelompok tani.

Sasaran strategis nomor delapan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya.

<p>SS 8. IKU 1 Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya</p>	<p>Target 25% Realisasi 25,54%</p>	<p>% Capaian 102,14% Sangat Berhasil</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Capaian Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya tahun 2017 adalah 25,54%% atau 102,14% dari target 25%, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Dengan capaian tahun 2017 tersebut, maka target periode akhir jangka menengah tahun 2019 sebesar 25% telah tercapai . Perkembangan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dapat dilihat pada tabel 48.

Tabel 48. Perkembangan Kelas Kemampuan Kelompok Kelompok tani Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah kelas kemampuan kelompok tani						
	Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum diketahui	Jumlah Poktan	Kelembagaan Petani yang meningkat kapasitasnya
2014	224.816	50.594	14.959	14.959	26.552	322.390	24,97
2015	119.081	64.784	12.596	1.269	268.696	466.426	16,86
2016	227.987	113.143	20.429	2.085	167.282	530.926	25,55
2017	259.665	120.825	21.485	2.151	161.603	565.729	25,54

Sumber: BPPSDMP, 2017

Upaya penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui:

Fasilitasi Kelembagaan Petani :

- (a) Sekolah Lapangan mendukung UPSUS, dengan target fisik 816 unit dan realisasi fisik tercapai 816 unit (100%)
- (b) Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Kelompok Unit Bersama (KUB)

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihelai pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah: meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani (poktan/ gapoktan); meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai potensi wilayah; dan meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.

Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian mengalokasikan kegiatan Pengembangan KEP dan KUB dengan target fisik 800 unit dan realisasi fisik 503 unit (62,88%).

- (c) Pengawasan dan pendampingan APBN-P dengan target fisik 7.200 unit dan realisasi fisik 6.530 unit (90,69%).
- (d) Aplikasi Paket Teknologi atau Research Extension Linkages (REL)

Penelitian bertanggungjawab untuk menghasilkan dan meningkatkan kualitas teknologi dalam rangka menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing, sedangkan penyuluhan pertanian menyediakan mekanisme agar teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dapat didesiminasikan dan diadopsi petani melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petani.

Pelaksanaan kegiatan aplikasi paket teknologi/REL memiliki tujuan dan manfaat antaralain : (1).mengurangi resiko kegagalan usahatani melalui pemilihan teknologi pertanian spesifik lokasi dengan usahatani terpadu, (2). meningkatkan keyakinan petani/kelompoktani mengenai teknologi pertanian spesifik lokasi yang diterapkan oleh petani/kelompoktani, (3).meningkatkan efisiensi usahatani dan informasi pertanian, (4) menyiapkan petani/kelompoktani untuk menjadi demonstrator yang bersifat motivator dan atau pelatih bagi petani/kelompoktani, serta (5).mengembangkan kemampuan penyuluh pertanian. Aplikasi Paket Teknologi atau Research Extension Linkages (REL) ditahun 2017 telah memenuhi sasaran yaitu 17 unit.

Kegiatan pendukung pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan tani dapat dilihat di tabel 49.

Tabel 49. Kegiatan Pendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani Tahun 2017

No	Rencana kegiatan	Realisasi keuangan			Realisasi fisik		
		Pagu	Realisasi	%	Target Fisik (unit)	Realisasi Fisik (unit)	%
I	FASILITASI KELEMBAGAAN PETANI						
	a. Sekolah Lapangan Mendukung UPSUS	Rp. 25.509.690.000	Rp. 24.073.932.900	94.37%	816	816	100%
	b. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	Rp. 1.495.000.000	Rp. 1.314.345.000	87.92%	400	380	95%
	c. Pengawasan dan Pendampingan APBN-P	Rp. 24.480.000.000	Rp. 21.920.242.000	89.54%	7.200	6.530	90.69%
	Total	Rp. 51.484.690.000	Rp. 47.308.519.900	91,88852	8416	7726	91,8

Sumber: BPPSDMP, 2017

Untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas kelembagaan tani nasional, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp51.484.690.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp47.308.519.900,- atau secara persentase sebesar 91,8%.

Berdasarkan realisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan tani, terdapat efisiensi sebesar 3,85%. Nilai ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan tani dapat memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 9 (SS 9) MENINGKATNYA PENDAPATAN KELUARGA PETANI

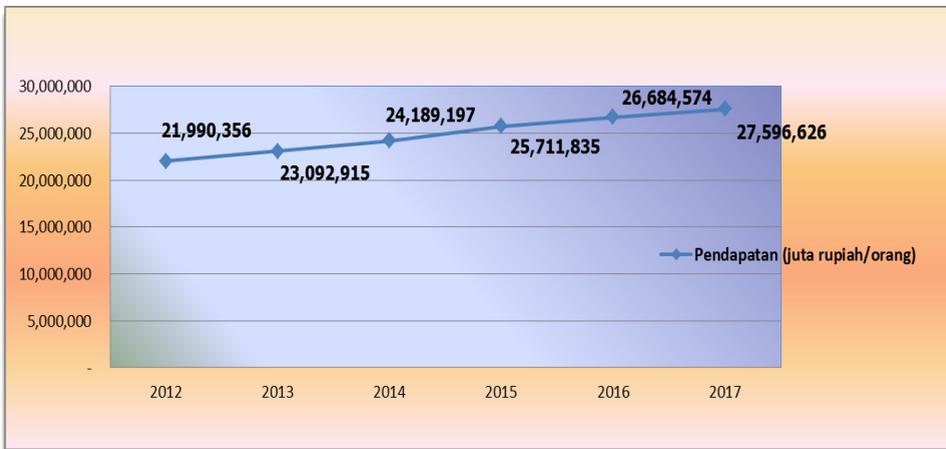
Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Tingkat kesejahteraan petani salah satunya diukur melalui pendapatan per kapita petani. Pendapatan petani diukur

melalui perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian.

Sasaran Strategis nomor sembilan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu perbandingan antara PDB Pertanian dalam arti sempit dengan jumlah tenaga kerja pertanian.

<p>SS 9. IKU 1 Perbandingan PDB Pertanian Sempit dengan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian</p>	<p>Target Rp27 Juta/Orang/Kapita Realisasi Rp27,59 Juta/Orang/Kapita</p>	<p>% Capaian 102,85% Sangat Berhasil</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Capaian indikator perbandingan PDB Pertanian dengan jumlah tenaga kerja pertanian adalah Rp27,59 juta/orang/kapita atau 102,85% dari target Rp27 juta/orang/kapita, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Perkembangan pendapatan keluarga petani selama periode 2012-2017 ditunjukkan oleh Gambar 52.



Gambar 52. Perkembangan Pendapatan petani Tahun 2012-2017.

Gambar 52 memperlihatkan bahwa pendapatan petani selama jangka waktu 2012 hingga 2017 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, PDB pertanian sempit dibanding total tenaga kerja sektor pertanian sebesar Rp21.990.571,- per orang per tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi sebesar Rp27.596.626,- Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani juga mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Peningkatan pendapatan petani dipengaruhi oleh peningkatan produksi komoditas pertanian dan kestabilan harga dari komoditas pertanian tersebut. Semakin tinggi produksi yang dihasilkan dan didukung dengan harga tinggi yang diterima petani, maka pendapatan petani akan semakin tinggi pula. Hampir seluruh komoditas pertanian meningkat produksinya pada tahun 2017 ini. Kementerian Pertanian juga turut menjaga kestabilan harga pangan melalui berbagai kebijakan seperti operasi pasar, serah gabah petani, dan pembatasan impor sehingga petani mendapatkan harga jual yang layak.

Secara lebih jelas perbandingan antara PDB sektor pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 50.

Tabel 50. Jumlah PDB dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2012-2017

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PDB subsektor sempit (miliar rupiah)	816,304	847,764	880,390	906,805	936,335	968,338
Tenaga kerja (ribu orang)	37,121	36,711	36,396	35,268	35,089	35,089

Sumber: BPS diolah Pusdatin, 2017

Keterangan: Termasuk di dalam sektor pertanian sempit adalah sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

PDB sektor pertanian sempit mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp816.304 Miliar pada tahun 2012 menjadi Rp968.338 Miliar pada tahun 2017, sedangkan jumlah penduduk sektor pertanian mengalami tren penurunan dari 37,12 juta orang pada tahun 2012 menjadi 35,09 juta orang pada tahun 2017. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam 6 (enam) tahun terakhir pendapatan petani mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya PDB sektor pertanian sempit. Namun di lain sisi, jumlah tenaga kerja sektor pertanian justru mengalami penurunan, dimana jika hal ini terjadi secara berkelanjutan maka dapat berdampak terhadap PDB sektor pertanian sempit di masa yang akan datang.

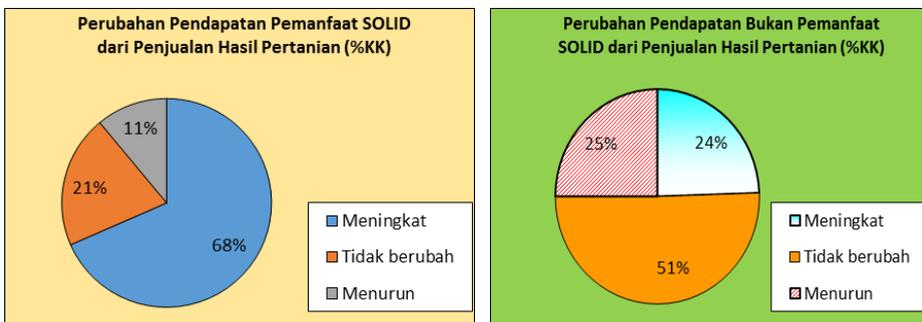
Di samping sebagai hasil atau dampak dari berbagai program/kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian target sukses lainnya (peningkatan produksi pangan utama, terjaminnya diversifikasi pangan, meningkatnya akses pemanfaatan pangan dan gizi, konsumsi pangan lokal, kestabilan produksi cabai dan bawang merah, berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing, tersedianya bahan baku bioindustri, dan meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani), ada beberapa kegiatan Kementerian Pertanian yang secara langsung ditujukan dalam rangka pemberdayaan petani melalui:

(1). Kawasan Mandiri Pangan

Pada tahun 2017, kegiatan ini dilaksanakan pada 78 kawasan di 77 Kabupaten/Kota pada 23 Provinsi. Sasaran kegiatan Kawasan Mandiri Pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan hasil analisa DDRT/Data Kemiskinan BPS/Data Kemiskinan lainnya di daerah yang rentan terhadap rawan pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengurangan kemiskinan dan penanggulangan kerawanan pangan khususnya rawan pangan kronis. Diharapkan dengan kegiatan kawasan mandiri pangan ini, masyarakat miskin di daerah rawan pangan menjadi kaum mandiri.

(2). Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID) di Maluku dan Maluku Utara.

Kegiatan tersebut antara lain Pemberdayaan Petani Kecil dan Gender, serta kegiatan rumah tangga yang mendukung produksi pertanian dan pemasaran. Sampai dengan tahun 2017, Program SOLID telah dilaksanakan di 224 desa (100% dari target) dan dirasakan manfaatnya oleh 27.115 rumah tangga (81% dari target sasaran 33.600 KK). Rumah tangga tersebut tergabung kedalam 2.192 Kelompok Mandiri (KM) (98% dari target 2240 KM). Berdasarkan hasil survey tahun 2016, peningkatan hasil produksi pertanian dialami oleh hampir semua responden SOLID. Peningkatan produksi pertanian responden tersebut terjadi pada hampir semua komoditi/produk yang diusahakan. Selain terjadi peningkatan produksinya, 68% responden menyatakan bahwa pendapatan mereka naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah peningkatan produksi dan pendapatan petani pemanfaat SOLID dan bukan pemanfaat SOLID dapat dilihat pada gambar 53



Gambar 53. Dampak Peningkatan Pendapatan Kelompok SOLID dan Bukan Pemanfaat SOLID Tahun 2017

Kegiatan pendukung pencapaian pendapatan keluarga petani dapat dilihat di tabel 51.

Tabel 51. Kegiatan Pendukung Pencapaian Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
Program BKP								
1	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (kawasan)	Kawasan	78	78	100	14,646,000,000	14,167,021,922	96.73
2	Dukungan Manajemen dan Administrasi SOLID (12 bin layanan)	Layanan	168	168	100	43,644,376,000	43,000,000,000	98.52
Total						58,290,376,000	57,167,021,922	98.07

Sumber: BKP, 2017

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp58.290.376.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp57.167.021.922,- atau secara persentase sebesar 98,07%. Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung peningkatan pendapatan petani, terdapat efisiensi sebesar 1,97%.

Sasaran Strategis 10 (SS 10) MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan publik yang diberikan, Kementerian Pertanian melakukan survei masyarakat untuk melihat penilaian masyarakat terhadap layanan publik yang diterima (*perceived benefit*) dari Kementerian Pertanian.

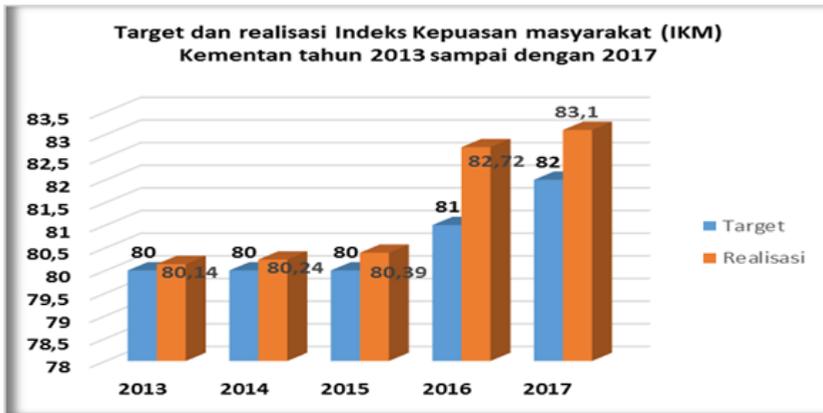
Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Kementerian Pertanian. IKM diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis minimal 1 (satu) tahun sekali.

Sasaran Strategis nomor sepuluh ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kementerian Pertanian.

<p>SS 10. IKU 1 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kementerian Pertanian</p>	<p>Target 82 Realisasi 83,1</p>	<p>% Capaian 101,34% Sangat Berhasil</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Target indikator kinerja IKM tahun 2017 adalah sebesar 82 dengan realisasi sebesar 83,1. Hal ini berarti capaian kinerja IKM sebesar 101,34% atau melebihi IKM yang ditargetkan pada tahun 2017, sehingga masuk kategori sangat berhasil. Tercapainya target IKM tentunya tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian telah berjalan secara efektif dan efisien.

Target indikator IKM yang ditentukan Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 2015 konsisten diupayakan untuk mencapai nilai 80. Sejak tahun 2016 target terus ditingkatkan setiap tahunnya sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019. Perbandingan target dan realisasi indikator IKM Kementerian Pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 54. Target dan Realisasi IKM Kementerian Pertanian Tahun 2013-2017

Pada gambar 54. diatas terlihat bahwa realisasi nilai IKM yang melebihi target dapat tercapai mulai tahun 2013. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan secara konsisten terhadap pelayanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian dengan meningkatnya persepsi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut.

Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat Kementerian Pertanian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013. Unsur – unsur dan hasil pengukuran IKM tersebut dapat dilihat pada tabel 52.

Tabel 52. Hasil Pengukuran IKM Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM SETJEN	NILAI IKM DITJEN TP	NILAI IKM DITJEN BUN	NILAI IKM DITJEN PKH	NILAI IKM BADAN LITBANG	NILAI IKM BPSDMP	NILAI IKM BARANTAN	NILAI IKM KEMANTAN
1	Prosedur pelayanan (U1)	3,25	3,30	3,46	3,26	3,21	3,18	3,35	3,29
2	Persyaratan Pelayanan (U2)	3,23	3,33	3,53	3,28	3,22	3,27	3,36	3,32
3	Kejelasan Pelaksanaan Kegiatan (U3)	3,01	3,40	3,29	3,3	3,24	3,26	3,38	3,27
4	Kedisiplinan pelaksana pelayanan (U4)	3,08	3,32	3,27	3,26	3,23	3,26	3,37	3,26
5	Tanggung jawab pelaksana pelayanan (U5)	3,36	3,37	3,34	3,33	3,29	3,28	3,4	3,34
6	Kemampuan Pelaksana kegiatan (U6)	3,20	3,44	3,34	3,32	3,29	3,3	3,41	3,33
7	Kecepatan pelayanan (U7)	3,20	3,20	3,35	3,24	3,19	3,23	3,33	3,25
8	Keadilan mendapatkan pelayanan (U8)	3,21	3,38	3,82	3,42	3,31	3,39	3,52	3,44
9	Kesopanan dan Keramahan pelaksana (U9)	3,15	3,55	3,38	3,49	3,4	3,34	3,43	3,39
10	Kewajaran Biaya Pelayanan (U10)	3,04	3,32	3,30	3,37	3,22	3,22	3,41	3,27
11	Kepastian Biaya pelayanan (U11)	3,52	3,49	3,34	3,4	3,25	3,2	3,49	3,38
12	Kepastian Jadwal pelayanan (U12)	3,37	3,31	3,36	3,31	3,21	3,28	3,43	3,32
13	Kenyamanan Lingkungan (U13)	3,07	3,49	3,37	3,37	3,3	3,32	3,39	3,33
14	Keamanan Pelayanan (U14)	3,3	3,41	3,53	3,25	3,3	3,3	3,42	3,36
15	Nilai IKM	3,19	3,36	3,38	3,31	3,24	3,25	3,38	3,32
16	Nilai Konversi IKM	79,83	84	84,61	82,33	81,23	81,3	84,64	83,1
17	Mutu Pelayanan	B	A	A	A	B	A	A	A
		BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
18	Jumlah UKPP/UPT yang melakukan pengukuran IKM	2 UKPP	3 UPT	4 UPT	1 UKPP dan 23 UPT	63 UPT	19 UPT	52 UPT	3 UKPP dan 164 UPT

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2017

Pengukuran IKM dilakukan terhadap **9 Unit Kerja Pelayanan Publik dan 160 Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian** dengan jenis layanan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Jenderal, meliputi 2 unit kerja yang melakukan pelayanan publik yaitu:
 - a. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PPVTP) dengan jenis pelayanan: Pemberian Hak PVT, Pendaftaran Varietas Tanaman, Pendaftaran Varietas Hortikultura, Pendaftaran Pupuk, Pendaftaran Pestisida, Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura, Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman, Pendaftaran Pakan Ternak, Izin Usaha Obat

Hewan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya, Pemasukan/Pengeluaran Benih/Bibit Ternak, Pemasukan Ternak Ruminansia Besar, dan Pemasukan/Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan (Gambar 55).



Gambar 55. Proses Pelayanan Perizinan di Pusat PVTTP

- b. Biro Humas dan Informasi Publik dengan jenis pelayanan penyebarluasan informasi mengenai pembangunan pertanian kepada masyarakat/publik. Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui pemberitaan di media cetak, online, dan televisi serta partisipasi dalam pameran.
- (2) Ditjen Tanaman Pangan, meliputi 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan pelayanan publik yaitu:
- a. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), dengan tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta rujukan proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
 - b. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH), dengan tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknispengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangandan hortikultura.

- c. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT), dengan tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu pestisida, pupuk, dan produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- (3) Ditjen Perkebunan, meliputi 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan pelayanan publik yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, BBPPTP Medan, BBPPTP Ambon, dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Kalimantan Barat.

Keempat UPT tersebut melakukan pelayanan utama kepada petani, mahasiswa, produsen benih, dan instansi terkait berupa: Sertifikasi kebun induk, Seleksi pohon induk, Sertifikasi kebun entres, Sertifikasi kebun penangkaran, Sertifikasi bibit, Pengujian mutu benih, Pengujian mutu Agens Pengendali Hayati, dan Pemesanan APH

- (4) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), meliputi 1 UKPP dan 23 UPT, yaitu:
- a. Subbag Layanan Rekomendasi, Ditjen PKH yang memberikan 15 layanan rekomendasi berupa benih dan/atau bibit ternak, pemasukan benih/bibit HPT, pendaftaran pakan, bahan pakan asal tumbuhan, bahan pakan asal hewan, obat hewan, izin usaha obat hewan, hewan kesayangan, sapi bakalan, sapi indukan, sapi potong, karkas, daging, jerohan, dan/atau olahannya, susu, kulit dan bulu, telur dan madu, produk hewan non pangan, dan pakan hewan kesayangan
 - b. 1 Pusat Veteriner Masyarakat di Surabaya, 3 Balai Besar Veteriner di Wates, Maros, dan Denpasar, serta 4 Balai Veteriner di Medan, Bukittinggi, Lampung, dan Banjarbaru. Kedelapan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) tersebut melaksanakan tugas melakukan pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner.

- c. Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan BIB Lembang, dengan tugas memproduksi semen beku dari sembilan bangsa sapi (Limousine, Simental, Aberdeen Angus, Brangus, Brahman, Ongole, Madura, Bali dan Friesien Holstein) dan dua bangsa kambing (Peranakan Ettawa dan Boer).
- d. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) di Baturaden, Indrapuri, Siborongborong, Padang Mangatas, Sembawa, Pelaihari, dan Denpasar. Ketujuh UKPP tersebut melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/ bibit hijauan pakan ternak.
- e. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur melaksanakan tugas pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat
- f. Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang dengan tugas memproduksi, mengembangkan, dan mendistribusikan embrio ternak, dalam rangka penyediaan benih dan bibit ternak unggul.
- g. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor melaksanakan tugas pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan, dan mutu produk hewan.
- h. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi melaksanakan tugas pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan dan mutu pakan.

(5) Badan Litbang Pertanian, meliputi 6 UKPP dan 59 UPT yang melakukan pelayanan publik, antara lain:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 Balai Pengelola Alih Teknologi, Bogor | 33 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat |
| 2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan | 34 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau |
| 3 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Padi, Sukamandi | 35 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi |
| 4 Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian, Malang | 36 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung |
| 5 Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros | 37 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan |
| 6 Loka Penelitian Penyakit Tungro, Lanrang | 38 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung |
| 7 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura | 39 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu |
| 8 Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang | 40 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten |
| 9 Balai Penelitian Buah Tropika, Solok | 41 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta |
| 10 Balai Penelitian Tanaman Hias, Segunung | 42 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat |
| 11 Balai Penelitian Tanaman Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Malang | 43 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah |
| 12 Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan | 44 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DI Yogyakarta |
| 13 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor | 45 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur |
| 14 Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Malang | 46 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali |
| 15 Balai Penelitian Tanaman Palma, Manado | 47 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat |
| 16 Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar | 48 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur |
| 17 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan | 49 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat |
| 18 Balai Bear Litbang Veteriner Bogor | 50 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah |
| 19 Balai Penelitian Ternak, Ciawi | 51 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan |
| 20 Loka Penelitian Sapi Potong, Grati | 52 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur |
| 21 Loka Penelitian Kambing Potong, Sei Putih | 53 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara |
| 22 Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian | 54 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo |
| 23 Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian | 55 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah |
| 24 Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Banjarbaru | 56 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan |
| 25 Balai Penelitian Tanah, bogor | 57 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara |
| 26 Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Bogor | 58 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku |
| 27 Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Jakanen | 59 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua |
| 28 Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian | 60 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara |
| 29 Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian | 61 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat |
| 30 Balai Besar Pengkajian Pengembangan Teknologi Pertanian | 62 Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat |
| 31 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh | 63 Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau |
| 32 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara | |

Keenam puluh lima UKPP dan UPT tersebut melaksanakan tugas antara lain : melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian serta penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;

(6) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), meliputi 19 UKPP yaitu:

- | | | | |
|----|----------------|-----|--------------------------|
| 1 | STPP Medan | 11. | BBPP Batu |
| 2 | STTP Bogor | 12. | BBPP Binuang |
| 3 | STTP Magelang | 13. | BBPP Batangkaluku |
| 4 | STTP Malang | 14. | BBPP Kupang |
| 5 | STPP Gowa | 15. | BPP Jambi |
| 6 | STPP Manokwari | 16. | BPP Lampung |
| 7 | PPMKP Ciawi | 17. | SMK-PP Negeri Sembawa |
| 8 | BBPP Lembang | 18. | SMK-PP Negeri Banjarbaru |
| 9 | BBPKH Cinagara | 19. | SMK-PP Negeri Kupang |
| 10 | BBPP Ketindan | | |

19 UPT tersebut melakukan layanan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian mahasiswa, pengabdian masyarakat dan penggunaan sarana dan prasarana pertanian kepada penyuluh pertanian, petani/kelompok tani, siswa SMK-PP/STPP, serta alumni.

(7) Badan Karantina Pertanian, meliputi 52 UPT, yaitu

1 Balai Besar Karantina Pertanian Soekamo Hatta	27 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang
2 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	28 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan
3 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	29 Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon
4 Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian	30 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
5 Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian	31 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya
6 Balai Besar Karantina Pertanian Belawan	32 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu
7 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	33 Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo
8 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	34 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak
9 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	35 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong
10 Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	36 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan
11 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung	37 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Giacap
12 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	38 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar
13 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak	39 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh
14 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	40 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong
15 Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin	41 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda
16 Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	42 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
17 Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	43 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu
18 Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang	44 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika
19 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura	45 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke
20 Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang	46 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
21 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi	47 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare
22 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam	48 Stasiun Karantina Pertanian Kelas III Tanjung Balai Karimun
23 Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan	49 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende
24 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang	50 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju
25 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate	51 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari
26 Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari	52 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan

52 UPT tersebut melaksanakan tugas antara lain:

- a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- c. melakukan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- e. memberikan pelayanan operasional Karantina Hewan dan tumbuhan;
- f. memberikan pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- g. mengelola sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik Karantina Hewan dan tumbuhan;
- h. melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, Karantina Tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati (Gambar 56).



Gambar 56. Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang- Undangan Dibidang Karantina Pertanian

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementan, antara lain: (1) Pembinaan peningkatan kualitas pelayanan public Kementan; (2) Pemberian penghargaan Abdibaktitani kepada UKPP berprestasi bidang pertanian tahun 2017; (3) pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal; (4) pelayanan perkarantinaan, (5) pelayanan pelatihan dan pendidikan pertanian; dan (6) Ekspose Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2017.

Kegiatan pendukung pencapaian Nilai IKM Kementerian Pertanian dapat dilihat di tabel 53

Tabel 53. Kegiatan Pendukung Pencapaian Nilai IKM Kementerian Pertanian Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
1	Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementan	Kegiatan	1	1	100	905,640,000	876,887,906	96.83
2	Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal	Layanan	1	1	100	264,578,260,000	234,628,566,984	88.68
3	Pelayanan perkarantinaan	Layanan	1	1	100	703,716,412,000	693,297,700,824	98.52
4	Pelayanan pelatihan dan pendidikan pertanian	Layanan	1	1	100	494,940,712,000	472,885,816,999	95.54
Total						1,464,141,024,000	1,401,688,972,713	95.73

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian nilai IKM, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp1.464.141.024.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp1.401.688.972.713,- atau secara persentase sebesar 95,73%. Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung pencapaian nilai IKM, terdapat efisiensi sebesar 4,46%.

Sasaran Strategis 11 (SS 11) MENINGKATNYA TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian baru dilakukan dalam 4 (empat) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2014. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan sebagai berikut (Gambar 57).



Gambar 57. Komponen penilaian RB Kementerian/Lembaga

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB

Kementerian Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria pengungkit memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10% serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Sasaran Strategis nomor sebelas ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

<p>SS 11. IKU 1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian</p>	<p>Target 74 Realisasi *)</p>	<p>% Capaian *)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Keterangan: *) nilai Reformasi Birokrasi Kementan tahun 2017 masih menunggu konfirmasi dari Kementerian PAN&RB

Kinerja capaian atas indikator nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2017 belum dapat dihitung dikarenakan masih menunggu konfirmasi nilai dari Kementerian PAN&RB. Meskipun demikian proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2017 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB, dari tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan 4 September 2017. Kegiatan evaluasi RB tersebut meliputi;

1. Survey reformasi birokrasi
2. Evaluasi reformasi birokrasi

3. Penyusunan lembar hasil penilaian RB dan eviden RB
4. Tindak lanjut evaluasi RB
5. Kunjungan lapangan ke beberapa UPT Kementan
6. Mistery Shopper ke kantor pusat dan UPT Kementan, dan
7. Desk evaluasi
8. Exit Meeting

Pada bulan November 2017, pihak Kementerian PAN dan RB sudah melakukan pemaparan exit meeting atas hasil sementara evaluasi RB Kementan 2017 dengan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Berikut angka perkiraan sementara nilai Refomasi Birokrasi di Kementerian pertanian tahun 2017 :

Tabel 54. Hasil Sementara Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2017

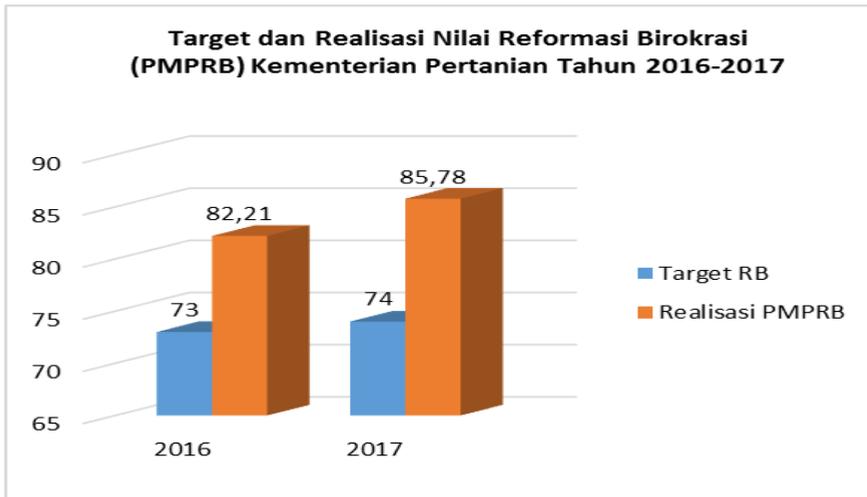
No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2015	Nilai 2016	Capaian 2016 (%)	Nilai PMPRB 2017		Exit Meeting 2017		Ket.
A	PENGUNGKIT									
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	5,00	3,24	2,53	50,66	3,99	3,64	72,79	22,13	NAIK
2	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5,00	4,38	3,13	62,50	3,75	3,12	62,5	0	TETAP
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	6,00	4,51	4,84	80,72	6,00	4,51	75,17	5,55	TURUN
4	PENATAAN TATALAKSANA	5,00	3,47	3,97	79,38	4,75	3,84	76,9	2,48	TURUN
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	15,00	11,06	11,04	73,57	14,34	12,52	83,5	9,93	NAIK
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	6,00	2,72	3,00	50,07	5,14	3,08	51,31	1,24	NAIK
7	PENGUATAN PENGAWASAN	12,00	8,43	10,07	83,90	11,14	10,07	83,9	0	TETAP
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	6,00	4,50	5,22	86,98	5,79	5,04	84,07	2,91	TURUN
	SUB TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT	60,00	42,30	43,80	73,00	54,91	45,82	76,37		
B	HASIL									
1.	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	14,00	10,10	10,10	72,16	9,96				
2.	SURVEI INTERNAL INTEGRITAS ORGANISASI	6,00	3,73	4,35	72,47	5,32				
3.	SURVEI EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI	7,00	5,24	5,17	73,89	5,32				
4.	OPINI BPK	3,00	2,50	2,00	66,67	2,00		10		
5.	SURVEI EKSTERNAL PELAYANAN PUBLIK	10,00	8,01	7,60	76,00	8,27				
	SUB TOTAL KOMPONEN HASIL	40,00	29,58	29,22	73,06	30,87				
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	100,00	71,88	73,02	73,02	85,78				

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2017

Dari hasil sementara terlihat bahwa ada beberapa komponen yang turun nilainya bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pertanian berupaya untuk menaikkan nilai tersebut dengan memberikan evidens baru sehingga diharapkan nilai akhir yang akan diumumkan Kementerian PAN dan RB akan lebih baik dibandingkan hasil sementara tersebut.

Sebagai perbandingan, Kementerian Pertanian telah melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim RB Kementan dan Inspektorat Jenderal Kementan. Pencapaian indikator nilai RB telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 58. Target dan realisasi Nilai reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian 2016-2017

Gambar 58 diatas menunjukkan bahwa Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian Tahun 2017 jauh melampaui target yang telah ditetapkan dalam PK Kementerian Pertanian yaitu sebesar 85,78 atau capaian kinerja sebesar 115,9%. Berikut detail hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2017:

Tabel 55. Detail Hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2016 - 2017

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	2017		2016		% Kenaikan (Penurunan)
			Nilai Capaian	% Capaian	Nilai Capaian	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>PENGUNGKIT</i>						
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,99	79,80	4,26	85,20	-5,40%
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	3,75	75,00	3,75	75,00	0,00%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	6,00	100,00	4,84	80,67	19,50%
4	Penataan Tata Laksana	5,00	4,75	95,00	4,46	89,20	5,80%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	14,34	95,60	14,32	95,47	0,40%
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,14	85,67	4,07	67,83	17,84%
7	Penguatan Pengawasan	12,00	11,14	92,83	10,39	86,58	6,25%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	5,79	96,50	5,63	93,83	2,67%
	<i>Sub Total Komponen Pengungkit</i>	<i>60,00</i>	<i>54,91</i>	<i>91,52</i>	<i>51,72</i>	<i>86,20</i>	<i>5,34%</i>
B	<i>HASIL</i>						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,96	71,14	9,94	71,00	0,14%
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	5,32	88,67	5,26	87,67	1,00%
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,32	76,00	5,25	75,00	1,00%
4	Opini BPK	3,00	2,00	66,67	2,00	66,67	0,00%
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,27	82,70	8,05	80,50	2,20%
	<i>Sub Total Komponen Hasil</i>	<i>40,00</i>	<i>30,87</i>	<i>77,18</i>	<i>30,50</i>	<i>76,25</i>	
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	85,78		82,21		

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2017

Tabel 55. di atas menunjukkan bahwa Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebesar **85,78** dan jika dibandingkan dengan Capaian PMPRB Tahun 2016 sebesar **82,21** terdapat **kenaikan sebesar 3,56%**. Kenaikan terdapat pada 6 komponen pengungkit yaitu Penataan dan Penguatan Organisasi (19,50), Penguatan Akuntabilitas (17,84%), Penguatan Pengawasan (6,25), Penataan Tata Laksana (5,80%), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,67), dan Penataan Sistem Manajemen SDM (0,40) dan Penurunan terjadi pada 1 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan (-5,40%). Kenaikan juga terdapat pada 4 komponen hasil dan 1 komponen mendapatkan nilai yang sama dengan nilai tahun 2016. Seluruh komponen penilaian PMPRB tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen (*evidence*) sesuai area perubahan reformasi birokrasi terkait.

Peningkatan Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan untuk mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut;

1. Program Manajemen Perubahan.

- a) Pengembangan berbagai instrumen integritas, meliputi: kode etik/ kode perilaku, LHKPN/LHKASN
- b) Monitoring dan evaluasi RB
- c) Pelaksanaan internalisasi mendorong budaya kerja

2. Program Penguatan Sistem Pengawasan.

- a) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh WBK/WBBM
- b) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi
- c) Pelaksanaan whistleblowing system
- d) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
- e) Pengembangan sistem pengaduan terintegrasi
- f) Penanganan pengaduan masyarakat
- g) Pelaksanaan sistem pengendalian internal

3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
 - a) Kementerian Pertanian telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai level 0 sampai unit kerja terendah (eselon IV) dan telah memenuhi kaidah IKU yang SMART.
 - b) Seluruh dokumen SAKIP telah diunggah kedalam Website SAKIP Kementan yang dapat diakses oleh *stakeholder* (terbuka).
 - c) Telah dilakukan pengukuran kinerja organisasi secara elektronik (e-SAKIP).
 - d) Pengelolaan Keuangan
 - e) Pengelolaan BMN Kementerian Pertanian
 - f) Pembangunan/pengembangan sistem aplikasi pengelolaan perlengkapan dan pelaporan keuangan/BMN
 - g) Peningkatan SDM pengelola keuangan/perlengkapan/pelaporan
4. Program Penguatan Kelembagaan.
 - a) Melakukan analisis duplikasi fungsi organisasi menyeluruh Penetapan Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) eselon IV lingkup Kementerian Pertanian pada setiap unit kerja Eselon I.
 - b) Penguatan Kelembagaan UPT Kementerian Pertanian.
5. Program Penguatan Tata Laksana.
 - a) Penyederhanaan dan penyempurnaan peta proses bisnis
 - b) Penyempurnaan dan implementasi SOP
 - c) Monev penerapan peta proses bisnis internal dan monev penerapan SOP
 - d) Pengembangan E-Government yang terintegrasi
 - e) Pengembangan sistem kearsipan yang handal
 - f) Implementasi undang-undang keterbukaan informasi public
6. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
 - a) Penyusunan kebutuhan ASN Kementerian Pertanian
 - b) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN
 - c) Penerapan pedoman penegakan disiplin
 - d) Penyusunan standar kompetensi manajerial PNS Kementerian Pertanian

- e) Penyusunan capaian hasil penilaian prestasi kerja seluruh PNS Kementerian Pertanian
 - f) Pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi ASN secara terbuka dan berbasis kompetensi
 - g) Pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif
 - h) Penyusunan database profil kompetensi ASN Kementerian Pertanian
 - i) Penyusunan pengembangan karir berdasarkan database profil kompetensi ASN Kementerian Pertanian
 - j) Penguatan sistem dan kualitas diklat aparatur untuk mendukung kinerja
 - k) Penyusunan kebijakan pengembangan pola karir ASN.
7. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
- a) Penyusunan program legislasi pertanian (prolegtan)
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Prolegtan
 - c) Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak relevan/disharmonis
 - d) Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas SDM bidang Hukum
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a) Pemberian pelayanan publik berbasis IT dengan sistem portal untuk seluruh unit kerja pelayanan publik
 - b) Penyederhanaan pelayanan publik
 - c) Bimtek Penilaian Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP)
 - d) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat oleh pihak ketiga
 - e) Peningkatan pelayanan publik dengan inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian memberikan pelayanan.

Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan, seperti :

- 1) Diterapkannya manajemen perubahan secara sistematis seperti terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi, tersedianya road map

- reformasi birokrasi tahun 2015-2019 dan diterapkannya agen perubahan;
- 2) Kementerian Pertanian telah melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, tumpang tindih fungsi dengan instansi lain dan kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan juga telah melakukan perampingan struktur organisasi;
 - 3) Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan e-government pada layanan utamanya, walaupun belum terintegrasi.
 - 4) Penataan manajemen sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, antara lain telah merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melaksanakan promosi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan melakukan assesment terhadap sebagian besar pegawai;
 - 5) Kementerian Pertanian telah melakukan upaya penanganan gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dalam pengadaan barang dan jasa, serta pencanangan Zona Integritas dan membangun WBK/WBBM.
 - 6) Kementerian Pertanian telah melakukan usaha peningkatan kualitas layanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan publik dan juga melakukan survei kepuasan masyarakat guna mengetahui keinginan masyarakat.

Kegiatan pendukung pencapaian Nilai RB Kementerian Pertanian dapat dilihat di tabel 56

Tabel 56. Kegiatan Pendukung Pencapaian Nilai RB Kementerian Pertanian Tahun 2017

No	Kegiatan	Fisik				Anggaran (Rp)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Setjen								
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT)	Indeks	80	100	125	980,100,000	949,783,531	96.91
2	Penataan dan Penguatan Ketatabaksanaan	Indeks	76	95	125	1,171,100,000	1,095,475,164	93.54
3	Penataan Sistem Manajemen ASN	Indeks	80	96	120	14,606,381,000	14,401,307,814	98.60
4	Penyusunan Perundang-undangan bidang Pertanian berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan	persentase	80	77	96	8,339,036,000	7,608,399,149	91.24
5	Penerapan dan Pengembangan e-government Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	1	100	2,969,917,000	2,828,987,223	95.25
6	Penyelenggaraan SPI dan pengembangan kapasitas SDM	Kegiatan	1	1	100	5,006,607,000	4,543,610,945	90.75
7	Penguatan akuntabilitas Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	1	100	18,180,559,000	17,482,241,772	96.16
8	Dukungan dalam mewujudkan Opini Lap.Keuangan Kementan WTP	Kegiatan	1	1	100	974,131,413,000	948,384,134,352	97.36
Program Itjen								
	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan lingkup Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	1	100	92,439,375,000	85,720,888,115	92.73
	Total					1,117,824,488,000	1,083,014,828,065	96.89

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2017

Untuk mendukung upaya pencapaian nilai RB, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp1.117.824.488.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 senilai Rp1.083.014.828.065,- atau secara persentase sebesar 96,89%. Berdasarkan realisasi kegiatan pendukung pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian, terdapat efisiensi sebesar 3,5%.

Kegiatan Dukungan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Selain kegiatan-kegiatan spesifik teknis sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kementerian Pertanian juga melaksanakan program dan kegiatan dukungan kepada pencapaian kesebelas sasaran strategis, yaitu :

(1) Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Untuk mendukung pencapaian swasembada dan swasembada

pangan berkelanjutan diperlukan upaya mencegah masuk dan menyebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian dari tahun ke tahun senantiasa meningkatkan kualitas kerjanya untuk mengawasi lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK yang memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2012-2017, sebagaimana tergambar dalam penerbitan sertifikasi, seperti terlihat pada Tabel 57.

Tabel 57. Frekuensi Penerbitan Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2012-2017

Sertifikasi	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karantina Hewan	443.401	413.280	471.868	599.700	700.731	632.245
Karantina Tumbuhan	468.492	452.994	556.331	575.830	688.372	816.420
TOTAL	911.893	866.274	1.028.199	1.175.530	1.389.103	1.448.665

Sumber : Badan Karantina Pertanian, 2017

Badan Karantina Pertanian tahun 2017 telah menerbitkan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya dengan frekuensi: (1) impor: 98.092 kali; (2) ekspor: 150.998 kali, (3) domestik masuk: 172.106 kali, dan (4) domestik keluar 395.234 kali, dengan total sertifikat sebanyak 816.420. Sedangkan frekuensi penerbitan sertifikasi untuk komoditas hewan dan produknya adalah: (1) impor: 37.477 kali, (2) 22.365 kali, (3) domestik masuk: 193.960 kali, dan (4) domestik keluar: 378.443 kali, dengan total sertifikat sebanyak 632.245 kali. Total penerbitan sertifikasi untuk komoditas tumbuhan dan hewan beserta produksinya sebanyak 1.448.665 kali.

Pada tahun 2017, Badan Karantina Pertanian telah melakukan tindakan penahanan sebanyak 2.089 kali, tindakan penolakan sebanyak 1.798 kali dan tindakan pemusnahan sebanyak 1.110 kali, sehingga total tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan sebanyak 5.006 kali.

(2) Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Dalam rangka pemberdayaan petani guna mendukung pencapaian produksi komoditas strategis nasional selama tahun 2017 dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1). Pengawasan Penyuluh di Sentra Produksi

Pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi komoditas strategis pertanian merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP). Pola pembelajaran dalam meningkatkan kapasitas petani dilakukan melalui kursus tani, fasilitasi bahan pembelajaran, serta rebug tani. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan keswadayaan dan kemampuan agribisnis petani dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai dan komoditas strategis lainnya. Pengawasan dan Pendampingan di sentra produksi padi, jagung, kedelai, tebu, sapi/kerbau, bawang merah dan aneka cabai dari kegiatan sekolah lapang (SL) di 816 BPP di tahun 2017, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh 1.585 penyuluh PNS dan 2.496 THL-TBPP pada 816 BPP/BP3K di 4.080 WKPP seperti yang diilustrasikan pada Tabel 58.

Tabel 58. Pengawasan dan Pendampingan di Sentra Produksi

No	Sentra	Jumlah WKPP	Penyuluh (org)	THL-TB PP (org)	BP3K (unit)
1	Padi	1625	504	1121	325
2	Jagung	965	386	579	193
3	Kedelai	475	219	257	95
4	Tebu	130	69	61	26
5	Sapi/kerbau	230	106	124	46
6	Bawang merah dan aneka cabai	655	301	354	132
	Total	4080	1585	2496	816

Sumber data: Badan PPSDMP, Tahun 2017

2). Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BP3K sebagai simpul koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan



Gambar 59. Suasana Rembug Tani di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

pertanian sekaligus sebagai pusat data dan informasi pertanian di kecamatan. Dengan fasilitasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di BP3K dalam rangka mencerdaskan dan membangun keswadayaan serta kemandirian pelaku

utama dan pelaku usaha serta masyarakat perdesaan pada umumnya. Kegiatan peningkatan kapasitas BP3K memiliki tahapan kegiatan, yaitu: (1) Temu teknis penyuluhan di kecamatan, (2) Rembug tani (Gambar 59.) (3) Kursus tani, (4) *Farmer's Field Day* (FFD). Sasaran BP3K yang difasilitasi pada tahun 2017 sebanyak 5.232 unit.

(3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

Inspektorat Jenderal selama tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap 602 satker atau 89,85% dari total 670 satker lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan Audit Kinerja telah dilaksanakan terhadap 451 satker atau 67,31 %. Selain melaksanakan kegiatan Audit Kinerja, Inspektorat juga melaksanakan kegiatan pengawalan kegiatan APBN-P Tahun 2017 terhadap 50 satker, pengawalan rekrutmen CPNS terhadap 22 provinsi, Evaluasi Cetak Sawah, SIWAB, dan SAKIP terhadap 33 satker serta pemantauan tindak lanjut temuan BPK-RI terhadap

terhadap 26 satker dan pemantauan kegiatan Toko Tani Indonesia pada 20 satker. Secara ringkas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

a) Audit Kinerja

- Kegiatan Pengawasan Itjen terhadap 602 satker atau 89,85% dari total 670 satker lingkup Kementerian Pertanian.
- Anggaran yang diaudit sebesar Rp18.958.983.055.238 atau 78,47% dari anggaran Kementerian Pertanian tahun 2017 sebesar Rp24.157.744.764.600
- Nilai temuan hasil Audit Kinerja tahun 2017 (hingga 31 Desember 2017) sebesar Rp6.538.768.944,08 dan telah dilakukan tindak lanjut sebesar Rp2.091.378.900,33 (31,98%).
- Inspektorat Jenderal mampu menekan terjadinya *inefisiensi* pelaksanaan program/kegiatan sebesar 0,03%.
- Kegiatan pengawasan lain yang mendukung pencapaian WTP tahun 2017 yaitu pemantauan Tindak Lanjut temuan BPK RI, pengawalan kegiatan APBN-P Tahun 2017, pengawalan rekrutmen CPNS tahun 2017, Evaluasi Cetak Sawah, SIWAB, dan Evaluasi SAKIP

b) Audit Investigasi dan Tujuan

- Jenis materi pengaduan yang ditindaklanjuti melalui audit investigasi dan tujuan tertentu pada tahun 2017 yaitu terkait adanya dugaan pelanggaran: (a) pengadaan barang/jasa; (b) kode etik pegawai; (c) penyaluran dana bantuan sosial (bansos) ke kelompok tani penerima; (d) kinerja pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan (e) pengelolaan dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan
- Jumlah kerugian negara hasil audit investigatif dan tujuan tertentu senilai Rp241.783.100,00 dan telah ditindaklanjuti senilai Rp241.783.100,00 (100%)

c) 3. Unit Pengelola Gratifikasi

- Telah diterbitkan Permentan No.97/OT.210/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian.
- Sekretariat UPG Kementerian Pertanian secara rutin telah melaporkan perkembangan penerimaan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Tahun 2017 sebanyak 182 laporan yang terdiri dari laporan Gratifikasi Kedinasan sebanyak 132 laporan (72,53%) senilai Rp.410.097.584 dan Gratifikasi Umum sebanyak 50 laporan (27,47%). Gratifikasi umum terdiri atas gratifikasi barang sebanyak 21 laporan senilai Rp15.145.000,-, gratifikasi makanan sebanyak 10 laporan senilai Rp1.432.000,- dan gratifikasi uang sebanyak 19 laporan senilai Rp53.000.300,-.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertanian pada kategori Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017 dengan diluncingnya secara online aplikasi pelayanan gratifikasi di <http://sigap-upg.pertanian.go.id>

d) Maturitas SPIP dan Gerakan WBK/WBBM

- Hasil quality assurance atas penilaian Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2017 mendapat nilai 2,95 dengan tingkat Maturitas SPIP kategori "Berkembang", meningkat apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang memperoleh nilai maturitas 2,65.
- Kementerian Pertanian melalui Gerakan Pembinaan Integritas Program dan Layanan menuju Zona Integritas WBK/WBBM telah melakukan penilaian sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan nilai rata-rata 77,45 dan ditetapkan sebanyak 47 UPT atau 88,68% sebagai unit kerja

berpredikat WBK dari 53 UPT yang dinilai.

- Nilai Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai hasil validasi BPKP Tahun 2017, Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (integrated) dengan catatan meningkat apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang berada pada level 2+ (infrastructure).

e) Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kementerian Pertanian telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2017 dengan hasil nilai indeks RB sebesar 85,78 yang terdiri dari komponen pengungkit sebesar 54,91 atau 91,51% dari bobot 60, dan komponen hasil sebesar 30,87 atau 77,18% dari bobot 40.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2017 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:

1). Global Food Security Index (GFSI)

Menurut data GFSI di bulan September 2017, Indonesia berada di peringkat 69 dunia (dari 113 negara) dan peringkat 13 di Asia Pasifik (dari 23 negara). Nilai Index Indonesia tahun 2017 meningkat 0,2 poin dari 51,1 poin di tahun 2016, menjadi 51,3 poin ditahun 2017. Dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) index Indonesia terus meningkat hingga 3 poin dari 48,3 (2015) menjadi 51,3 (2017).

2) Penghargaan Anti Gratifikasi Terbaik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada 10 institusi kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kategori Kementerian Komisi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Selain Kementan, penghargaan pengendalian gratifikasi terbaik juga diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian

Kuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Bank Mandiri, PT Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPD Jabar-Banten. Penghargaan ini diberikan atas kinerja kementerian/lembaga dalam pencegahan korupsi di instansinya masing-masing. Kementan meraih penghargaan ini karena berdasar penilaian evaluasi KPK, Kementerian Pertanian termasuk kementerian yang konsisten dan patuh dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara, mencegah gratifikasi, dan telah membuat unit pencegahan (Gambar 60).



Gambar 60. Menteri Pertanian Menerima Penghargaan K/L Anti Gratifikasi Terbaik dari KPK

3) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 61. Sekretaris Jenderal Kementan menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017

Kementerian Pertanian (Kementan) meraih peringkat ke 4 Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 untuk kategori kementerian dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI). Pemingkatan Keterbukaan Informasi hanya diberikan untuk

10 peringkat pada setiap kategori. KIP RI melakukan pemingkatan Keterbukaan Informasi berdasarkan tiga variabel penilaian yakni Self Assessment Questinnnaire (SAQ), Visitasi Lanjutan Acak (VLA), dan Visitasi. Adapun kementerian yang mendapat peringkat di atas Kementan adalah Kementerian Keuangan (peringkat pertama), Kementerian Perindustrian (peringkat kedua), dan Kementerian Perhubungan (peringkat ketiga). (Gambar 61).

4). Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2016 oleh BPK.

Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pertama kalinya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. Tercatat, pada 2006 Kementan meraih opini *disclaimer*, lalu 2008 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga 2012, dan 2015 kembali mendapatkan WDP. Upaya Kementan dalam mencapai opini WTP, di antaranya melalui penyempurnaan regulasi dengan diterbitkannya Permentan Nomor : 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Persediaan.



Gambar 62. Menteri Pertanian Menerima Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2016 Dari Badan Pemeriksa Keuangan Di Kantor Pusat Kementan, 5 Juni 2017

5). Penghargaan TOP IT

Kementerian Pertanian menyabet dua penghargaan TOP IT 2017 untuk kategori TOP IT Implementasi on Ministry 2017 dan kategori TOP IT Leadership 2017. Penghargaan diberikan, karena Kementan berhasil menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penghargaan diberikan Majalah Itech bersama asosiasi TIK dan didukung Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Penghargaan diberikan pada hari selasa (31/10/2017) di Balai kartini Jakarta.

Terobosan Kementan bidang TIK turut terasa dari pengembangan pemasaran komoditas pangan pokok dan pemantauan harga produk pertanian dalam jaringan (daring). Sedangkan penilaian dan penentuan pemenang berdasarkan jawaban kuesioner dan wawancara penjurian serta riset di instansi pemerintahan dan swasta. Keputusan pemenang dilakukan secara obyektif oleh dewan juri kredibel.

6). Keberhasilan Kawal Stabilisasi Harga Pangan

Kementan diberi penghargaan oleh KPPU karena berhasil kawal stabilisasi harga pangan. Kerjasama yang dilakukan antara

Kementerian Pertanian dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama ini sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Kementerian Pertanian juga diberikan apresiasi dan penghargaan karena dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2017 lalu, bersama dengan Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

7). TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017

Kementan memperoleh penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik bersama 40 top inovator lainnya, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, PT Taspem dan 31 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penghargaan ini langsung diserahkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani di Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia yang dilaksanakan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/8/2017).

Aplikasi pelayanan satu pintu PRIOQ KLIK dari Karantina Tanjung Priok, Kementerian Pertanian menjadi salah satu inovasi yang lolos dalam ajang penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setelah menyisihkan 3.054 peserta lainnya, dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN. PRIOQ KLIK memudahkan pengguna layanan jasa karantina dalam proses pengajuan karantina dengan cepat SATU KLIK. Sebelum ada aplikasi ini, pengguna jasa karantina di Tanjung Priok harus menunggu hasil verifikasi petugas secara langsung di kantor karantina atau harus menelepon petugas untuk menanyakan hasil verifikasinya (Gambar 63).



Gambar 63. Kepala Badan Karantina Pertanian menerima Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017

8). Apresiasi Prestasi Lebaran 2017

Kementerian Pertanian menerima penghargaan Apresiasi Prestasi Lebaran 2017 dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP).bersama 14 kementerian/lembaga dan BUMN lainnya. Penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara pada Selasa (1/8/2017). Penyerahan penghargaan itu merupakan langkah awal UKP PIP dalam mengapresiasi prestasi aparatur negara dan masyarakat. Kinerja Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Kapolri dalam mengendalikan stabilisasi harga pangan selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri juga mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo.

9). Menteri Pertanian masuk 5 menteri berprestasi (survei *Polmark*)

Survei *Polmark* Indonesia yang dilakukan pada pada 13-25 November 2017 menempatkan menteri pertanian masuk lima besar menteri yang prestasinya menonjol oleh publik.Survei *PolMark* Indonesia digelar 13-25 November 2017 dengan sampel 2.600 responden yang dipilih secara acak (*multistage random*

sampling) di seluruh provinsi di 260 desa. Margin of error penelitian ini +/-1,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Prestasi ini, di berikan atas persepsi baik masyarakat terhadap menteri pertanian. Dengan berbagai langkah konkret yang diambil dari kementan dalam ketahanan pangan di masyarakat. Menteri Amran Sulaiman juga telah menunjukkan janjinya untuk swasembada beras, jagung, dan kedelai yang secara bertahap telah terbukti.

10). Juara Harapan Unit Kearsipan Terbaik Nasional Kategori Kementerian

Kementerian Pertanian meraih Juara Harapan 1 dari arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dalam kategori Unit Kearsipan Terbaik Nasional Kategori Kementerian. Peraih penghargaan ANRI Award diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dengan didampingi Kepala ANRI Mustari Irawan dan Deputi Pembinaan Kearsipan Andi Kasman pada acara malam Penganugerahan ANRI Award Tahun 2017. Kementerian Pertanian berada dibawah peraih juara 1, 2 dan 3 yang diterima oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri. Acara tersebut bertujuan untuk menciptakan nuansa kompetisi yang sehat sehingga terwujud kualitas penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik.

11). 5 (lima) besar Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Besar

Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendapat penghargaan dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award yang memberikan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola kepegawaian pusat dan daerah. Kementan RI didaulat menjadi Pengelola Kepegawaian Terbaik Kelima Tingkat Kementerian Besar, bersama Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia (HAM) ada di posisi pertama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan diurutkan berikutnya.

C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2017, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp24.226.137.776.000, yang dipergunakan untuk membiayai 11 program. Sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai Rp21.909.385.622.358,- atau 90,44%. Perkembangan pagu APBN Kementan dan realisasinya selama 6 tahun (2012-2017) disajikan pada Tabel 59.

Tabel 59. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2012-2017

NO	TAHUN	PAGU (Rp000)	REALISASI (Rp000)	%
1	2012	19.667.874.192,00	17.719.613.508,00	90,09
2	2013	17.928.730.779,00	15.857.112.302,97	88,45
3	2014	14.238.721.451,00	13.251.063.953,00	93,06
4	2015	32.725.568.426,00	28.675.810.207.755	87,63
5	2016	27.726.630.187.000	27.039.325.731.646	97,52
6	2017	24.226.137.776.000	21.909.385.622.358	90,44

Sumber: Sekretaris Jenderal, 2017

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan anggaran dan perubahan kode mata anggaran yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran, (2) Penghematan biaya pada rapat-rapat/pertemuan, akomodasi, perjalanan dinas, dan belanja perkantoran, dan (3) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA 2017 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah

(Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan ditanggung oleh 11 program Kementerian Pertanian.

Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan bulan 31 Desember 2017 disajikan pada **Lampiran 4.**

BAB IV

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 11 (empat) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran strategis sebagian besar indikator kinerja sangat berhasil dan berhasil (sangat berhasil 15 indikator dan berhasil 8 indikator). Dari hasil evaluasi hanya 3 indikator yang cukup berhasil, 1 indikator kurang berhasil, dan 1 indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang **sangat berhasil** yaitu: (1) Produksi padi mencapai 81,39 juta ton dari target 78,13 juta ton; (2) Produksi jagung mencapai 27,95 juta ton dari target 25,20 juta ton; (3) rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa mencapai 359 dari target 337; (4) Harga GKP di tingkat produsen lebih besar dari HPP; (5) Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras mencapai 7,48% dari target 5,87%; (6) Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar mencapai 12,64 dari target < 15; (7) Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah mencapai 16,14 dari target < 20; (8) Produksi manggis mencapai 168,5 ribu ton dari target 120 ribu ton; (9) Produksi Karet mencapai 3.629 ribu ton Karet Kering dari target 3.559 ribu ton Karet Kering; (10) Produksi Kopi mencapai 668.683 ton Kopi berasan dari target

637.539 ton Kopi Berasan; (11) Produksi Kelapa mencapai 2.870,74 ribu ton dari target 2.673 ribu ton; (12) Produksi daging kambing dan domba mencapai 124,84 ribu ton dari target 120 ribu ton; Persentase; (13) Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya mencapai 25,54% dari target 25%; (14) PDB Pertanian Sempit/Jumlah TK Pertanian mencapai Rp. 27,59 juta dari target Rp. 27 juta; dan (15) Nilai IKM Kementerian Pertanian mencapai 83,1 dari target 82.

Indikator kinerja yang **berhasil** yaitu: (1) Produksi tebu mencapai 2,12 juta ton dari target 2,4 juta ton; (2) Produksi daging sapi dan kerbau mencapai 564,02 ribu ton karkas dari target 640 ribu ton karkas; (3) Skor Pola Pangan harapan (PPH) mencapai 88 dari target 88,4; (4) Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit mencapai 20,96 dari target <17; (5) Produksi kentang mencapai 1.235 Ribu Ton dari target 1.437 Ribu Ton; (6) Produksi Kakao mencapai 659.776 ton biji kering dari target 688.345 ton biji kering; (7) Produksi teh mencapai 139.362 ribu ton dari target 146.168 ribu ton; (8) Produksi Kelapa Sawit mencapai 37.812.627 ton CPO dari target 40.936.330 ton CPO.

Indikator kinerja yang **cukup berhasil** adalah (1) Produksi mangga mencapai 1.869 ribu ton biji dari target 2.331 ribu ton; (2) Produksi nenas mencapai 1.431 ribu ton dari target 1.902 ribu ton; dan (3) Produksi salak mencapai 739 ribu ton dari target 1.152 ribu ton;

Indikator kinerja yang **kurang berhasil** pencapaiannya di tahun 2017 ini yaitu Produksi kedelai mencapai 0,542 juta ton dari target 1,20 juta ton.

Sedangkan indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah Nilai RB Kementerian Pertanian karena sampai dengan bulan Februari 2018 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2017 khususnya perkembangan capaian 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 28 indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Selain itu, juga dukungan pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama kendala dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas seperti kedelai, gula tebu, daging sapi dan kerbau, cabai rawit, mangga, nenas, salak, kentang, kakao, teh, daging kambing dan domba, serta kelapa sawit. Permasalahan tersebut mencakup: (1) keterbatasan ketersediaan lahan baku untuk masing-masing komoditas, (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) terbatasnya penggunaan bibit/benih unggul, (4) gangguan reproduksi ternak, (5) terbatasnya populasi ternak sapi/kerbau, (6) serangan hama dan penyakit, (7) terbatasnya pemanfaatan teknologi, (8) penanganan pasca panen yang belum optimal, (9) keterbatasan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani, (10) terbatasnya pendampingan dan bimbingan penyuluh di lapangan, (11) meningkatnya impor produk pertanian, dan (12) panjangnya rantai tata niaga.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, untuk tahun 2017 Kementerian Pertanian telah mulai melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pemanfaatan dan perluasan areal tanam baik di lahan kering maupun di lahan milik subsektor/instansi lain (perkebunan/perhutani/ subsektor lain); integrasi tanaman pangan dengan perkebunan; meningkatkan kegiatan penelitian menghasilkan varietas unggul tahan hama dan penyakit; penataan pola tanam; meningkatkan penggunaan bibit/benih unggul bersertifikat; mendorong peningkatan peran kelembagaan petani; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani; meningkatkan peran penyuluh; meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait

HPP dan pembatasan importasi pangan, serta dengan pabrik gula untuk transparansi taksasi dan rendemen tebu petani. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2017 secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Tahun 2017 Kementerian Pertanian mengelola APBN senilai Rp24.226.137.776.000,- yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia dengan jumlah DIPA Satker sebanyak 1.103 DIPA Satker. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2017, mencapai Rp21.909.385.622.358,- atau 90,44%.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, Kinerja Pembangunan Pertanian 2017 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

**LAMPIRAN 2. DISTRIBUSI MENURUT GOLONGAN/ RUANG, JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

NO.	UNIT KERJA	Golongan I			Golongan II			Golongan III			Golongan IV			Pendidikan							JUMLAH															
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E	Jml	L	P	S3	S2	S1	DA	S Mula	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD								
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	2	3	5	7	22	55	56	140	151	423	155	140	869	71	47	5	8	4	135	699	450	12	205	481	0	6	58	0	1	365	13	8	1149
2	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN	0	0	0	2	2	4	7	12	4	27	41	61	27	42	171	25	21	28	21	2	97	188	109	2	136	108	0	2	0	0	0	40	5	4	297
3	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	0	2	2	2	6	40	42	75	51	208	90	227	83	88	488	29	31	7	3	2	72	439	335	8	112	317	1	2	49	0	254	15	16	774	
4	DITIR PASARANA & SARANA PERTANIAN	0	0	0	0	1	7	14	18	40	33	113	48	58	252	35	15	0	6	1	57	202	147	5	81	179	0	2	12	0	0	67	2	1	349	
5	DIREKTORAT JENDERAL PERTANAMAN & KESEHATAN PERKEBUNGAN	6	3	24	18	51	156	145	181	128	608	286	480	315	335	1936	130	99	16	6	0	211	1449	817	20	475	473	22	10	222	2	0	845	74	113	2266
6	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNGAN	1	0	2	4	7	24	22	125	121	292	123	335	182	111	751	57	23	7	4	1	92	690	452	4	149	474	19	13	50	0	76	326	14	17	1142
7	BADAN LITBANG PERTANIAN	47	35	193	113	388	405	391	786	291	1873	793	1712	713	961	4179	429	256	162	80	148	1075	4948	2557	510	1150	1945	83	60	317	53	11	6549	324	413	7515
8	BADAN PSDM PERTANIAN	0	22	42	39	103	104	183	170	128	585	281	487	241	266	1275	146	104	57	28	4	339	1542	760	56	495	638	161	7	102	3	0	607	88	125	2302
9	BADAN KEPAHAMAN PANGAN	0	0	1	0	1	5	5	9	7	26	25	119	57	35	236	23	11	1	3	1	39	160	142	7	71	118	0	2	8	0	0	91	2	3	302
10	DITIR PENGOLAHAN & PEMASAKAN HASIL PERTANIAN	0	0	0	0	0	2	7	15	17	41	98	102	41	69	250	48	22	4	1	76	198	169	3	120	167	0	0	14	0	0	61	1	1	367	
11	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	0	0	0	5	5	10	15	19	21	65	94	115	50	53	255	26	21	3	2	0	52	203	174	5	86	163	0	2	8	0	0	94	10	9	377
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	5	0	7	4	16	219	351	395	472	1497	432	624	545	451	2052	200	74	13	2	1	290	2300	1495	10	799	1124	2	5	498	26	4	1351	16	20	3955
JUMLAH		59	62	273	190	584	977	1195	1856	1314	5342	2397	4798	2460	2609	12174	1219	684	303	164	165	2535	13018	7617	642	3819	6207	288	109	1350	84	92	6750	564	730	20635

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2017

LAMPIRAN 3. Matriks Pemantauan Kegiatan Pendukung (Rencana AKSI)
 PENCAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017 & PERHITUNGAN NILAI EFISIENSI
 1. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI PADI

No	Kegiatan Padi		Fisik		Anggaran (000 Rp)		Capaian Realisasi (%)	Harga Satuan	Harga Total seharusnya	Efisiensi (%)	NE %
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Pagu	Realisasi					
Program Diện Tanaman Pangan											
1	Ha	879,314	830,285	94,40	557,703,063	493,915,721	88,56	634	526,486,773	6,59	
2	Ha	293	273	93,17	16,109,356	15,197,314	94,34	54,981	15,009,741	-1,23	
3	Ha	11,020	9,150	83,03	59,877,543	59,520,184	99,40	5,370	59,877,543	0,97	
4	Ha	2,000	2,000	100,00	19,952,625	19,151,517	95,98	1,294	19,338,201	0,97	
5	Ha	15,225	14,950	98,22	1,358,798	1,358,798	97,74	3,862	1,358,798	2,32	
6	Ha	360	360	100,00	6,047,585	5,987,772	99,01	10,988	6,047,585	1,00	
7	Unit/Paket	4,643	4,633	99,79	1,231,459,908	1,231,247,646	99,20	282,880	1,310,065,224	5,89	
8	Unit	1,500	1,499	99,93	262,500,000	262,269,924	99,91	175,000	262,269,924	0,02	
9	Ha	17,175	7,025	40,91	2,491,125	2,414,760	96,93	347	2,439,046	1,01	
10	Ha	500,000	235,735	47,15	126,838,328	55,774,945	43,97	254	59,800,467	7,22	
Program Diện PSP											
1	unit	100,000	99,995	99,99	117,215,000	117,209,000	99,99	1,172	117,209,139	0,00	
2	unit	500	496	99,2	40,000,000	39,680,000	99,20	80,000	39,680,000	0,00	
3	Ha	10,000	10,000	100	30,000,000	29,823,000	99,41	3,000	30,000,000	0,59	
4	unit	500	487	97,40	50,000,000	49,000,000	98,00	100,000	48,700,000	-0,61	
5	unit	250,311	193,619	77,35	2,236,223,870	1,079,180,612	48,25	8,934	1,729,749,909	60,28	
6	unit	15,405	14,615	94,87	431,340,000	355,935,090,5	82,52	28,000			
7	unit	3,000	1,572	52,40	1,209,000,000	488,481,308,8	40,40	403,000			
8	unit	15,253	13,598	89,15	381,325,000	136,724,781	35,87	25,000			
9	unit	2,057	1,730	84,10	164,560,000	79,596,016	48,37	80,000			
10	unit	200,000	150,000	75,00	9,000,000	9,000,000	45	45			
11	unit	1,618	1,504	93,01	29,124,000	15,999,716	54,94	18,000			
12	unit	12,978	10,500	80,91	11,874,870	2,389,700	20,12	915			
13	Ha	72,033	60,243	83,63	1,178,397,000	1,008,454,686	85,58	16,359	985,522,892	-2,27	
14	Ha	1,000,000	997,960	99,80	144,000,000	143,706,317,76	99,80	144	143,706,240	0,00	
15	Ha	135,955	125,068	91,96	203,992,500	187,092,305,87	91,72	1,500	188,467,434	0,73	
16	Ha	3,000	3,529	90,49	15,600,000	13,816,000	88,56	4,000	14,116,000	2,17	
17	Ha	80,000	67,652	84,57	16,000,000	12,773,759	79,84	200	17,330,400		
Program Badan Litbang											
1	varietas	5	5	100	2,848,605	2,830,040	99,35	569,721	2,848,605	0,66	
2	teknologi	6	6	100	2,785,835	2,783,980	99,93	464,306	2,785,835	0,07	
3	ton	928	858,88	92,55	11,347,702	10,951,836	96,51	12,228	10,902,494	-4,10	
4	Provinsi	15	15	100	2,040,000	2,010,000	98,53	136,000	2,040,000	1,49	
5	Teknologi	2	3	150	695,000	690,391	99,34	347,500	1,042,500	51,00	
Pengawasan dan Pendampingan UPSUS											
					544,268,602	450,174,372	82,71				
TOTAL					6,961,783,922	4,852,840,109	69,71	3,834,854	5,592,681,301	15,25	88,11

LAMPIRAN 3. MATRIKS PEMANTAUAN KEGIATAN PENDUKUNG (RENCANA AKSI)

2. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI jagung

No.	Kegiatan Padi	Fisik		Realisasi (%)	Pagu	Anggaran (000 Rp)		Harga Satuan	Harga Total Seharusnya	Efisiensi (%)	NE %	
		Satuan	Target			Realisasi	Realisasi					Realisasi
Program Ditjen Tanaman Pangan												
1	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	Ha	3.000,000	2,816,563	93.89	2,278,170,159	1,963,315,532	86.18	759.39	2,138,869,925.85	8.94	
2	Perbanyakan Benih Sumber Jagung	Ha	93	87	93.55	-	-	-	-	-	-	
3	Pemantapan Penerapan PHT	Ha	615	570	92.68	1,004,125	892,463	88.88	1,632.72	930,652,44	4.28	
4	Gerakan Pengendalian OPT Reguler	Kali	146	143	97.95	1,389,140	1,345,474	96.86	9,514.66	1,360,596.03	1.12	
5	Sarana Pascapanenan Jagung	Unit/Paket	2,359	2,359	100.00	104,002,186	99,656,292	95.82	44,087.40	104,002,186.00	4.36	
6	Penguatan Agroekosistem Jagung	Ha	285	270	94.74	162,500	153,125	94.23	570.18	153,947.37	0.54	
Program Badan Litbang												
1	Perakitan Varietas Unggul Jagung lahan sub optimal dan optimal (varietas)	varietas	2	2	100.0	1,800,000	1,744,606	96.92	900,000.00	1,800,000.00	3.18	
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Jagung (teknologi)	teknologi	1	1	100.0	400,000	394,701	98.68	400,000.00	400,000.00	1.34	
3	Penyediaan Benih Sumber (ton)	ton	287.9	142.2	49.4	6,426,535	6,184,923	96.24	22,322.11	3,174,203.81	(48.68)	
4	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Jagung (Teknologi)	teknologi	1	1	100.0	280,000	266,618	95.22	280,000.00	280,000.00	5.02	
TOTAL						2,393,634,645	2,073,953,734	86.64		2,250,971,511.49	8.54	71.34

LAMPIRAN 3. MATRIKS PEMANTAUAN KEGIATAN PENDUKUNG (RENCANA AKSI)

3. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI kedelai

No	Kegiatan Kedelai	Fisik		Realisasi (%)	Pagu	Anggaran (000 Rp)		Harga Satuan	Harga Total Seharusnya	Efisiensi (%)	NE %	
		Satuan	Target			Realisasi	Realisasi					Realisasi
Program Ditjen Tanaman Pangan												
1	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	Ha	716,770	607,002	84.69	965,971,752	815,977,433	84.47	1,347.67	818,040,355.22	0.25	
2	Perbanyakan Benih Sumber Kedelai	Ha	189	177	93.65	-	-	-	-	-	-	
3	Pemantapan Penerapan PHT	Hektar	270	230	85.19	558,225	489,212	87.64	2,067.50	475,525.00	(2.80)	
4	Gerakan Pengendalian OPT Reguler	Kali	60	60	100	570,650	565,689	99.13	9,510.83	570,650.00	0.88	
5	Sarana Pascapanenan Kedelai	Unit	828	828	100	18,676,788	18,574,085	99.45	22,556.51	18,676,788.00	0.55	
6	Penguatan Agroekosistem Kedelai	Hektar	120	100	83.33	103,625	85,000	82.03	863.54	86,354.17	1.59	
Program Badan Litbang												
1	Perakitan Varietas Unggul Kedelai toleran pecah polong dan biji besar serta lahan pasang surut dan pencerek polong (varietas)	varietas	1	1	100	1,340,000	1,339,393	99.95	1,340,000.00	1,340,000.00	0.05	
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Kedelai (teknologi)	teknologi	2	2	100	760,000	759,555	99.94145	380,000.00	760,000.00	0.06	
3	Penyediaan Benih Sumber (ton)	ton	203	145.64	71.74	4,311,213	4,189,633	97.17991	21,237.50	3,093,029.86	(26.17)	
4	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Kedelai (Teknologi)	teknologi	1	1	100	575,900	574,615	99.78	575,900.00	575,900.00	0.22	
TOTAL						992,868,153	842,554,615	84.86		843,618,602.24	0.13	50.33

4. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI GULA TEBU

No	Kegiatan	Fisik		%	Anggaran (Rp)		%	Harga Satuan	Harga Total Seharusnya	Efisiensi (%)	NE %	
		Satuan	Target		Realisasi	Pagu						Realisasi
Program Ditjen Perkebunan												
1	Rawat Ratoon	Ha	2250	2150	95.56	7.631.250,000	5.881.077,600	77,07	3.391,667	7.292.083,333	23.99	
2	Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu TKP	Orang	556	556	100,00	18.708.387,000	16.718.478,000	89.36	33.648,178	18.708.387,000		
3	Mapping ketersediaan air	Pkt	5	5	100,00	2.243.105,000	2.050.733,900	91,42	448.621,000	2.243.105,000	9.38	
4	Pengawasan Pendampingan Tebu dan Pengadaan Sarana	Keg	10	10	100,00	1.425.460,000	1.319.071,600	92.54	142.546,000	1.425.460,000	8.07	
5	Penerapan Varietas Tebu Adaptif di wilayah Pengembangan Baru	Pkt	4	4	100,00	1.375.000,000	1.120.360,700	81.48	343.750,000	1.375.000,000	22.73	
6	Pengawasan Varietas Tebu Adaptif	Pkt	1	1	100,00	226.900,000	186.978,000	82.41	226.900,000	226.900,000	21.35	
7	Binahungun Teknis Petani dan Asisten	Kesq	2	2	100	438.350,000	416.297,200	94.97				
8	Alat dan Pakaian Pertanian	Unit	41	41	100	41.026.880,375	37.304.628,125	90.93	1.000.655,619	41.026.880,375	9.98	
	Grab Loader	Unit	43	43	100	31.902.118,400	28.701.860,400	89.97	741.909,730	31.902.118,400	11.15	
	Traktor Roda 4	Unit	176	176	100	5.720.000,000	4.894.689,250	85.57	29.947,644	5.720.000,000	7.68	
	Pemba Air	Unit	832	107	12.86	33.745,000,000	4.324.831,000	12.82	40.558,903	4.324.831,000	0.35	
9	Pembangunan KDB Tebu	Ha	8	8	100,00	3.382.000,000	2.547.007,000	75.31	422.750,000	3.382.000,000	32.78	
10	Facilitasi Pengolahan Hasil Tebu	Unit	8	8	100,00							
Program Badan Litbang												
	Perakitan Varietas Unggul Tebu dengan Rendaman dan Produktivitas Tinggi di lahan kering	Varietas	1	4	400	190.000,000	189.527,500	99.75	190.000,000	760.000,000	301.00	
2	Perakitan Teknologi dan Inovasi Pemuliaan Produk Tebu	Teknologi	2	3	150	155.000,000	154.126,700	99.44	77.500,000	232.500,000	50.85	
3	Belanja Sumber Tebu	Budget	1.500,000	1.525,000	101.67	205.000,000	204.970,773,000	99.99	137	208.416,667	1.68	
Total						148.374.662,775	106.014.822,719	71.45	3.702,178.877,29	118.393.647,114,91	11.68	50.325

5. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI DAGING SAPI DAN KERBAU

No	Kegiatan	Fisik		%	Anggaran (000 Rp)		%	Harga Satuan	Harga Total Seharusnya	Efisiensi (%)	NE %	
		Satuan	Target		Realisasi	Pagu						Realisasi
Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan												
1	Optimalisasi Reproduksi	Juta ekor	4	4	98.50	622.422,000	522.477,000	83.94	155,605,500	613,085,670	17.34	
2	Penanaman dan pengembangan pakan berkualitas	Ha	9.487	4.725	49.80	112.399,000	94.583,000	84,15	11,948	55,980,318	-40.81	
3	Pengaturan Pakan Tambahan Untuk ternak Gandaan Reproduksi	Ton	2.965	2.787	94.00	19.891,000	17.138,000	97,92	6,709	18,696,869	9.10	
4	Produksi Semen Beku	Juta dosis	457	415	90.81	20.414,000	19.947,000	97,71	44,670	18,537,877	-7.06	
5	Pengawasan gangguan reproduksi	Ribu Ekor	300	299	99.76	100,971,000	92,953,000	92,06	336,570	100,728,670	8.37	
6	Pengendalian pemotongan betina produktif	Lokasi	40	40	100	30,729,000	2,506,000	81,55	768,225	30,729,000	1,126,22	
7	Pengembangan populasi sapi potong	Klip	147	147	100	40,948,000	38,033,000	92,88	278,558	40,948,000	7.66	
8	Pengembangan populasi kerbau	Klip	5	4	80	1,464,000	1,366,000	93,29	292,800	1,171,200	-14.26	
Program Penelitian dan Pengembangan teknologi												
1	Perakitan Galur Unggul Sapi PO Agrimak dan FI Siliwangi Sapi PO dan Bali (Galur)	Galur	2	2	100	1,485,706	1,481,273	99,70	742,853	1,485,706	0.30	
2	Perakitan Teknologi Peternakan dan Veteriner Komoditas Stratejis (teknologi)	Teknologi	24	30	125	3,751,533	3,319,296	88.48	156,314	4,689,416	41.28	
3	Bibit Unggul Ternak sapi dan kerbau (ekor)	Ekor	200	200	100	760,000	734,544	96.65	3,800	760,000	3.47	
Program Ditjen PSP												
1	Asuransi Ternak sapi (ekor)	Ekor	120000	91831	76.53	19,200,000	14,692,960	76.53	160	14,692,960	0.00	
Total						974,435,239	809,231,073	83.05	160	901,505,686,25	11.40	78.50

6. KEGIATAN PENDUKUNG TERCAPAINYA PRODUKSI PADI LUAR JAWA

No	Nama Kegiatan	Satuan	Fisik			Anggaran (000 Rp)			Efisiensi (%)	NE %		
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%				
1	Facilitas Penerapan Budidaya Padi	Ha	652,137	615,629	94.40	431,335,078	393,714,646	91.28	661.42	407,188,050.94	3.42	
2	Perbanyakan Benih Sumber Padi	Ha	255	235	92.16	12,362,160	11,514,432	93.14	48,479.06	11,392,578.82	(1.06)	
3	Penguatan Desa Mandiri Benih	Ha	8,960	7,790	86.94	49,865,353	49,821,231	99.91	4,699.84	44,225,539.28	(11.23)	
4	Pengembangan Desa Mandiri Benih	Ha	1,650	1,620	98.18							
5	Pemantapan Penerapan PHT	Ha	10,475	10,000	95.47	13,552,275	12,800,926	94.46	1,293.77	12,937,732.70	1.07	
6	Pemantapan Penanganan DPI	Ha	220	220	100.00	846,675	821,568	97.03	3,848.52	846,675.00	3.06	
7	Gerakan Pengendalian OPT (Reguler+TNI)	Kali	465	465	100.00	4,444,365	4,403,768	99.09	9,557.77	4,444,365.00	0.92	
8	Sarana Pasca Panen Padi	Unit/Paket	2,449	2,449	100.00	668,348,205	660,202,388	98.78	272,906.58	668,348,204.51	1.23	
9	UPPO	unit	1030	1029	99.90	180,250,000	180,019,924	99.87	175,000.00	180,075,000.00	0.03	
10	Penguatan Agroekosistem Padi	Ha	4,950	4,800	96.97	1,729,625	1,659,910	95.97	349.42	1,677,212.12	1.04	
11	Bantuan Benih Padi Inbrida DIPA Puset	Ha	500,000	235,735	47.15	126,838,328	55,774,546	43.97	253.68	59,800,466.50	7.22	
Total						1,489,572,064	1,370,733,338	92.02		1,390,935,824.87	1.47	53.68

7. INDIKATOR KINERJA: HARGA GABAH KERING PANEN DI TINGKAT PRODUSEN

No	Kegiatan	Fisik		Realisasi (%)	Pagu	Anggaran (000 Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)			
		Satuan	Target			Realisasi	(%)					
Program Badan Ketahanan Pangan												
1	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan)	Gapoktan	98	95	7,657,000	7,322,982	95.64	78,133	7,422,602	1.36		
2	Jumlah Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)/ITI (Gap/ITI)	Gap/Toko	406/1.000	406/1.113	130,853,827	121,551,953	92.89	130,854	145,640,309	19.82		
3	Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (HBKN)	Provinsi	35	33	30,152,580	29,067,816	96.40	861,502	28,429,575	-2.20		
Total						168,663,407	157,942,751	93.64	1,070,489	181,492,487	14.91	87.28

8. INDIKATOR KINERJA: SKOR PPH

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)				
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu			Realisasi (%)	Harga Satuan	Harga Total seharusnya	
Program Badan Ketahanan Pangan											
1	Pemberdayaan Pekarangan Pangan (desa)	Desa	1,691	100	42,766,500,000	42,313,050,099	98.94	25,290,656.42	42,766,500,000.00	1.07	
2	Pemantauan Pengangkutan Pangan (Lokasi)	Lokasi	35	100	776,055,000	759,238,825	97.83	22,173,000.00	776,055,000.00	2.21	
3	Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	Unit	35	100	2,700,615,000	2,685,150,920	99.43	77,160,428.57	2,700,615,000.00	0.58	
4	Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan (Rekomendasi)	Lokasi	35	100	9,761,831,000	9,254,458,848	94.80	278,909,457.14	9,761,831,000.00	5.48	
Total					56,005,001,000	55,011,898,692	98.23	403,533,542.13	56,005,001,000.00	1.81	54.51

9. INDIKATOR KINERJA: RASIO KONSUMSI PANGAN LOKAL NON BERAS TERHADAP BERAS

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)				
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu			Realisasi (%)	Harga Satuan	Harga Total seharusnya	
Program Badan Ketahanan Pangan											
1	Pemberdayaan Pekarangan Pangan (desa)	Desa	1,691	100	42,766,500,000	42,313,050,099	98.94	25,290,656.42	42,766,500,000.00	1.07	
2	Pemantauan Pengangkutan Pangan (Lokasi)	Lokasi	35	100	776,055,000	759,238,825	97.83	22,173,000.00	776,055,000.00	2.21	
3	Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	Unit	35	100	2,700,615,000	2,685,150,920	99.43	77,160,428.57	2,700,615,000.00	0.58	
4	Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan (Rekomendasi)	Lokasi	35	100	9,761,831,000	9,254,458,848	94.80	278,909,457.14	9,761,831,000.00	5.48	
Total					56,005,001,000	55,011,898,692	98.23	56,005,001,000	56,005,001,000.00	1.81	54.51

10. INDIKATOR KINERJA: VARIASI PRODUKSI CABE BESAR

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (000 Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)				
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu			Realisasi (%)	Harga Satuan	Harga Total seharusnya	
Program Diijen Hortikultura											
1	Pengembangan kawasan aneka cabai (Ha)	Ha	17,283	105.89	513,032,138	492,480,771	95.99	29,684.21	543,250,660.04	10.31	
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian											
1.	Perakitan VUB Carvi Agrihorti Toleran Virus ChIVMV	Varietas	1	100	200,000	199,887	99.94	200,000.00	200,000.00	0.06	
2.	Paket Teknologi produksi cabai dengan produktivitas >20Ton/ha off season	Teknologi	24	100	350,000	343,164	98.05	14,583.33	350,000.00	1.99	
3.	Benih Sumber Cabai merah (kg)	Kg	100	31.30	1,000,000	998,638	99.86	10,000.00	315,000.00	-68.66	
4.	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Cabe	Teknologi	1	100	371,492	370,180	99.65	371,492.00	371,492.00	0.35	
Total					514,953,630	494,392,639	96.01	544,485,152.04	544,485,152.04	10.13	75.33

11. INDIKATOR KINERJA: VARIASI PRODUKSI CABERAWIT

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)					
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu			Realisasi (%)				
Program Ditjen Hortikultura												
1.	Pengembangan kawasan cabai rawit (Ha)	Ha	17,283	18,301	105.89	513,032,138	492,480,771	95.99	29,684.21	543,250,660.04	10.31	75.773

12. INDIKATOR KINERJA: VARIASI PRODUKSI BAWANG MERAH

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (000 Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)					
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu			Realisasi (%)				
Program Ditjen Hortikultura												
1	Pengembangan kawasan bawang merah	Ha	7,630	7,432	97.40	304,075,584	276,448,806	90.91	39,852.63	296,184,762.82	7.14	
2	Produksi Benih Bawang Merah	Kg	2,416,695	2,319,797	95.99	23,944,713	22,885,785	95.58	9.91	22,984,643.65	0.43	
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian												
1.	Perakitan varietas unggul bawang merah Violetta Agrihorti		1	1	100	400,000	399,202	99.80	400,000.00	400,000.00	0.20	
2	Paket teknologi budidaya bawang merah produksi 40 ton/ha off season	teknologi	1	1	100	350,000	347,912	99.40	350,000.00	350,000.00	0.60	
3	Benih sumber bawang merah	Kg	650	111	17	1,783,000	1,772,070	99.39	2,743.08	304,481.54	-82.82	
4	Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Bawang Merah	Teknologi	1	1	100	347,648	345,201	99.30	347,648.00	347,648.00	0.71	
Total						330,900,945	302,198,976	91.33		320,571,536.00	6.08	65.20

13. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI MANGGA

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)					
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu			Realisasi (%)				
Program Ditjen Hortikultura												
	Pengembangan kawasan mangga	Ha	1,355	1,240	91.51	12,216,882,630	11,029,886,617	90.28	9,016,149.54	11,180,025,432	1.36	53.40

14. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI MANAS

No	Kegiatan	Satuan		Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi (%)		
	Program Ditjen Hortikultura								
	Pengembangan kawasan manas	Ha	126	126	100.00	1,136,034,842	1,120,778,801	98.66	53.40
						9,016,149.54			1.36
							1,136,034,842.32		

15. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI MANGGIS

No	Kegiatan	Satuan		Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi (%)		
	Program Ditjen Hortikultura								
	Pengembangan kawasan manggis	Ha	470	470	100	4,237,590,285	4,180,682,831	98.66	53.40
						9,016,150			1.36
							4,237,590,285		

16. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI SALAK

No	Kegiatan	Satuan		Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi (%)		
	Program Ditjen Hortikultura								
	Pengembangan kawasan salak	Ha	75	62	82.67	676,211,216	533,704,191	78.93	61.85
						9,016,150			4.74
							559,001,272		

17. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI KENTANG

No	Kegiatan	Satuan		Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi (%)		
	Program Ditjen Hortikultura								
	Kawasan Kentang	Ha	262	187	71.37	4,201,713,394	2,629,102,425	62.57	85.17
	Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian								
	Praktikan VUB Kentang Spudy	varietas	1	1	100	117,000,000	109,000,000	93.16	68.35
	Agrihorti								
	Total					4,318,713,394	2,738,102,425	63.40	13.80
							3,115,932,842		

18. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI KARET

No	Kegiatan	Fisik			Anggaran (Rp)			Harga Satuan	Harga Total seharusnya	Efisiensi (%)	NE (%)	
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi (%)	(%)					
Program Ditetapkan Perkebunan												
1	Peremajaan Tanaman Karet	Ha	5.100	4.750	93.14	35.457.562.000	29.569.529.300	83.39	6.952.463.14	33.024.199.901.96	11.68	
2	Peremajaan Tanaman Karet (P)	Ha	9.550	7.327	76.72	88.415.375.000	57.495.765.330	65.03	9.238.154.45	67.834.497.657.07	17.98	
3	Perluasan Tanaman Karet	Ha	100	100	100.00	802.000.000	464.625.000	57.93	8.020.000.000	802.000.000.000	72.61	
4	Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Karet (P)	Keg	57	57	100.00	3.935.483.000	3.201.891.703	81.36	69.043.561.40	3.935.483.000.000	22.91	
5	Pengawalan dan Pendampingan Perijasaan Karet(P)	Keg	2	2	100.00	237.960.000	155.410.500	65.31	118.980.000.000	237.960.000.000	53.12	
6	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Karet	Keg	1	1	100.00	449.655.000	351.652.000	78.20	449.655.000.000	449.655.000.000	27.87	
7	Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Karet	Orang	200	200	100.00	240.460.000	219.798.000	91.41	1.202.300.000	240.460.000.000	9.40	
8	Penguatan Kelembagaan Petani Karet	Orang	30	30	100.00	95.385.000	86.755.000	90.95	3.179.500.000	95.385.000.000	9.95	
Dukungan Perbenihan												
1	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (entres karet)	Ha	5	5	100.00	753.253.000	710.039.000	94.26	150.650.600.000	753.253.000.000	6.09	
2	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam (entres karet)	Keg	2	2	100.00	174.604.000	102.834.000	58.90	87.302.000.000	174.604.000.000	69.79	
3	Penyediaan benih siap tanam	Big	1.400.000	700.000	50.00	2.229.772.000	1.248.106.000	55.97	1.592.69	1.114.886.000.000	-10.67	
4	Pengawalan dan Pembinaan benih	Keg	4	4	100.00	663.031.000	543.344.000	81.95	1.657.577.500.000	663.031.000.000	22.03	
Dukungan Perilindungan Perkebunan												
1	Defarm penerapan PHT tanaman karet	Ha	175	175	100.00	627.213.000	627.213.000	100.00	3.584.074.29	627.213.000.000	0.00	
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan												
1	Pasca panen karet	KT	96	96	100.00	7.498.450.000	6.853.314.000	91.40	78.108.854.17	7.498.450.000.000	9.41	
2	Fasilitasi pengolahan karet	Unit	21	21	100.00	5.638.000.000	5.113.890.000	90.70	2.684.476.190.48	5.638.000.000.000	10.25	
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian												
1	Teknologi Budidaya tanaman karet	Teknologi	1	1	100	190.000.000	186.200.000	98.00	190.000.000.000	190.000.000.000	2.04	
Total						147.408.203.000	106.930.366.833	72.54		123.279.077.559.03	15.29	88.22

19. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI KOPI

No	Kegiatan	Fisik			Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	Efisiensi (%)	NE (%)			
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Pagu				Realisasi	Realisasi (%)	Harga Satuan
Program Diben Perkebunan												
1	Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika	Ha	4.900	4.500	91,84	17.635.974,000	13.028.320,125	73,87	3.599,178,37	16.196.302.653,06	24,32	
2	Intensifikasi Tanaman Kopi Robusta	Ha	3750	3750	100,00	14.373.600,000	1.950.864,750	83,14	3.832,960,00	14.373.600,000	20,27	
3	Perluasan Tanaman Kopi (P)	Ha	300	200	66,67	3.936,000,000	267,000,000	67,84	13.120,000	2.624,000,000	-1,72	
4	Peremajaan Tanaman Kopi Robusta (P)	Ha	375	375	100,00	4.412,375,000,00	3,674,675,000,00	83,28	11,766,333,33	4,412,375,000,00	20,08	
5	Peremajaan Tanaman Kopi Arabika (P)	Ha	1300	650	50,00	13,334,500,000,00	3,319,863,000,00	24,90	10,257,307,69	6,667,250,000,00	100,83	
6	Perluasan Tanaman Kopi Robusta (P)	Ha	2000	1000	50,00	3,936,000,000,00	2,484,000,000,00	63,11	19,660,000,00	3,936,000,000,00	58,45	
7	Perluasan Tanaman Kopi Arabika (P)	Ha	380	100	26,32	5,242,610,000,00	1,150,789,100,00	20,04	15,112,131,58	1,511,213,157,89	31,32	
8	Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Kopi Arabika (P)	Keg	16	14	87,50	920,000,000,00	655,581,250,00	71,26	57,500,000,00	805,000,000,00	22,79	
9	Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Kopi Robusta (P)	Keg	5	5	100,00	290,000,000,00	269,206,950,00	92,83	58,000,000,00	290,000,000,00	7,72	
10	Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Kopi Robusta (P)	Keg	4	2	50,00	260,000,000,00	118,500,000,00	45,58	65,000,000,00	130,000,000,00	9,70	
11	Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Kopi Arabika (P)	Keg	6	4	66,67	287,250,000,00	172,347,888,00	60,00	47,875,000,00	191,500,000,00	11,11	
12	fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Kopi	Keg	1	1	100,00	436,750,000,00	433,150,000,00	99,18	436,750,000,00	436,750,000,00	0,83	
13	Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kopi	Orang	200	200	100,00	246,035,000,00	223,514,300,00	90,85	1,230,175,00	246,035,000,00	10,08	
14	Pengawalan Kelembagaan Petani Kopi	Orang	30	30	100,00	102,715,000,00	102,715,000,00	100,00	3,423,833,33	102,715,000,00	0,00	
15	fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan	Keg	1	1	100,00	200,000,000,00	199,200,000,00	99,60	200,000,000,00	200,000,000,00	0,40	
Dukungan Perbaikan Perkebunan												
1	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (entres kopi)	Ha	3	3	100,00	148,862,000,00	114,122,000,00	76,66	49,620,666,67	148,862,000,00	30,44	
2	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (KI kopi)	Ha	10	8	80,00	652,783,000,00	490,023,000,00	75,07	65,278,300,00	522,226,400,00	6,57	
3	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam (KI kopi)	Ha	6	5	83,33	266,349,000,00	178,900,000,00	67,17	44,391,500,00	221,957,500,00	24,07	
4	Penyediaan benih siap tanam	Bkg	4.100.880	3.737.504	91,15	12.188.893,000,00	9.585.681,000,00	78,64	2,972,48	11.109.656,766,38	15,90	
5	Pengawalan dan Pembinaan penyediaan benih tanaman kopi	Keg	6	6	100,00	948,358,000,00	712,329,000,00	75,11	158,059,666,67	948,358,000,00	33,13	
Dukungan Perindogan Perkebunan												
1	Demfarm penerapan PHT tanaman kopi	Ha	200	200	100,00	738,300,000,00	738,300,000,00	100,00	3,691,500,00	738,300,000,00	0,00	
2	SILPHT tanam kopi	KT	2	2	100,00	230,060,000,00	230,060,000,00	100,00	115,030,000,00	230,060,000,00	0,00	
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan												
1	Pasca panen kopi	KT	69	69	100,00	14.752.850,000,00	13.123.595,000,00	88,96	213.899,420,29	14.752.850,000,00	12,41	
2	fasilitasi pengolahan karet	Unit	21	21	100,00	5.869.600,000,00	5.199.177,000,00	88,58	279.504,761,90	5.869.600,000,00	12,89	
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian												
1	Penelitian teknologi budidaya kopi (teknologi)	Teknologi	2	2	100	220,000,000,00	216,700,000,00	98,50	110,000,000,00	220,000,000,00	1,52	
Total						102.129.864.000,00	71.041.617.363,00	69,56		86.684.611.477,33	22,30	105,75

20. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI KAKAO

No	Kegiatan	Fisik		Realisasi (%)	Pagu	Anggaran (Rp)		Harga Satuan	Harga Total sehanusnya	Efisiensi (%)	NE (%)
		Satuan	Target			Realisasi	(%)				
Program Ditingkatkan Perkebunan											
1.	Peremajaan Tanaman Kakao (P)	Ha	5,475	4,243	62,831,485,000	45,304,929,750	72.11	11,476,070.32	48,692,966,366.21	7.48	
2.	Perluasan Tanaman Kakao(P)	Ha	900	900	8,559,414,000	7,269,657,653	84.93	9,510,460.00	8,559,414,000.00	17.74	
3.	Pengembangan Desa Kakao	Keg	1	1	50,000,000	49,999,700	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
4.	TKP dan PL-TRP	org	500	500	10,084,490,000	9,936,390,000	98.53	20,168,980.00	10,084,490,000.00	1.49	
5.	Pengembangan desa kakao	keg	1	1	787,514,000	785,174,000	99.70	787,514,000.00	787,514,000.00	0.30	
6.	Operasional Substation	Keg	4	4	2,359,000,000	2,336,543,700	99.05	589,750,000.00	2,359,000,000.00	0.96	
7.	Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan	Keg	3	3	700,000,000	641,701,000	91.67	233,333,333.33	700,000,000.00	9.09	
8.	Pengawasan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman Kakao (P)	Keg	38	38	2,205,472,000	1,922,198,902	87.16	58,038,736.84	2,205,472,000.00	14.74	
9.	Pengawasan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Kakao (P)	Keg	6	6	360,260,000	324,435,950	90.06	60,043,333.33	360,260,000.00	11.04	
10.	Pelatihan penguatan kelembagaan petani kakao	org	90	90	399,555,000	388,447,000	97.22	4,439,500.00	399,555,000.00	2.86	
11.	Pengawasan dan pendampingan perluasan kakao	keg	6	6	360,260	324,436	90.06	60,043.33	360,260.00	11.04	
Dukungan Perbenihan Perkebunan											
1.	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (gentees kakao)	Ha	21	21	468,287,000	421,189,000	89.94	22,299,380.95	468,287,000.00	11.18	
2.	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (KI kakao)	Ha	4	4	107,572,000	103,057,000	95.80	26,893,000.00	107,572,000.00	4.38	
3.	Penyediaan benih siap tanam	Btg	1,482,000	1,267,110	3,853,196,000	3,231,993,000	83.88	2,600.00	3,294,482,580.00	1.93	
4.	Pengawasan dan Pembinaan	Keg	4	4	663,031,000	543,344,000	81.95	165,757,750.00	663,031,000.00	22.03	
Dukungan Perilindungan Perkebunan											
1.	ISLPHIT Perkebunan	KT	2	2	218,060,000	218,060,000	100.00	109,030,000.00	218,060,000.00	0.00	
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan											
1.	Paspa panen	KT	3	3	937,600,000	896,114,000	95.58	312,533,333.33	937,600,000.00	4.63	
2.	Pengolahan	Unit	2	2	1,999,400,000	1,911,135,000	95.59	999,700,000.00	1,999,400,000.00	4.62	
Program Penelitian dan Pengembangan Perkebunan											
1.	Peraktikan teknologi kakao	teknologi	1	1	220,000,000	216,700,000	98.50	220,000,000.00	220,000,000.00	1.52	
Total					96,804,696,260	76,501,394,091	79.03	82,107,464,206.21	82,107,464,206.21	7.33	68.32

21. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI KELAPA

No	Kegiatan	Fisik			Anggaran (Rp)			Efisiensi (%)	NE (%)		
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi (%)	Harga Satuan			Harga Total seharusnya	
Program Ditingkatkan Perkebunan											
1	Peremajaan Tanaman Kelapa	Ha	11,725	10,462	89.23	26,493,145,000	23,135,704,540	87.33	23,639,341,832.84	2.18	
2	Peremajaan Tanaman Kelapa (P)	Ha	4,586	3,585	78.17	13,461,450,000	8,557,379,850	63.57	10,523,178,859.57	22.97	
3	Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Kelapa (P)	Ha	1,100	700	63.64	3,201,700,000	1,902,908,372	59.43	2,037,445,454.55	7.07	
4	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Kelapa	Keg	30	30	100.00	1,746,770,000	1,591,322,900	91.10	1,746,770,000.00	9.77	
5	Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa	Keg	10	10	100.00	471,300,000	420,465,600	89.21	471,300,000.00	12.09	
6	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Kelapa	Keg	1	1	100.00	280,550,000	280,514,800	99.99	280,550,000.00	0.01	
7	Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Petani Kelapa	Orang	200	200	100.00	320,800,000	291,999,500	91.02	320,800,000.00	9.86	
8	Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa	Orang	30	30	100.00	203,550,000	192,600,000	94.62	203,550,000.00	5.69	
9	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani Perkebunan	Keg	2	1	50.00	180,600,000	176,625,500	97.80	90,300,000.00	-48.87	
10	Perluasan Tanaman Kelapa	Ha	1,100	700	63.64	3,201,700,000	1,902,908,000	59.43	2,037,445,454.55	7.07	
11	pengawalan dan pendampingan peremajaan kelapa	Keg	30	30	100.00	1,746,770,000	1,591,322,000	91.10	1,746,770,000.00	9.77	
Dukungan Perbenihan Perkebunan											
1	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (KI kelapa)	Ha	10	5	50.00	185,980,000	106,823,000	57.43	92,995,000.00	-12.94	
2	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam (KI kelapa)	Keg	146	137	93.84	1,062,980,000	974,804,000	91.70	997,453,835.62	2.32	
3	Penyediaan benih siap tanam	Big	616,000	616,000	100.00	10,501,322,000	9,032,677,000	86.01	10,501,322,000.00	16.26	
4	Pengawalan dan Pembinaan penyediaan benih kelapa	Keg	7	6	85.71	1,201,568,000	817,143,000	68.01	1,029,915,428.57	26.04	
Dukungan Perlindungan Perkebunan											
1	Denfarm penerapan PHT tanaman Kelapa	Ha	225	225	100.00	529,400,000	529,400,000	100.00	529,400,000.00	0.00	
2	SLPHT tanaman kelapa	KT	2	2	100.00	230,060,000	230,060,000	100.00	230,060,000.00	0.00	
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil											
1	pasca panen kelapa	KT	15	15	100.00	1,311,635,000	1,307,890,000	99.71	1,311,635,000.00	0.29	
2	Fasilitasi pengolahan kelapa	Unit	28	28	100.00	7,131,470,000	6,868,495,000	96.31	7,131,470,000.00	6.94	
Program Penelitian dan Pengembangan											
1.	Perakitan Varietas Kelapa	varietas	3	4	133.33	400,500,000	392,490,000	98.00	534,000,000.00	36.05	
2	Perakitan Teknologi Tanaman Kelapa dan Palma	teknologi	1	1	100	370,120,000	362,717,600	98.00	370,120,000.00	2.04	
Total						74,233,380,000	60,466,250,662	81.45	65,825,822,865.69	8.86	72.16

22. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI TEH

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)					
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu			Realisasi (%)				
Program Ditjen Perkebunan												
1.	Rehabilitasi Tanaman Teh (P)	Ha	200	200	100	4,229,800,000	3,181,660,000	75.22	21,149,000.00	4,229,800,000.00	32.94	
2.	Pengawalan dan Pendampingan Rehabilitasi Tanaman Teh (P)	Keg	3	3	100	196,300,000	188,556,500	96.06	65,433,333.33	196,300,000.00	4.11	
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian												
1.	Perakitan Varietas unggul teh	varietas	1	2	200	295,000,000	291,165,000	98.7	295,000,000.00	590,000,000.00	102.63	
Total						4,721,100,000.00	3,664,381,500	77.55		5,016,100,000.00	37.00	142.50

23. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI DAGING KAMBING DAN DOMBA

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)					
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu			Realisasi (%)				
Program												
1.	Pengembangan populasi kambing	Kip	2	2	100	430,000,000	428,960,000	99.76	215,000,000.00	430,000,000.00	0.24	
2.	Pengembangan populasi domba	Kip	3	3	100	577,150,000	509,810,000	86.77	192,383,333.33	577,150,000.00	15.24	
3.	Peningkatan kualitas bibit unggul ternak kambing	Ekor	1,150	1,237	108	725,620,000	713,360,000	98.31	630,973.91	780,514,730.43	9.41	
Program Penelitian dan Pengembangan Pertanian												
1.	Perakitan Galur Unggul (galur)	Galur	5	7	140	1,517,938,000	1,516,811,235	99.93	303,587,600.00	2,125,113,200.00	40.10	
Total						3,250,708,000	3,159,941,235	97.21		3,912,777,930.43	23.82	109.56

24. INDIKATOR KINERJA: PRODUKSI KELAPA SAWIT

No	Kegiatan	Fisik			Anggaran (Rp)			Efisiensi (%)	NE (%)	
		Satuan	Target	Realisasi (%)	Pagu	Realisasi (%)	Harga Satuan			Harga Total seharusnya
Program Ditjen Perkebunan										
1	Perluasan Tanaman Kelapa Sawit	Ha	500	100	3,959,350,000	3,867,218,750	97.67	7,918,700.00	3,959,350,000.00	2.38
2	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Masyarakat Petani Kelapa Sawit	Keg	1	100	423,100,000	396,694,000	93.76	423,100,000.00	423,100,000.00	6.66
3	Pelatihan Penuhban	Orang	200	100	118,575,000	112,286,000	94.70	592,875.00	118,575,000.00	5.60
4	Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit	Orang	30	100	233,275,000	232,718,000	99.76	7,775,833.33	233,275,000.00	0.24
Dukungan Pengolahan dan Pemasaran										
1	Fasilitasi penetapan harga TBS	Keg	12	100	360,000,000	346,640,000	96.29	30,000,000.00	360,000,000.00	3.85
2	Koordinasi dan supervisi GNPSDA sub Sektor Perkebunan (K Sawit)	Unit	2	100	1,999,400,000	1,911,135,000	95.59	999,700,000.00	1,999,400,000.00	4.62
Total					7,093,700,000	6,866,691,750	96.80		7,093,700,000.00	3.31

25. INDIKATOR KINERJA: Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (unit)

No	Rencana kegiatan	Realisasi keuangan			Realisasi fisik			Efisiensi (%)	NE (%)	
		Pagu	Realisasi	%	Target Fisik (unit)	Realisasi Fisik (unit)	%			
I FASILITASI KELEMBAGAAN PETANI										
a.	Sekolah Lapangan Mendukung UPSUS	Rp.	25,509,690,000	Rp.	24,073,932,900	94.37%	816	816	100%	5.96
b.	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	Rp.	1,495,000,000	Rp.	1,314,345,000	87.92%	400	380	95%	8.06
c.	Pengawalan dan Pendampingan APBPH P	Rp.	24,480,000,000	Rp.	21,920,242,000	89.54%	7,200	6,530	90.69%	1.29
Total		Rp.	51,484,690,000	Rp.	47,308,519,900	91.88852045	8416	7726	91.801	3.85
										59.64

26. INDIKATOR KINERJA: PENDAPATAN KELUARGA PETANI

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)			
		Satuan	Target	Realisasi	(%)			Pagu	Realisasi	(%)
Program BKP										
1	Pengembangan kawasan Mandiri Pangan (kawasan)		78	100	14,646,000,000	14,167,021,922	96.73	187769230.8	14,646,000,000	3.38
2	Dukungan Manajemen dan Administrasi SOLID (12 bln layanan)		168	100	43,644,376,000	43,000,000,000	98.52	259787952.4	43,644,376,000	1.50
Total					58,290,376,000	57,167,021,922	98.07		58,290,376,000	1.97

27. INDIKATOR KINERJA: NILAI IKM KEMANTAN

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)			
		Satuan	Target	Realisasi	(%)			Pagu	Realisasi	(%)
1	Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kemantan	1	100	100	905,640,000	876,887,906	96.83	905,640,000	905,640,000	3.28
2	Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal	1	100	100	264,578,260,000	234,628,566,984	88.68	264,578,260,000	264,578,260,000	12.76
3	Pelayanan perkarantinaan	1	100	100	703,716,412,000	693,297,700,824	98.52	703,716,412,000	703,716,412,000	1.50
4	Pelayanan pelatihan dan pendidikan pertanian	1	100	100	494,940,712,000	472,885,816,999	95.54	494,940,712,000	494,940,712,000	4.66
Total					1,464,141,024,000	1,401,688,972,713	95.73		1,464,141,024,000	4.46

28. INDIKATOR KINERJA: NILAI RB KEMANTAN

No	Kegiatan	Fisik		Anggaran (Rp)		Efisiensi (%)	NE (%)			
		Satuan	Target	Realisasi	(%)			Pagu	Realisasi	(%)
Program Setjen										
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (LPT)	Indeks	80	100	980,100,000	949,783,531	96.91	12,251,250	1,225,125,000	28.99
2	Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan	Indeks	76	95	1,171,100,000	1,095,475,164	93.54	15,409,211	1,463,875,000	33.63
3	Penataan Sistem Manajemen ASN	Indeks	80	96	14,606,381,000	14,401,307,814	98.60	182,579,763	17,454,625,295	21.20
4	Pertanian berdasarkan Prolegnas dan Prolectan	persentase	80	77	8,339,036,000	7,608,399,149	91.24	104,237,950	8,017,983,114	5.38
5	Penerapan dan Pengembangan e-government Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	100	2,969,917,000	2,828,987,223	95.25	2,969,917,000	2,969,917,000	4.98
6	Penyenggaraan SPI dan pengembangan kapasitas SDM	Kegiatan	1	100	5,006,607,000	4,543,610,945	90.75	5,006,607,000	5,006,607,000	10.19
7	Penguatan akuntabilitas Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	100	18,180,559,000	17,482,241,772	96.16	18,180,559,000	18,180,559,000	3.99
8	Dukungan dalam mewujudkan Opini Lap. Keuangan Kementerian WTP	Kegiatan	1	100	974,131,413,000	948,384,134,352	97.36	974,131,413,000	974,131,413,000	2.71
Program Itjen										
	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan lingkup Kementerian Pertanian	Kegiatan	1	100	92,439,375,000	85,720,888,115	92.73	92,439,375,000	92,439,375,000	7.84
Total					1,117,824,488,000	1,083,014,828,065	96.89		1,120,889,479,409.00	3.50

58.74

**LAMPIRAN 4. REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2017**

NO	ESELON-I	PAGU	REALISASI	2017%	2016%	
					Sebelum Self Blocking	Setelah Self Blocking
1	Barantan	802.283.500.000	789.205.541.885	98,37	94,86	98,67
2	BKP	452.129.796.000	432.042.688.268	95,56	90,47	94,76
3	Sejten	1.446.100.068.000	1.381.259.009.312	95,52	87,30	97,05
4	Badan Litbangtan	1.657.911.155.000	1.556.713.097.487	93,90	92,72	96,30
5	Ijjen	92.439.375.000	85.720.888.115	92,73	82,70	94,60
6	Badan PPSDMP	1.207.410.450.000	1.115.269.178.541	92,37	94,06	96,96
7	Dijjen PSP	6.926.098.850.000	6.362.277.025.467	91,86	75,41	97,96
8	Dijjen TP	7.162.403.488.000	6.365.995.681.558	88,88	62,18	97,64
9	Dijjen PKH	1.887.642.254.000	1.664.491.422.486	88,18	67,96	91,91
10	Dijjen Hortikultura	1.443.187.209.000	1.211.498.266.400	83,95	90,26	94,64
11	Dijjen Perkebunan	1.148.531.631.000	944.912.822.839	82,27	87,44	95,91
TOTAL		24.226.137.776.000	21.909.385.622.358	90,44	76,17	96,85

Sumber: SPAN Kemenkeu dan Biro Keuangan dan Perencanaan Kementan, 2017

LAMPIRAN 5. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN KINERJA

No	Rekomendasi perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran yang dibutuhkan
I. Peningkatan produksi kedelai				
1.	Sosialisasi Permentan tentang pencantuman kedelai produk rekayasa genetik dan non produk rekayasa genetik untuk pangan segar	April-Des 2018	Setditjen dan Direktorat PPHTP	50,000,000
2.	Menyusun Permentan tentang Rekomendasi Impor Kedelai	Januari-Des 2018	Setditjen dan Direktorat PPHTP	50,000,000
3	Edukasi dan promosi kedelai nasional serta olahannya melalui gerai atau outlet, lomba pameran, festival serta event nasional maupun regional	Januari-Des 2018	Direktorat PPHTP	510,000,000
4	Memantau tata niaga kedelai	Januari-Des 2018	Direktorat PPHTP	3,431,500,000
5	Pengembangan kemitraan dan jaringan pemasaran kedelai lokal	Januari-Des 2018	Direktorat PPHTP	141,780,000
6	Mengalokasikan bantuan saprodi budidaya kedelai seluas 1.500.000 Ha	Januari-Des 2018	Direktorat PPHTP	1,428,000,000,000
7	Peningkatan perlindungan serangan OPT melalui PPHT kedelai 760 Ha, Gerdal 65 kali, dan penguatan agroekosistem 160 Ha	Januari-Des 2018	Direktorat Aneka Kacang dan Umbi	2,417,000,000
8	Peningkatan fasilitas sarana pasca panen kedelai sebesar 2229 unit	Januari-Des 2018	Direktorat PPHTP	68,167,290,000
II. Peningkatan produksi gula tebu				
9	Penanaman Tanaman Tebu	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Semusim dan Rempah	69,788,884,000
10	Bongkar ratoon	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Semusim dan Rempah	15,890,490,000
11	Rawat ratoon	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Semusim dan Rempah	11,122,125,000
12	Pengawalan dan Movev Tanaman Tebu	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Semusim dan Rempah	4,141,900,000
13	Penerapan Varietas Tebu Adaptif	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Semusim dan Rempah	2,750,000,000
14	Peningkatan Kapabilitas Petugas Teknis dan Petani Tebu	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Semusim dan Rempah	2,400,000,000
15	Fasilitas Pengolahan Gula Tebu (2 unit)	Maret - Nopember 2018	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1,850,000,000
III. Peningkatan produksi daging sapi dan kerbau				
16	Penanganan Pemotongan Sapi dan Kerbau Betina Produktif	Januari- Desember 2018	Direktorat Kesmavet	15.689.151.000
17	Perbaikan Pakan Ternak Sapi	Januari- Desember 2018	Direktorat Pakan	14.370.000.000
18	Penguatan Kelembagaan Peternak	Januari- Desember 2018	Direktorat PPHNak	300.000.000
19	Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Januari- Desember 2018	Direktorat Perbibitan dan PRoduksi Ternak	6.000.000.000
20	Penyediaan dan Distribusi Sarana dan Prasarana semen beku, N2 Cair, dan kontainer.	Januari- Desember 2018	Direktorat PPHNak	89.961.791.000
IV. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
21	Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sarana mendukung penyediaan pangan	Januari-Des 2018	Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	115,000,000,000
22	terus menerus dilakukan sosialisasi akan pentingnya konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat	April-Des 2018	Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	8,838,290,000
23	Mengembangkan teknologi untuk memproduksi dan mengolah pangan lokal	Januari-Des 2018	Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	3,000,000,000
V. Koefisien Variasi Cabe Rawit				
24	Perluasan areal tanam (7.375 ha)	Januari-Desember 2018	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	401,625,000,000
25	Bantuan sarana dan prasarana budidaya cabai rawit	Januari-Desember 2018	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	401,625,000,000
26	Penanaman di luar musim (7.375 ha)	Januari-Desember 2018	Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat	401,625,000,000
VI. Produksi Mangga				
27	Pengembangan Kawasan Mangga (1200 ha)	Januari-Desember 2018	Direktorat Buah dan Florikultura	8,422,500,000
VII. Produksi Nanas				
28	Pengembangan Kawasan Nanas (25 ha)	Januari-Desember 2018	Direktorat Buah dan Florikultura	2,735,000,000
29	Kawasan Buah Di wilayah Perbatasan (Nanas) (10 ha)	Januari-Desember 2018	Direktorat Buah dan Florikultura	8,000,000,000
VIII. Produksi Salak				
30	Pengembangan Kawasan Salak (25 Ha)	Januari-Desember 2018	Direktorat Buah dan Florikultura	2,735,000,000
IX. Produksi Kakao				
31	Intensifikasi Tanaman Kakao (1.030 ha)	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Tahunan dan Penyegar	9,730,388,000
32	Peremajaan Tanaman Kakao (5.870 ha)	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Tahunan dan Penyegar	22,258,164,000
33	Perluasan Tanaman Kakao (2.080 ha)	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Tahunan dan Penyegar	13,839,942,000
34	Peremajaan Tanaman Kakao (2.720 ha)	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Tahunan dan Penyegar	31,753,100,000
X. Produksi Teh				
35	Intensifikasi Tanaman Teh (215 ha)	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Tahunan dan Penyegar	1,215,932,000
36	Rehabilitasi Tanaman Teh (1.000 ha)	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Tahunan dan Penyegar	5,424,325,000
XI. Produksi Kelapa Sawit				
37	Fasilitas Pengembangan Kelapa Sawit	Maret - November 2018	Dirat Tanaman Tahunan dan Penyegar	320,000,000



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2017

Menteri Pertanian,

A. Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Daging, dan Gula	1. Produksi Padi 2. Produksi Jagung 3. Produksi Kedelai 4. Produksi Tebu 5. Produksi Daging Sapi dan Kerbau	78,13 Juta Ton 25,20 Juta Ton 1,20 Juta Ton 2,40 Juta Ton GKP 640 Ribu Ton Karkas
2.	Terjaminnya Distribusi Pangan	1. Rasio Produksi Padi per Kapita di Luar Jawa 2. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen	337 Kg/Tahun ≥ HPP
3.	Meningkatnya Akses dan Pemanfaatan Pangan dan Gizi	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,4
4.	Meningkatnya Konsumsi Pangan Lokal	1. Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras	5,87%
5.	Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang Merah	1. Variasi Produksi Bulanan Cabai Besar 2. Variasi Produksi Bulanan Cabai Rawit 3. Variasi Produksi Bulanan Bawang Merah	≤ 15 cv% ≤ 17 cv% ≤ 20 cv%
6.	Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	1. Produksi Mangga 2. Produksi Nanas 3. Produksi Manggis 4. Produksi Salak 5. Produksi Kentang 6. Produksi Karet 7. Produksi Kopi 8. Produksi Kakao 9. Produksi Kelapa 10. Produksi Teh 11. Produksi Daging Kambing dan Domba	2.399 Ribu Ton 1.902 Ribu Ton 120 Ribu Ton 1.152 Ribu Ton 1.437 Ribu Ton 3.559 Ribu Ton Karet Kering 637.539 Ton Kopi Berasan 688.345 Ton Biji Kering 2.673 Ribu Ton 146.168 Ton 120 Ribu Ton
7.	Tersedianya Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi	1. Produksi Kelapa Sawit	40.936.330 Ton CPO
8.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Insani Petani	1. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	25
9.	Meningkatnya Pendapatan Keluarga Petani	1. PDB Pertanian Sempit/Jumlah Tenaga Kerja Pertanian	Rp. 27,0 Juta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10.	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Layanan Kelembagaan Pertanian	1. Nilai IKM Kementerian Pertanian	82
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian	1. Nilai Reformasi Birokrasi	74

	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	Rp	1.444.797.169.000,-
2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Rp	92.439.375.000,-
3.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Rp	7.162.403.488.000,-
4.	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Rp	1.443.187.209.000,-
5.	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Rp	1.148.531.631.000,-
6.	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Rp	1.886.692.254.000,-
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp	6.926.098.850.000,-
8.	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	Rp	1.651.423.912.000,-
9.	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian	Rp	855.634.027.000,-
10.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	452.129.796.000,-
11.	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Rp	802.283.500.000,-
12.	Program Pendidikan Pertanian	Rp	351.776.423.000,-

Jakarta, Desember 2017
Menteri Pertanian,



A. Amran Sulaiman

